PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju Keren

LKjIP
TAHUN 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju



Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si
Bupati Mamuju

Yuki Permana, S.T
Wakil Bupati Mamuju



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi misi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju terwujud atas kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan,

implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju, Maret 2026

BUPATI MAMUJU,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Clean and good governance) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensipitas pemerintahan terhadap tuntunan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Mamuju berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result, Oriented Government) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi,misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat di uji dan dapat diandalkan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 Sasaran dan 4 indikator kinerja :
   - ❖ Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 75 % kategori baik dan 25 % kategori Kurang.
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 Indikator kinerja :
   - ❖ Capaian indikator sasaran sebanyak 4 Indikator sasaran atau 50% kategori baik sekali dan 2 indikator sasaran atau 50 % kategori Baik .
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja
   - ❖ Capaian indikator sasaran sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,33% kategori baik Sekali 1 indikator sasaran atau 16,67 % kategori Kurang.
4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
   - ❖ Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 100% kategori baik.

5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja :

   - ❖ Capaian indikator sasaran sebanyak 2 Indikator sasaran atau 33.33% kategori baik sekali , Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,33 % kategori Baik serta Capaian indikator sasaran sebanyak 2 indikator sasaran atau 33,34 % kategori Cukup

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 18,18 persen bermakna Baik Sekali, 12 indikator sasaran atau 54,55 persen bermakna Baik, 1 indikator sasaran atau 4,55 persen bermakna Cukup, 4 indikator sasaran atau 22,72 persen bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 79,53 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata- rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 99.98 persen, dikategorikan Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 bermakna baik meskipun menurun sebesar 20,45 persen capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024. hal ini disebabkan karena adanya salah satu indikator daerah yang mengalami penurunan Capaian Kinerjanya yakni pada indikator Pertumbuhan Investasi.

Dimana realisasi tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan investasi sebesar -72,1%, yang berarti telah Terjadi kontraksi sangat tajam (penurunan 117,14 poin) dibanding tahun 2024 dengan Capaian jauh di bawah target (selisih -87,1 poin).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR GRAFIK x

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Kondisi Daerah 3
C. Pertumbuhan Ekonomi 13
D. Kondisi Pemerintahan 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 29

1. Visi 29
2. Misi 30
3. Tujuan dan Sasaran 30
4. Strategi dan Arah Kebijakan 36
5. Strategi 36

B. Arah Kebijakan Tahunan 43
C. Indikator Kinerja Utama 46
D. Perjanjian Kinerja 53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 56
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 56
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 60
C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 129
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan..... 129
1. Pendapatan Asli Daerah 129
2. Pendapatan Transfer..... 135
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah..... 136

BAB IV PENUTUP..... 140
A. Kesimpulan dan Saran..... 140
B. Strategi peningkatan kinerja 141

LAMPIRAN

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
4. LRA Tahun 2025
5. Matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026
6. SOP Penyusunan LKjIP Kabupaten Mamuju Tahun 2025
7. Realisasi Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2025	4
Tabel	1.2	persentase terhadap luas kabupaten	5
Tabel	1.3	Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju dan Letak Geografi ,2021,2024, dan 2025	6
Tabel	1.4	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun BMKG Majene, 2025	7
Tabel	1.5	Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Mamuju, 2025	8
Tabel	1.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju (jiwa),Tahun 2023, 2024 dan 2025	9
Tabel	1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju (persen),Tahun 2024 dan 2025	10
Tabel	1.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin diMamuju, 2025	11
Tabel	1.9	Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025	12
Tabel	1.10	Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025	13
Tabel	1.11	Nilai Indikator Kemiskinan di Kabupaten Mamuju, 2024-2025	14
Tabel	1.12	Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2025	17
Tabel	1.13	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jenis ASN,dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2025	22
Tabel	1.14	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang),Desember 2025	23
Tabel	1.15	Urusan Pemerintahan	24
Tabel	1.16	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (orang),2025	28
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	30

Tabel 2.2	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	43
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026	47
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	54
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja InstansiPemerintah	57
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	58
Tabel 3.3	Persentase Kategori Capaian Indikator Sasaran	58
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	60
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	69
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	73
Tabel 3.6	Panjang Jalan1 Menurut Kabupaten dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Barat (km), 2024	75
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	77
Tabel 3.8	Target dan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2025	78
Tabel 3.9	Jumlah Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam (kejadian) di Provinsi Sulawesi Barat, 2025	88
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	91
Tabel 3.11	Indeks pembangunan manusia menurut kabupaten Di propinsi sulawesi barat , 2021-2025	92
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	109
Tabel 3.13	Persentase Penduduk Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2024-2025	112
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah	113

Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Investasi Daerah	117
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	120
Tabel 3.18	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024	129
Tabel 3.19	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	130
Tabel 3.20	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	131
Tabel 3.21	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2025	133
Tabel 3.22	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025	134
Tabel 3.23	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025	135
Tabel 3.24	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	137
Tabel 3.25	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	3
Gambar 3.1	Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2025	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di KabupatenMamuju(km),2025	5
Grafik 1.2	Komposisi Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Golongan, dan Jenjang Jabatan di Kabupaten Mamuju, 2025	21
Grafik 1.3	Komposisi Anggota Perwakilan Rakyat menurut Partai dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025	27
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dan 2025	67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan kinerja Kabupaten Mamuju Tahun 2023 telah tertuang didalam laporan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju. Dengan demikian Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang- undang No 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA / A.1 / 4.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2026 tentang Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

B. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi 10 38’ 110’’ - 20 54’ 552’’ Lintang Selatan dan 110 54’ 47’’ – 130 5’ 35’’ Bujur Timur dari Jakarta; (00 0’ 0’’ Jakarta = 1600 48’ 28’’ Bujur Timur Green Wich).

Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara);
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja);
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Mamuju



Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah 4.936,02 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan. Komposisi luas wilayah ini menunjukkan ketimpangan distribusi antar kecamatan yang cukup mencolok. Kecamatan Kalumpang menjadi wilayah terluas dengan luas mencapai 1.580,07 km² atau sekitar sepertiga dari total wilayah Kabupaten Mamuju. Luasnya wilayah Kalumpang ini menggambarkan besarnya potensi sumber daya alam maupun tantangan dalam penyediaan layanan pemerintahan dan infrastruktur.Di sisi lain, Kecamatan Kepulauan Bala Balakang

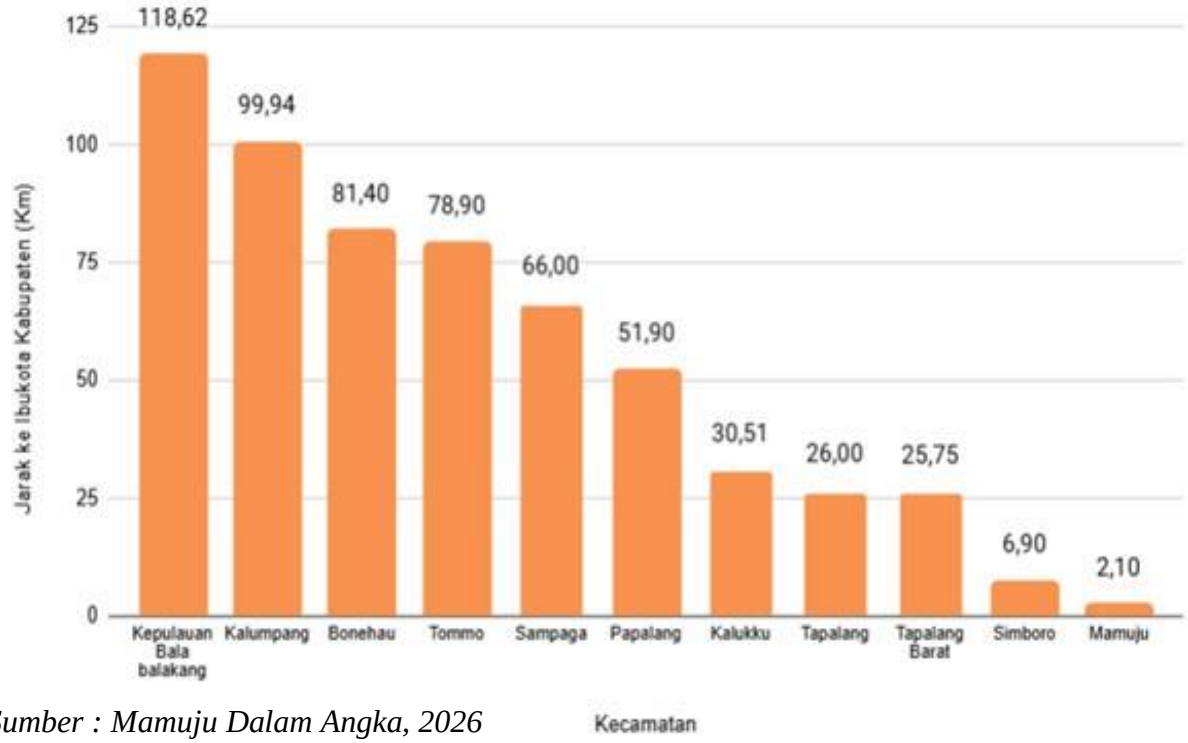
memiliki luas yang sangat kecil, yakni hanya 5,31 km² atau 0,11 persen dari total luas wilayah. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik geografis Kabupaten Mamuju yang beragam, mulai dari wilayah daratan yang luas hingga wilayah kepulauan yang relatif kecil.Dari aspek aksesibilitas, Kepulauan Bala Balakang juga menjadi kecamatan yang paling jauh dari ibu kota kabupaten dengan jarak 118,62 km. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam konektivitas dan pelayanan publik dibandingkan dengan kecamatan lain yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Dengan variasi luas wilayah dan jarak antar kecamatan tersebut, perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Tabel 1. 1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2025

Kecamatan *District*	**IbukotaKecamatan** *CapitalofDistrict*	**Luas*TotalArea*** **(km²/*sq.km*)**
(1)	(2)	(3)
Tapalang	Galung	284,42
TapalangBarat	Dungkait	110,84
Mamuju	Binanga	224,90
Simboro	Rangas	140,11
KepulauanBalabalakang	PulauSalissingan	5,31
Kalukku	Kalukku	460,65
Papalang	Topore	200,69
Sampaga	Bunde	110,96
Tommo	Campaloga	987,90
Kalumpang	Kalumpang	1.580,07
Bonehau	Bonehau	830,17
Kabupaten Mamuju		**4.936,02**

Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

Grafik 1. 1
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di KabupatenMamuju(km),2025



Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1. 2
persentase terhadap luas kabupaten

Kecamatan *District*	Persentase terhadap Luas Kabupaten / Kota *PercentagetoRegency/MunicipalArea*	JumlahPulau *NumberofIslands*
(1)	(4)	(5)
Tapalang	5,76	1
TapalangBarat	2,25	1
Mamuju	4,56	2
Simboro	2,84	1
KepulauanBalabalakang	0,11	14
Kalukku	9,33	1
Papalang	4,07	1
Sampaga	2,25	1
Tommo	20,01	1
Kalumpang	32,01	1
Bonehau	16,82	1
KabupatenMamuju	**100,00**	**16**

Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1.3
Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Mamuju dan Letak Geografi ,2021,2024, dan 2025

Kecamatan *District*	Tepi Laut *Coastal*			Bukan Tepi Laut *Non-Coastal*		
	2021	2024	2025	2021	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tapalang	6	6	6	4	4	4
Tapalang Barat	5	5	5	2	2	2
Mamuju	7	7	7	1	1	1
Simboro	4	4	4	4	4	4
Kepulauan Balabalakang	2	2	2	—	—	—
Kalukku	7	7	7	7	7	7
Papalang	2	2	2	7	7	7
Sampaga	1	1	1	6	6	6
Tommo	—	—	—	14	14	14
Kalumpang	—	—	—	13	13	13
Bonehau	—	—	—	9	9	9
Kabupaten **Mamuju**	34	34	34	67	67	67

Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

2. Iklim

Curah hujan di Kabupaten Mamuju sepanjang tahun 2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi antarbulan sejalan dengan dinamika iklim setempat. Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Tampa Padang, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 473,20 mm, disusul Oktober sebesar 418,10 mm. Sebaliknya, curah hujan terendah tercatat pada bulan November sebesar 74,50 mm dan Februari sebesar 75,50 mm.Jumlah hari hujan berkisar antara 7 hingga 19 hari per bulan, dengan frekuensi tertinggi pada Januari. Variasi ini mencerminkan perbedaan intensitas hujan yang terjadi sepanjang tahun di Kabupaten Mamuju.

Tabel 1.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun BMKG
Majene, 2025

Bulan *Month*	Suhu/*Temperature*(°C)			Kelembaban/*Humidity*(%)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/*January*	9999	29,11	9999	56	82,52	100
Februari/*February*	9999	29,52	9999	53	79,05	100
Maret/*March*	9999	29,28	9999	62	81,87	100
April/*April*	9999	29,98	9999	59	77,91	100
Mei/*May*	22,90	30,39	9999	60	78,32	100
Juni/*June*	23,40	29,50	9999	60	79,64	100
Juli/*July*	9999	29,51	9999	57	79,72	100
Agustus/*August*	9999	29,16	9999	54	81,86	100
September/*September*	9999	29,12	9999	56	81,23	100
Oktober/*October*	9999	28,71	9999	57	81,22	100
November/*November*	9999	29,04	9999	55	79,45	100
Desember/*December*	24,20	28,56	9999	57	81,94	100

lanjutan tabel 1.4

Bulan *Month*	Kecepatan Angin (knot) *Wind Velocity (knot)*			Tekanan Udara/*Atmospheric Pressure (mbar)*		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(8)	(9)	(10)			
Januari/*January*	0.00	4.22	17.00	1004.70	1007.98	1012.10
Februari/*February*	0.00	4.04	12.00	1003.70	1008.96	1013.80
Maret/*March*	0.00	4.20	19.00	1002.20	1008.38	1012.80
April/*April*	0.00	4.14	13.00	1004.50	1008.97	1012.30
Mei/*May*	0.00	4.32	20.00	1004.20	1008.04	1012.70
Juni/*June*	0.00	3.69	13.00	1004.60	1009.19	1013.70
Juli/*July*	0.00	4.01	10.00	1004.80	1008.50	1012.10
Agustus/*August*	0.00	4.07	20.00	1005.20	1009.21	1013.00
September/*September*	0.00	4.22	11.00	1005.30	1009.04	1012.10
Oktober/*October*	0.00	4.36	18.00	1002.70	1008.63	1015.00
November/*November*	0.00	4.33	19.00	1004.10	1008.32	1012.00
Desember/*December*	0.00	4.04	13.00	1003.80	1007.92	1012.10

Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1. 5

Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Mamuju, 2025

Bulan *Month*	Jumlah Curah Hujan **(mm/tahun)** *Number of Precipitation (mm/year)*	Jumlah Hari Hujan **(hari)** *Number of Rainy Days (day)*	Penyinaran Matahari **(jam)** *Duration of Sunshine (hour)*
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/*January*	251.40	19	4.5
Februari/*February*	75.50	9	4.0
Maret/*March*	473.20	17	4.5
April/*April*	144.80	14	6.1
Mei/*May*	173.40	14	6.3
Juni/*June*	203.00	11	4.8
Juli/*July*	238.20	9	6.5
Agustus/*August*	273.30	15	5.9
September/*September*	155.60	16	6.8
Oktober/*October*	418.10	17	6.2
November/*November*	74.50	7	5.5
Desember/*December*	132.10	15	4.7

Sumber : Mamuju Dalam Angka, 2026

3. Kependudukan

Pada tahun 2025, data jumlah penduduk Kabupaten Mamuju bersumber dari catatan administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 292.298 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.Dilihat menurut wilayah, Kecamatan Mamuju merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 67.005 jiwa, diikuti Kecamatan Kalukku sebanyak 61.006 jiwa dan Kecamatan Simboro sebanyak 40.308 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Kepulauan Balabalakang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2.237 jiwa.Kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 59,22 jiwa per km². Kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Mamuju dan Simboro, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, yang mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah antara daerah perkotaan dan wilayah dengan kondisi geografis yang lebih luas.Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Mamuju masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, terutama pada kelompok umur 5–9 tahun, 15–19 tahun, dan 20–24 tahun, yang masing-masing memiliki jumlah penduduk relatif besar. Kondisi ini menunjukkan potensi bonus demografi yang dapat menjadi modal penting dalam pembangunan daerah.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mamuju (jiwa),Tahun 2023, 2024 dan 2025

Kecamatan	Penduduk2023 (jiwa)	Penduduk2024 (jiwa)	Penduduk2025 (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tapalang	21.624	21.901	22.174
Tapalang Barat	11.793	11.938	12.081
Mamuju	67.575	68.572	69.558
Simboro	39.517	40.744	41.997
KepulauanBalaBalakang	2.244	2.259	2.273
Kalukku	62.134	63.184	64.231
Papalang	24.662	24.909	25.151
Sampaga	16.487	16.680	16.870
Tommo	24.606	25.030	25.455
Kalumpang	12.022	12.111	12.196
Bonehau	9.731	9.813	9.893
KabupatenMamuju	292.395	297.141	301.879

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Berdasarkan proyeksi penduudk 2020-2035, Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 292.395 jiwa, kemudian meningkat menjadi 297.141 jiwa pada tahun 2024, dan kembali bertambah menjadi 301.879 jiwa pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya pertumbuhan penduduk yang relatif stabil di Kabupaten Mamuju. Menurut jenis kelamin, berdasarkan data dukcapil pada tahun 2024, jumlah penduduk Mamuju masih didominasi oleh penduduk laki-laki dengan sex ratio sebesar 103,30. Meskipun masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kelahiran, kematian, serta arus migrasi penduduk, khususnya penduduk usia kerja.

Dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Mamuju merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu mencapai 69.558 jiwa pada tahun 2025, diikuti oleh Kecamatan Kalukku sebanyak 64.231 jiwa dan Kecamatan Simboro sebanyak 41.997 jiwa. Ketiga kecamatan tersebut menjadi pusat konsentrasi penduduk di Kabupaten Mamuju. Hal ini dikarenakan Kecamatan Mamuju merupakan ibukota Kabupaten Mamuju, memiliki fasilitas pusat kawasan ekonomi, jarak dari pusat pemerintahan yang dekat serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang aktivitas penduduk.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Mamuju (persen),Tahun 2024 dan 2025

Kecamatan	Laju pertumbuhan penduduk2020-2024	Laju pertumbuhan penduduk2020-2025
(1)	(2)	(3)
Tapalang	5,45	6,76
Tapalang Barat	5,23	6,49
Mamuju	6,25	7,78
Simboro	13,26	16,74
KepulauanBalaBalakang	2,87	3,51
Kalukku	7,16	8,93
Papalang	4,29	5,30
Sampaga	5,00	6,19
Tommo	7,31	9,14
Kalumpang	3,21	3,94
Bonehau	3,63	4,48
KabupatenMamuju	6,85	8,56

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju menunjukkan kecenderungan meningkat. Selama periode 2020–2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 6,85 persen, dan meningkat menjadi 8,56 persen pada periode 2020–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju dalam beberapa tahun terakhir.

Dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Simboro mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 13,26 persen pada periode 2020–2024 dan meningkat menjadi 16,74 persen pada periode 2020–2025. Tingginya laju pertumbuhan di kecamatan ini mengindikasikan perkembangan wilayah yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya aktivitas permukiman dan ekonomi. Tingginya laju pertumbuhan di Kecamatan Simboro dikarenakan oleh beberapa faktor seperti aktivitas ekonomi dan peningkatan akses kesehatan dan pendidikan.

Sebaliknya, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk relatif rendah adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang, meskipun tetap mengalami peningkatan, dari 2,87 persen menjadi 3,51 persen. Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau, yang mencerminkan karakteristik wilayah kepulauan dan pedalaman dengan pertumbuhan penduduk yang lebih lambat.

4. Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Merupakan Modal penting dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju tercatat sebanyak 213.059 orang. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 167.702 orang, terdiri dari 162.041 orang bekerja dan 5.661 orang pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 75,48 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,77 persen, yang menunjukkan kondisi pasar kerja yang relatif kondusif.Dilihat menurut jenis kelamin, angkatan kerja laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebagian besar penduduk bekerja berstatus sebagai karyawan/pegawai serta berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, sementara pekerja keluarga/tidak dibayar juga masih memiliki proporsi yang cukup besar.

Tabel 1. 8
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
dan Jenis Kelamin diMamuju, 2025

Uraian	JenisKelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	86,52	67,45	77,19
Bukan Angkatan Kerja	13,48	32,55	22,81

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Jika dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebesar 86,52 persen penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas tercatat sebagai angkatan kerja, sementara hanya 13,48 persen yang berada di luar angkatan kerja. Tingginya partisipasi laki-laki mencerminkan peran yang dominan dalam aktivitas ekonomi dan pasar kerja. Di sisi lain, partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 67,45 persen, dengan 32,55 persen perempuan masih berada dalam kategori bukan angkatan kerja. Relatif lebih rendahnya partisipasi perempuan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peran domestik, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan kesempatan kerja.

Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 menunjukkan situasi yang cukup baik. Meskipun demikian, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja yang tersedia.

penduduk bekerja juga dapat digolongkan berdasarkan status pekerjaan. Status pekerjaan penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2025 cukup merata antara penduduk yang berprofesi sebagai pengusaha yang dibantu buruh, dan pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu persentase penduduk yang berusaha sendiri ada sekitar 16,75 persen. Akan tetapi, masih ada sekitar 5,50 persen penduduk sebagai pekerja bebas, serta 24,15 persen pekerja tidak dibayar. Besarnya persentase pekerja tidak dibayar tersebut lebih disebabkan oleh karena masih banyak penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga.

Tabel 1.9
Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025

LapanganUsaha	JenisKelamin		Laki-lakidan perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	19,42	13,07	16,75
Berusaha dibantu buruh	34,46	16,24	26,81
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	26,54	27,15	26,80
Pekerja Bebas	7,49	2,76	5,50
Pekerja tidak dibayar	12,10	40,77	24,15
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Perbedaan cukup unik dapat terlihat jika kita bandingkan status pekerjaan menurut jenis kelamin. Laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih memilih berprofesi sebagai entrepeneur (pengusaha), sedangkan perempuan memilih untuk berprofesi sebagai buruh/karyawan/pegawai. Namun, karena keterbatasan kemampuan untuk menjadi pengusaha dan tidak dapat mendapatkan kesempatan pekerjaan menjadi buruh/karyawan/pegawai, lebih banyak perempuan yang akhirnya berprofesi sebagai pekerja tidak dibayar.

Lapangan usaha pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) masih menjadi primadona bagi penduduk Kabupaten Mamuju. Hal ini tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut. Berdasarkan data Sakernas tahun 2025, hampir separuh (46,84 persen) penduduk usia 15 tahun ke atas, bekerja pada lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha selanjutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha perdagangan dengan persentase 42,15 persen. Kemudian lapangan usaha industri pengolahan menjadi lapangan usaha pilihan tempat bekerja sebesar 11,01 persen.

Tabel 1.10
Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025

LapanganUsaha	JenisKelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	52,74	38,69	46,84
Industri Pengolahan	12,58	8,83	11,01
Jasa Perdagangan	34,68	52,48	42,15

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Menurut jenis kelamin, terlihat sangat jelas perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Meski lapangan usaha pertanian masih menjadi yang utama bagi keduanya, namun bagi laki-laki pilihan lapangan usaha selanjutnya adalah lapangan usaha lainnya dimana ciri pekerjaan dalam golongan tersebut adalah pekerjaan yang dominan melibatkan kekuatan otot seperti pertambangan, konstruksi serta transportasi & pergudangan. Di sisi lain, persentase perempuan yang bekerja pada sektor selain pertanian yaitu perdagangan, lebih tingi nilainya dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi perempuan dalam memilih lapangan usaha untuk bekerja didasarkan pada ciri pekerjaan yang banyak melibatkan keterampilan, tidak mengandalkan kekuatan serta mobilitasnya tidak tinggi

C. Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Mamuju masih bercorak agraris dengan tingkat diversifikasi yang terbatas. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian menjadikan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan faktor musiman. Ke depan, penguatan sektor sekunder dan tersier—terutama industri pengolahan, perdagangan, serta jasa bernilai tambah—akan menjadi kunci untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Dari sisi struktur ekonomi (berdasarkan harga berlaku), perekonomian Mamuju masih sangat ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang kontribusinya meningkat signifikan dari 37,67 persen (2021) menjadi 42,14 persen (2025). Kenaikan pangsa ini menunjukkan peran sektor primer yang semakin dominan dalam pembentukan PDRB. Sementara itu, sektor Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan cenderung mengalami penurunan kontribusi, mengindikasikan pergeseran komposisi ekonomi. Sektor Industri Pengolahan memperlihatkan peningkatan bertahap hingga mencapai 4,64 persen pada 2025, yang dapat menjadi sinyal awal penguatan hilirisasi, meskipun skalanya masih relatif kecil.

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat kita lihat dari 3 pilar utama penunjangnya yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah atau wilayah itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Mamuju menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama 2021–2025. Nilainya meningkat dari Rp8.335,01 miliar pada 2021 menjadi Rp9.971,86 miliar pada 2025, atau bertambah sekitar Rp1,64 triliun dalam lima tahun. Kenaikan ini mengindikasikan ekspansi kapasitas ekonomi riil daerah, dengan akselerasi pertumbuhan yang relatif lebih kuat pada periode 2023–2024. Secara makro, hal tersebut mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas produksi di berbagai sektor utama.

Tabel 1. 11
Nilai Indikator Kemiskinan di Kabupaten Mamuju, 2024-2025

Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan (Rp)	356.903	378.196
Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	7,15	6,99
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (poin)	1,12	0,73
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (poin)	0,26	0,13

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mamuju, 2025

Persentase penduduk miskin tahun 2025 di Kabupaten Mamuju adalah 6,99 persen, yang artinya bahwa sekitar 7 dari setiap 100 penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan proporsi penduduk yang belum mampu

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga menjadi gambaran tingkat kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Mamuju. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P1 Mamuju tahun 2025 adalah sebesar 0,73. Nilai P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) Kabupaten Mamuju tahun 2025 sebesar 0,73 berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin tidak jauh berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Mamuju tergolong tidak terlalu dalam, sehingga dengan sedikit peningkatan pendapatan atau bantuan, penduduk miskin berpeluang keluar dari kondisi kemiskinan.

Penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan. Nilai P2 Mamuju tahun 2025 adalah 0,13 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif rendah. Angka ini menggambarkan bahwa kondisi kemiskinan di Mamuju tidak terlalu parah, karena perbedaan tingkat pengeluaran antarpenduduk miskin masih tergolong kecil

Pembangunan Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan positif dan sejalan dengan IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat IPM, maka pembangunan menuju kesejahteraan akan semakin dekat, dan jika kesejahteraan sosial tercapai, IPM suatu daerah akan tinggi.

disebutkan bahwa Pada Indeks Pembangunan Manusia disebutkan pula bahwa Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM Tahun 2025 Kabupaten Mamuju sebesar 72,77.

IPM Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir disebutkan bahwa pada tahun 2022 realisasi IPM sebesar 68,88 %, Tahun 2023 realisasi IPM sebesar 71,07 %, ditahun 2024 realisasi IPM sebesar 71,86 %, hingga tahun 2025 sebesar 72,77 % . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk Kabupaten Mamuju dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak semakin baik dari tahun ke tahun.

D. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Bupati, Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kantor Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kecamatan; dan Kelurahan.

Struktur organisasi Kabupaten Mamuju mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun Organisasi Perangkat Daerah Terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan.

Dengan uraian OPD berdasarkan Tipe sebagai berikut

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Perangkat Daerah Tipe A. terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) asisten.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe B. terdiri atas 3 (tiga) bagian. Dan 3 (tiga) subbagian.
3. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
4. Dinas Daerah terdiri atas :
    a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A;
    b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
    d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
    f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
    g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
    h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
    i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
    j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Dinas Tipe B;
    k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
    l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
    m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
    n. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
    o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
    p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B;
    q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A;
    r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
    s. Dinas Kelautanan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
    t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;

u. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B;
v. Dinas Perkebunan merupakan Dinas Tipe B;
w. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;

2. Badan Daerah terdiri atas :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;
   b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;
   c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe B;
   d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah TipeB;
3. Kecamatan terdiri atas :
   a. Kecamatan Tapalang Barat merupakan kecamatan Tipe A;
   b. Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan Tipe A;
   c. Kecamatan Simboro merupakan kecamatan Tipe A;
   d. Kecamatan Tapalang merupakan kecamatanTipe A;
   e. Kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan Tipe A;
   f. Kecamatan Kalukku merupakan kecamatanTipe A;
   g. Kecamatan Papalang merupakan kecamatanTipe A;
   h. Kecamatan Sampaga merupakan kecamatanTipe A;
   i. Kecamatan Tommo merupakan kecamatan Tipe A;
   j. Kecamatan Kalumpang merupakan kecamatanTipe A;
   k. Kecamatan Bonehau merupakan kecamatanTipe A.

Tabel 1.12
Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6	Dinas Sosial
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perkebunan
12	Dinas Kebudayan dan Pariwisata
13	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
18	Dinas Perdagangan
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22	Dinas Kesehatan
23	Dinas SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
28	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
31	Sekretariat DPRD
32	Sekretariat Daerah
33	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
34	Bagian Hukum
35	Bagian Monitoring dan Evaluasi
36	Bagian Kesejahteraan Rakyat
37	Bagian Administrasi Pembangunan
38	Bagian Organisasi
39	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40	Bagian Tata Pemerintahan
41	Bagian Umum
42	Bagian Kerjasama
43	Bagian Sumberdaya Alam
44	Bagian Perekonomi
45	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
46	Kecamatan Mamuju
47	Kecamatan Simboro
48	Kecamatan Tapalang
49	Kecamatan Tapalang Barat
50	Kecamatan Kalukku
51	Kecamatan Kalukku

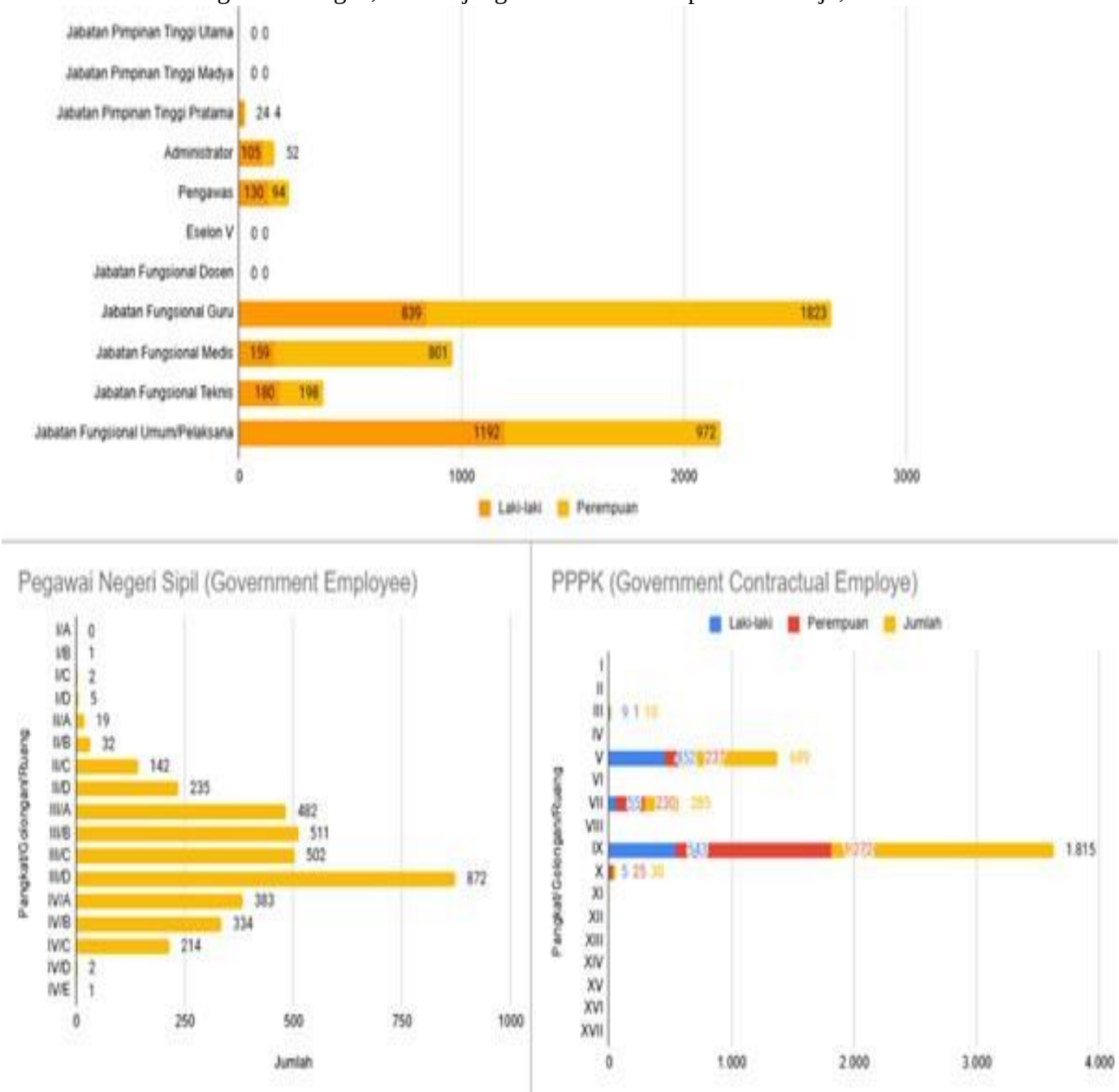
52	Kecamatan Sampaga
53	Kecamatan Tommo
54	Kecamatan Bonehau
55	Kecamatan Kalumpang
56	Kecamatan Bala-Balakang

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju tercatat sebanyak 6.573 orang, yang terdiri atas 3.737 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2.836 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh kekuatan birokrasi daerah didukung oleh skema kepegawaian berbasis kontrak kinerja, yang mencerminkan pola manajemen ASN yang semakin adaptif.

Dari sisi gender, komposisi ASN di Kabupaten Mamuju didominasi oleh perempuan, yakni sekitar 60 persen, sementara laki-laki sekitar 40 persen. Dominasi ini menunjukkan peran perempuan yang semakin kuat dalam birokrasi pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar ASN telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Sebanyak 70,21 persen berpendidikan Diploma IV/S1 ke atas, sementara 9,00 persen berpendidikan Diploma I–III. Proporsi ASN dengan pendidikan dasar dan menengah relatif sangat kecil. Komposisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju cenderung semakin profesional dan kompetitif. Meskipun bersifat dinamis, terdapat kecenderungan peningkatan kualifikasi pendidikan ASN dari waktu ke waktu, yang berpotensi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Grafik 1. 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin,
Tingkat Golongan, dan Jenjang Jabatan di Kabupaten Mamuju, 2025



Sumber: Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1.13
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Jabatan, Jenis ASN,dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2025

Jabatan *Occupation*	Pegawai Negeri Sipil *Government Employee*		
	Laki-laki *Male*	**Perempuan** *Female*	**Jumlah** *Total*
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama *Senior Executives*	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya *Middle Executives*	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *Junior Executives*	24	4	28
Administrator/*Administrator*	105	52	157
Pengawas/*Supervisor*	130	94	224
Eselon V/5^{th} *Echelon*	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen *Certain Functional Position for Lecturer*	—	—	—
Jabatan Fungsional Guru *Certain Functional Position for Teacher*	496	799	1.295
Jabatan Fungsional Medis *Certain Functional Position for Medical Field*	103	546	649
Jabatan Fungsional Teknis *Certain Functional Position for Technical Field*	159	192	351
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana *General Functional Position*	548	485	1.033
Jumlah/*Total*	**1.565**	**2.172**	**3.737**

Sumber: Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1.14
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang),Desember 2025

Pangkat/Golongan/Ruang *Hierarchy*		Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)		(2)	(3)	(4)
	GolonganI/*RangeI*			
1.I/A	(Juru Muda/*JuniorClerk*)	—	—	—
2.I/B	(JuruMudaTingkatI/*FirstClassJuniorClerk*)	1	—	1
3.IC	(Juru/*Clerk*)	2	—	2
4.I/D	(JuruTingkatI/*FirstClassClerk*)	4	1	5
	GolonganII/*RangeII*			
5.II/A	(PengaturMuda/*JuniorSupervisor*)	16	3	19
6.II/B	(PengaturMudaTingkatI/*FirstClassJuniorSupervisor*)	27	5	32
7.II/C	(Pengatur/*Supervisor*)	83	59	142
8.II/D	(PengaturTingkatI/*FirstClassSupervisor*)	108	127	235
	GolonganIII/*RangeIII*			
9.III/A	(PenataMuda/*Junior Superintendent*)	210	272	482
10.III/B	(PenataMudaTingkatI/*FirstClassJuniorSuperintendent*)	174	337	511
11.III/C	(Penata/*Superintendent*)	206	296	502
12.III/D	(PenataTingkatI/*FirstClassSuperintendent*)	333	539	872
	GolonganIV/*RangeIV*			
13.IV/A	(Pembina/*Administrator*)	155	228	383
14.IV/B	(PembinaTingkatI/*FirstClassAdministrator*)	145	189	334
15.IV/C	(PembinaUtamaMuda/*JuniorAdministrator*)	98	116	214
16.IV/D	(PembinaUtamaMadya/*MiddleAdministrator*)	2	—	2
17.IV/E	(PembinaUtama/*SeniorAdministrator*)	1	—	1
Jumlah/*Total*		1.565	2.172	3.737

Sumber: Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2026

Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah menangani beberapa Urusan Pemerintahan berdasarkan Tugas dan fungsi OPD tersebut, adapun Urusan - urusan yang dilaksanakan dipaparkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.15 Urusan Pemerintahan

URUSAN	KETERANGAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	

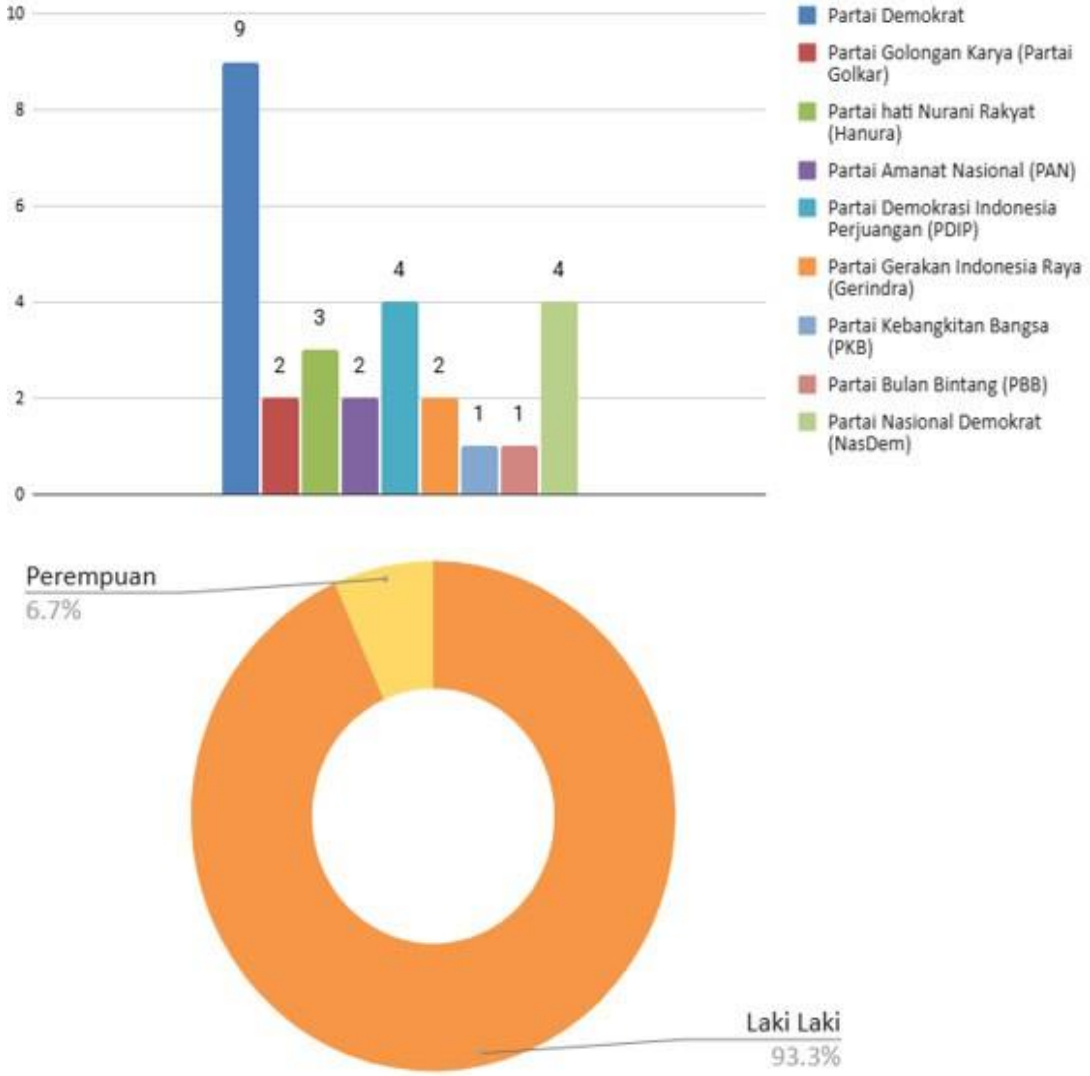
FUNGSI PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
FUNGSI KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
FUNGSI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	SEMUA KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Mamuju tahun 2025 masih didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 28 orang dari total 30 anggota, sementara keterwakilan perempuan tercatat sebanyak 2 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen daerah masih relatif terbatas.

Dilihat dari partai politik, Partai Demokrat menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 9 anggota, termasuk satu perempuan. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) masing-masing memiliki 4 anggota, menjadikannya sebagai kelompok dengan representasi terbesar berikutnya. Partai politik lainnya memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit, berkisar antara 1 hingga 3 anggota.

Grafik 1.3
Komposisi Anggota Perwakilan Rakyat menurut
Partai dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2025



Sumber: Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2026

Tabel 1.16
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju (orang),2025

PartaiPolitik *PoliticalParties*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
PartaiDemokrat	8	1	9
PartaiGolonganKarya(PartaiGolkar)	2	—	2
PartaihatiNuraniRakyat(Hanura)	3	—	3
PartaiAmanatNasional(PAN)	1	1	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)	4	—	4
PartaiGerakanIndonesiaRaya(Gerindra)	2	—	2
PartaiKebangkitanBangsa(PKB)	1	—	1
PartaiBulanBintang(PBB)	1	—	1
PartaiNasionalDemokrat(NasDem)	4	—	4
KabupatenMamuju	**28**	**2**	**30**

Sumber: Kabupaten Mamuju Dalam Angka, 2026

BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021–2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategisyang disusun dan dirumuskan setiaplima tahun(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematismengedepankan isu –isulokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2025 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2025.

Tantangan tahapan priode ini sangat berat untuk memenuhi target RPJPD 2025 setelah Kabupaten Mamuju terdampak covid 19 dan gempa bumi yang melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan. Sangat diperlukan Visi yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar harapan untuk mencapai Mamuju yang maju dan Mandiri dapat dicapai. Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan focus dan perhatian pada peletakan Kembali sendi-sendi pembangunan yang berorientasi pada hasil (*out come*) dengan memanfaatkan semua kekuatan berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peluang letak geografi dan demografi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Tema Visi “Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri”dapatdirumuskanbahwaMamujuMajudanMandirimenjadiarah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi :

" MAMUJU KEREN"

(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD KabupatenMamujutahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005- 2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju "KEREN" (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	MisiRPJMD	TujuanRPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	TargetKinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih**		**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat**	**C**	**CC**	**B**	**B**	**BB**	**A**
			Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	a.	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
				b.	NilaiLPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	c.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	90	90	90	90	90

2	**Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan**	**Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan nPrinsip Pembangunan Berkelanjutan**		**1**	**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**Perse n**	**N/A**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	a.	Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	b.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,14	77,41	77,68	77,95	78,22	78,49
				c.	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	**Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan,**	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**		**1**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Persen**	**68,15%**	**68,35 %**	**68,50 %**	**68,70 %**	**68,85 %**	**69,05 %**

	Kesehatan dan Sosial.		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	a.	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55
				b.	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632
				c.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita RiilYang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah / Orang/ Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000
				d.	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55
				e.	Indeks KesejahteraanSosial	Persen	50	55	60	65	70	75

4	**Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal**	**Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yangkondusif dan terpelihara**		**1**	**Indeks ketentra mandan ketertiba n**	**Persen**	**N/A**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			Meningkatny a ketentraman dan ketertiban umum	a.	Indeks Kriminilitas	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	**Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal**	**Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi**		**1**	**Indeks Gini**	**Persen**	**0,36**	**0,32**	**0,28**	**0,25**	**0,20**	**0,19**
			Meningkat nya pertumbu han sektor-sektor unggulan daerah	a.	Pertumbu han ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%

			Meningkatnya investasi daerah	b.	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	15	15	15	15
		Mengentaskan Kemiskinan		**2**	**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**7,4**	**6**	**5,5**	**5**	**4,5**	**4**
			Meningkatnya Penyerapan TenagaKerja	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00
			Meningkatnya kemandirian desa	b.	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berkembang)	0,624 (Berkembang)	0,645 (Berkembang)	0,687 (Berkembang)	0,700 (Berkembang)	0,707 (Maju)

4. Strategi dan Arah Kebijakan

   Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

   Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Strategi

   Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

   Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1.	Mewujudkan TataKelola Pemerintaha n yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja Keuangan dan Pengawasan	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi melalui perbaikan proses danpelayanan perijinan dengan menerapkan system aplikasi berbasi online
				Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuatankapabilitas APIP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan implementasi single data dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi melaluiKartu Mamuju Keren
				Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalammeningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
2.	Meningkatka n Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
				Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan

	berkelanjutan	yang Berkeadilan dan		Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi, sertapengalihan status jalan
		Memperhatika n Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan
				Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melaluiperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
				meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tutupan lahan dan udara
				Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan,pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah
				Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana

3.	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan; b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putussekolah; c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah; d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SMP melalui Gerakan Kembali Bersekolah
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif mapun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
				Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana
				Adanya Regulasi atau kebijakan terkait permasalahan ketimpangan gender
				Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melaluipembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.
				Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
				Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.

				Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak
				Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

4.	Mewujudkan daerah	Meningkatkan kedisiplinan,	Meningkatny a	Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untukmengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
	yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.	ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragamayang kondusif dan terpelihara	ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.
5.	Mewujudkan dayasaing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian
				Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
				Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yangbaik, dan penyediaan sarana produksi perikanan
				Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensidaerah
				Memfokuskan penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diKabupaten Mamuju

				Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi sertapeningkatan destinasi wisata baru
				Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan
				pembangunan museum.
			Meningkatn ya investasi daerah	Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
		Pengenta san Kemiskin an	Meningkatnya Penyerapan TenagaKerja	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
				Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengankebutuhan pasar kerja
			Meningkatny a kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomiproduktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa

B. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel II.3
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
KEREN I Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi	KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan	KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2024 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Transisi Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: "Memantapkan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Mamuju yang berketahanan Sosial"

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

a. Penurunan Kemiskinan
b. Daya saing ekonomi lokal
c. Penurunan ketimpangan wilayah

2) Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: "KEREN I : Penguatan birokrasipenopang utama pemulihan ekonomi"

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

a. Implementasi single data didukung teknologi informasi terintegrasi
b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
c. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
d. Peningkatan PAD dengan membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
e. Peningkatan kapasitas SDM UMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
f. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata.

3) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: "KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan"

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

a. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi berbasis potensi daerah
b. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)

4) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: "KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan"

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
b. Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas
c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
d. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

5) Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: "KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
b. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
c. Penguatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
d. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saingdan pengurangan kemiskinan.

6) Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: "Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju".

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

a. Pemantapan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dan menjagakondusifitas wilayah.
b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumber daya local.
c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing danberkarakter
d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif,bersih dan akuntabel)
e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel II. 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026

No	Indikator KinerjaDaerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/ 2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	%	68,15	68,35	68,50	68,70	68,85	69,05	69,05
2.	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55	0,55
3.	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632	0,632
4.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	Ribu Rupiah/ Orang /Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000	52.000

5.	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	%	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	60,55
6.	Indeks Kesejahteraan Sosial	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial +30% Persentase PSKS yang aktif	%	50	55	60	65	70	75	75

	Indeks Pembangunan Infrastruktur	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40 % (50% kualitas saluran pengairan + 50%drainase kondisi baik)} + (10 % Pemenuhan bangunansesuai standar)] + [20%{50% pengurangansampah + 50 % pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampungtangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+30% edukasi	%	N/A	50	60	70	80	90	90

		proteksi kebakaran+40 % response time })/2]								

	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Survey kepuasan layanan infranstruktur : 1. Ketersediaan Fisik(*availability*) 2. Kualitas Fisik (*quality*) 3. Kesesuaian (*Appropriateness*) 4. Efektifitas Pemanfaatan (*Utility*) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (*Job Creation*) 6. Kontribusi padaPerekonomian	%	N/A	50	60	70	80	90	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30%IKU + 30% IKA + 40% ITV	%	N/A	80	80	80	80,5	80,6	80,6
	Indeks Resiko Bencana	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kasus tertangani tahun n-1 dibagi jumlah kasus tahun ndikali 100	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kriminilitas	$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi} \ (F_{Ci-1} + Y_{Ci})$	%	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19	0,19
	Pertumbuhan Ekonomi	R(t-1, t) = (PDBt – PDBt-1)/PDBt-1 x 100%	%	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%	5.8-6.0%

	Pertumbuhan Investasi	$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}}\right)^{\left(\frac{1}{\text{\# of years}}\right)} - 1$	%	15	15	15	15	15	15	15
	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagiJumlah Penduduk dikali 100	%	7,4	6	5,5	5	4,5	4	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{jumlah\ pengangguran}{jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$	%	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00	2,00
	Indeks Desa Membangun	IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)	Skala	0,683	0,690	0,695	0,698	0,700	0,707	0,707
	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandirireformasi birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	A
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + pengalokasian anggaran belanja dalam APBD +	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

		Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan daerah + Opini BPK								
	Nilai LPPD	Hasil Penilaian LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Skor	80	90	90	90	90	90	90

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

1. Tujuan Perjanjian Kinerja

   Tujuan Perjanjian kinerja, terbagi atas tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diantaranya meliputi :

   a) Intensifikasi pencegahan korupsi

   b) Peningkatan kualitas pelayanan publik

   c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

   Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

   a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

   b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah (mandat);

   c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

   d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

   e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

SASARAN 1 **Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan**		
INDIKATOR	**SATUAN**	**TARGET TAHUN 2025**
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB
Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	Baik
Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
SASARAN 2 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**		
INDIKATOR	**SATUAN**	**TARGET TAHUN 2025**
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
SASARAN 3 **Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah**		
INDIKATOR	**SATUAN**	**TARGET TAHUN 2025**
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	80
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	80
SASARAN 4 **Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup**		
INDIKATOR	**SATUAN**	**TARGET TAHUN 2025**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	78,22
Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang
SASARAN 5 **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**		
INDIKATOR	**SATUAN**	**TARGET TAHUN 2025**
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,85
Indeks Pendidikan	Skala	0,64
Indeks Kesehatan	Skala	0,802

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	44.000
Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,12
Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	77

SASARAN 6
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
Indeks Kriminilitas	Persen	100

SASARAN 7
Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Indeks Gini	Persen	0,20
Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.7- 5.8%

SASARAN 8
Meningkatnya investasi daerah

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Pertumbuhan Investasi	Persen	15

SASARAN 9
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,05

SASARAN 10
Meningkatnya kemandirian desa

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
Indeks Desa Membangun	Skala	0,700 (Berkembang)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat Mamuju melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mamuju.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2022-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja InstansiPemerintah

SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI		
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021– 2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 16 (enam belas) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.
Mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021– 2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 1 tujuan,2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
3. Misi III terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 6 indikator kinerja;
4. Misi IV terdapat 1 tujuan,1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

Tabel III.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	**Misi1**	**1**	**2**	**4**	**BS=0, B=4, C=1, K=1**
2	**Misi2**	**1**	**2**	**4**	**BS=1, B =3, C=0, K=0**
3	**Misi3**	**1**	**1**	**6**	**BS=3, B=2, C= 0, K=1**
4	**Misi4**	**1**	**1**	**2**	**BS=0, B =2, C=0, K=0**
5	**Misi5**	**2**	**4**	**6**	**BS=0, B =1, C=1, K=4**
	JUMLAH	***6***	***1 0***	***22***	**BS=4, B=12, C=1, K=5**

Dari 10 (Sepuluh) sasaran dengan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah:

Tabel III.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	4	100
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	**4**	**100**
Misi II (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	25
2	Baik	3	75
3	Cukup	0	0

4	Kurang	0	0
	Jumlah	**4**	**100**
Misi III (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	3	50
2	Baik	2	33,4
3	Cukup	0	0
4	Kurang	1	16,6
	Jumlah	**6**	**100**
Misi IV (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	2	100
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	**2**	**100**
Misi V (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	1	16,6
3	Cukup	1	16,6
4	Kurang	4	66,8
	Jumlah	**6**	**100**

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 18,18 persen bermakna Baik Sekali, 12 indikator sasaran atau 54,54 persen bermakna Baik, 1 indikator sasaran atau 4,54 persen bermakna Cukup, 5 indikator sasaran atau 22,72 persen bermakna kurang.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III - 4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	100
2	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	B	100
3	Nilai LPPD	Skor	Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	79,29
Rata-rata capaian						**91,76**

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin baik pula efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan public yang diberikan kepada Masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijabarkan dalam Rencana aksi RB Tematik dan Rencana Aksi RB General, yang sasaran, indikator dan targetnya telah diselaraskan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Penetapan Indikator Penilaian RB Generalyang terdiri atas 24 kegiatan utama dan 6 tema Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2025 yang diarahkan untuk menjawab berbagai rekomendasi hasil evaluasi serta permasalahan strategis yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu sebagai berikut :

Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3		
Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	96	6,72
Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	3	4	2,4
Tingkat Maturitas SPIP	4	3,18	2,54

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3,5	0,5	0,5
Nilai SAKIP	4	63,26	2,53
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	0	0
Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	46,88	1,17
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	3	1,5
Indeks Kualitas Kebijakan	2,5		
Indeks Reformasi Hukum	2,5	96,6	2,42
Indeks Pembangunan Statistik	2,5	1,94	0,97
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	77,01	1,95
Indeks Sistem Merit	4	158	1,54
Indeks Pelayanan Publik	2	2,74	1,1
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	84,4	1,69
Indeks SPBE	9	2,63	4,73
Opini BPK	5	3	5
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	66,59	2,66
Indeks BerAkhlak	4	57,25	2,29
Survei Penilaian Integritas	10	72,45	7,25
Survei Kepuasan Masyarakat	8	83,74	6,7
Capaian IKU Makro	4	86,58	3,46
Capaian IKU Non Makro	6	85,71	3,25
Rencana Aksi RB Tematik			
Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1		
Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1		
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,68	0,68
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0,62	0,62
Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0,86	0,86
Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,66	1,66
Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1	1
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,86	0,86
Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,23	2,23
Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3		
Percepatan Hilirisasi	0,01		
Ketahanan Pangan	0,01		
Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	0,01		
Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	0,01		

Indeks Reformasi Birokrasi telah mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Pada tahuun 2025 realisasi Indeks Reformasi Birokrasi beradapada Predikat **BB**, dengan persentase capaian **100%.** Capaian ini sama denganTahun 2024 yang juga memperoleh predikat **BB,** sedangkan pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi masih pada Predikat **CC.**

Dalam penilaian Indikator Reformasi Birokrasi General terdapat 22 indikator yang telah memperoleh skor. Beberapa diantaranya mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya, antara lain :

1. Tingkat Maturitas SPIP yang naik 0,03 dengan skor indeks 3,18,
2. Nilai Sakip yang naik 0,29 menjadi 63,26, dan
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang naik dari 68,81 di tahun 2024 menjadi 77,01 di tahun 2025.

Namun demikian masih terdapat 2 (dua) indokator yang belum memperoleh skor, yaitu

1. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, dan
2. Indeks Kualitas Kebijakan.

hal ini karena pemerintah daerah belum menyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar nasional serta belum mengikuti pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

Sementara itu. pada Indikator penilaian Reformasi tematik seperti percepatan hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan dan Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan tidak memperoleh nilai karena Kemenpan RB hanya menilai 5 tema tahun sebelumnya yakni

1. Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting
2. Penggunaan produk dalam negeri
3. Pengendalian Inflasi
4. Pengentasan Kemiskinan, dan
5. Realisasi Investasi.

Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini diharapkan mampu mengakselarasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional serta meningkatan daya saing daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya pengelolaan Reformasi Birokrasi baik ditingkat nasional maupun instansional daerah masih belum sepenuhnya memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh Masyarakat, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan public dan pengurangan praktik KKN. Selain itu perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih cenderung dilakukan secara parsial Instansi Pemerintah sehingga belum sepenuhnya berfokus pada isu strategis nasional maupun prioritas Pembangunan daerah.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Mamuju pada sisi perencanaan diperlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi

Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh Masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa dimensi penilaian yang mencerminkan aspek perencanaan, penganggaran, transparansi, pelaksanaan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indeks ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2025 menetapkan target IPKD dalam kategori Baik. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi yang diperoleh Cukup Baik dengan total nilai 67,502 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 84,38 Persen dari target yang telah ditetapkan.

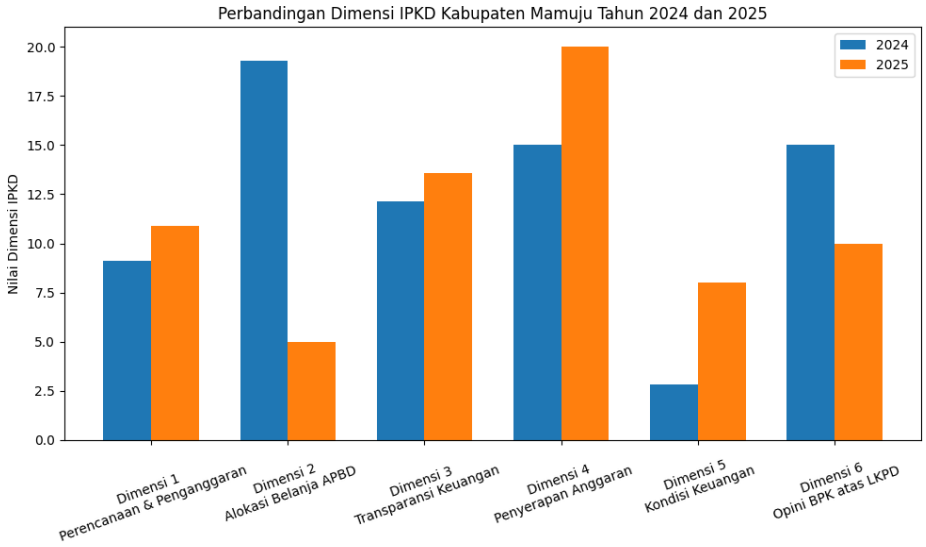
Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian IPKD pada Tahun 2025 Kabupaten Mamuju memperoleh nilai sebesar 67,502 dengan kategori Cukup Baik dan nilai B. Sementara pada Tahun 2024, nilai IPKD Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 73,415 dengan kategori Perlu Perbaikan dan nilai B. Adapun pada Tahun 2023, Kabupaten Mamuju memperoleh nilai IPKD sebesar 57,696 dengan kategori Sangat Perlu Perbaikan dan nilai C. Apabila dilihat dari perkembangan capaian tersebut, secara umum terdapat tren peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam tiga tahun terakhir, dimana nilai IPKD Kabupaten Mamuju meningkat dari 57,696 pada Tahun 2023 menjadi 73,415 pada Tahun 2024, kemudian berada pada nilai 67,502 pada Tahun 2025. Meskipun pada Tahun 2025 terjadi penurunan nilai indeks dibandingkan Tahun 2024, namun secara keseluruhan capaian IPKD Kabupaten Mamuju masih berada pada kategori nilai B, yang menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah relatif tetap terjaga dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila ditinjau dari capaian pada masing-masing dimensi penilaian, terdapat beberapa dimensi yang mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) meningkat dari 9,128 pada Tahun 2024 menjadi 10,908 pada Tahun 2025. Demikian pula Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang meningkat dari 12,155 menjadi 13,593, serta Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) yang meningkat dari 15 pada Tahun 2024 menjadi 20 pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada proses perencanaan, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, terdapat beberapa dimensi yang mengalami perubahan nilai, antara lain Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD) yang pada Tahun 2024 memperoleh nilai 19,31 dan pada Tahun 2025 menjadi 5, serta Dimensi 6 (Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD) yang menurun dari 15 pada Tahun 2024 menjadi 10 pada Tahun 2025. Selain itu Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah) pada Tahun 2025 memperoleh nilai 8 dibandingkan 2,821 pada Tahun 2024. Perubahan nilai pada beberapa dimensi tersebut turut mempengaruhi nilai total indeks IPKD Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025.

Untuk memberikan gambaran perbandingan capaian pada masing-masing dimensi IPKD, berikut disajikan grafik perbandingan nilai dimensi IPKD Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Grafik III.1
Perbandingan Capaian Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dan 2025



Perubahan nilai pada masing-masing dimensi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kinerja pengelolaan keuangan daerah, mengingat pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian metode pengukuran dan indikator penilaian pada dimensi-dimensi IPKD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian tersebut berdampak pada distribusi nilai pada setiap dimensi sehingga perbandingan capaian antar tahun perlu mempertimbangkan adanya perubahan metodologi penilaian tersebut.

Berikut penjelasan terkait perubahan dimensi pengukuran :

1. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), tidak terdapat perubahan dalam metode pengukuran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian pada dimensi ini tetap difokuskan pada keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen penganggaran daerah sehingga memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran dalam APBD.

2. Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD) terdapat beberapa perubahan indikator penilaian. Salah satu perubahan utama adalah penghapusan indikator Mandatory Spending kesehatan yang sebelumnya menjadi bagian dari penilaian. Indikator tersebut kemudian digantikan dengan indikator Mandatory Spending Belanja Pegawai, dengan ketentuan bahwa belanja pegawai daerah paling tinggi sebesar 30 persen dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, terdapat penyesuaian kriteria penilaian untuk alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang ditetapkan paling rendah sebesar 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Perubahan juga terjadi pada indikator Belanja Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dinilai berdasarkan keterpenuhan alokasi anggaran SPM dibandingkan kebutuhan minimal serta ketercapaian output dibandingkan dengan target output yang telah ditetapkan.
3. Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) juga dilakukan penyesuaian terhadap dokumen keuangan yang wajib dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah. Jika sebelumnya terdapat 29 dokumen yang harus dipublikasikan, pada Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) jumlah dokumen tersebut disederhanakan menjadi 16 dokumen, dan pada Tahun Anggaran 2025 (Tahun Ukur 2026) menjadi 19 dokumen. Dokumen tersebut mencakup antara lain RPJMD, RKPD, RENJA Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD, DPA SKPD, LKPD, LAKIP, opini BPK, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penilaian pada dimensi ini juga mempertimbangkan ketepatan waktu pengungkapan dokumen serta keteraksesan dokumen oleh publik melalui website resmi pemerintah daerah.
4. Selanjutnya pada Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) terdapat perubahan indikator penilaian dengan penghapusan indikator Belanja Tidak Terduga. Dengan demikian, indikator penilaian pada dimensi ini berubah dari empat indikator menjadi tiga indikator, yaitu penyerapan belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer, dengan ketentuan minimal tingkat penyerapan masing-masing sebesar 80 persen dari pagu anggaran.
5. Perubahan juga terjadi pada Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah). Pada dimensi ini salah satu indikator yaitu Solvabilitas Layanan dihapus, sehingga jumlah indikator berkurang dari enam indikator menjadi lima indikator. Selain itu, terdapat perubahan pada rumus penghitungan fleksibilitas keuangan daerah serta penyesuaian jenis data yang harus diinput oleh pemerintah daerah dalam sistem penilaian IPKD. Metode penilaian juga mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan sistem komparasi antar daerah dalam satu kategori kemampuan keuangan, menjadi sistem penilaian berbasis skor yang ditentukan berdasarkan hasil

penghitungan indikator seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas jangka panjang. Adapun bobot penilaian untuk dimensi ini ditetapkan sebesar 20 dari total indeks berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar 15.

6. Sementara itu pada Dimensi 6 (Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD) tidak terdapat perubahan pada metode penilaian, namun bobot nilai dimensi ini ditetapkan sebesar 10 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 15.

Apabila dibandingkan dengan capaian daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2025, capaian IPKD Kabupaten Mamuju masih berada pada kelompok daerah dengan kemampuan keuangan daerah "Sedang". Kabupaten Mamuju Tengah memperoleh nilai indeks sebesar 72,696 dengan kategori Cukup Baik dan nilai B, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Mamuju. Sementara itu Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai indeks sebesar 63,34 dengan kategori Kurang Baik dan nilai C, yang berada di bawah capaian Kabupaten Mamuju. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa secara regional Kabupaten Mamuju masih berada pada posisi yang cukup kompetitif dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai kategori kinerja yang lebih tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diarahkan pada penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi

pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penatausahaan keuangan daerah. Penguatan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui penguatan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga terus melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui peningkatan pelayanan transaksi non tunai pada seluruh perangkat daerah serta pemberian pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pengelolaan aset daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju juga telah merumuskan beberapa langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah.

Melalui berbagai kebijakan dan langkah perbaikan tersebut, diharapkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju dapat terus meningkat sehingga capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada periode penilaian berikutnya dapat lebih optimal dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan instrumen evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan berbagai aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif.

Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD disusun berdasarkan sejumlah indikator yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain meliputi aspek kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, kualitas pelayanan publik, serta tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi LPPD Tahun 2024, Kabupaten Mamuju memperoleh nilai sebesar 3,1697 dengan kategori Sedang. Sementara itu, untuk capaian nilai LPPD Tahun 2025, hingga saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan, hasil evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait nilai LPPD Tahun

2025 belum diterbitkan, sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat disajikan secara resmi dalam laporan ini. Meskipun demikian, dengan memperhatikan tren kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relatif stabil, capaian LPPD Tahun 2025 diasumsikan masih berada pada kategori sedang, meskipun target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju adalah kategori sangat tinggi, sehingga masih diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan capaian daerah lain di Provinsi Sulawesi Barat, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju menunjukkan posisi yang relatif lebih baik. Provinsi Sulawesi Barat memperoleh nilai 1,3978 dengan kategori sangat rendah, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah memperoleh nilai 2,2411 dengan kategori rendah. Sementara itu Kabupaten Majene memperoleh nilai 3,1324 dengan kategori sedang, yang relatif sebanding dengan capaian Kabupaten Mamuju. Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara regional Kabupaten Mamuju berada pada kelompok daerah dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kategori sedang, namun masih memiliki ruang perbaikan untuk mencapai kategori kinerja yang lebih tinggi sesuai dengan target pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan capaian evaluasi LPPD, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan melalui peran Sekretariat Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah juga terus dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mamuju juga meningkatkan fasilitasi perumusan kebijakan daerah di berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi Sekretariat Daerah dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan serta melakukan pembinaan administrasi pemerintahan daerah. Berbagai kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kebijakan yang belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap peningkatan capaian LPPD. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas perumusan kebijakan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, masih diperlukan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat lebih terarah serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan sejumlah langkah tindak lanjut untuk meningkatkan capaian LPPD pada periode evaluasi berikutnya. Upaya yang akan dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah secara lebih terintegrasi, peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja dan dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju dapat terus meningkat sehingga capaian evaluasi LPPD pada periode berikutnya dapat mencapai kategori yang lebih tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel III - 5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	76,74	90	73,10	81,22
Rata-rata capaian						**81,22**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Pengukuran ini penting karena dapat memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana pelayanan memenuhi harapan penerima manfaat, baik pada sektor kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik, maupun pada layanan perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

IKM bukan sekadar angka, melainkan cermin kualitas pelayanan publik maupun program yang dijalankan oleh lembaga pemerintah. Dengan metodologi yang tepat dan penerapan yang konsisten, IKM dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, memperbaiki kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan sosial.

selain itu juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah.

Pada sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ini disebutkan realisasi pada tahun 2025 adalah 73,10 %, dengan persentase capaian sebesar **81,22 %.** Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya sebesar 76,74 atau dengan persentase capaian sebesar **85,26** hal ini terdapat Penurunan capaian yang tidak terlalu signifikan namun tetap menjadi suatu acuan bagi pemerintah Kabupaten Mamuju untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

diuraikan bahwa Ringkasan temuan kunci :

1. Bias Responden (Kepuasan ASN, Bukan Publik Umum)

   Data Pendukung : Sekitar 70% responden adalah Aparatus Sipil Negara (ASN)/PNS dan menyatakan diri sebagai ASN di Lingkup Pemkab Mamuju.

   Impilikasi : Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) yang dihasilkan pada dasarnya adalah cerminan kepuasan internal (ASN), bukan seluruh masyaarakat umum. Penilaian yang positif mungkin didorong oleh faktor keharusan penggunaan atau akses informasi yang lebih mudah.

2. Tingkat Kinerja : Baik, namun terjebak di “Plafon”

   Data Pendukung: IKM Umum (73,10) dan IKM perlayanan (antara 71.85-74.60) semuanya berada dalam kategori baik.

   Implikasi : Pelayanan sudah mencapai standar yang baik, tetapi belum ada layanan yang menembus batas ke kategori Sangat Baik (IKM >= 81,26). Ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai keunggulan (excellence).

3. Kanal Paling Efektif dan Layanan Unggulan

   Data Pendukung :

   - Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE)-khusus ASN memiliki IKM tertinggi (79,1)
   - Informasi melalui Media Sosial Resmi memiliki IKM tertinggi kedua (77,1) dan merupakan layanan yang paling banyak diketahui/digunakan.

Implikasi : Layanan yang fokus pada digitalisasi ASN (TTE) dan komunikasi yang massif (Media Sosial) adalah brancmaking terbaik dalam internal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

4. Area dengan Potensi Peningkatan Tertinggi

   Data Pendukung : Layanan Pembuatan Sub Domain Resmi (.go.id/.desa.id) memiliki IKM terendah (56,9)

   Implikasi : Layanan teknis ini adalah bottleneck kinerja yang paling jelas dan memerlukan perhatian khusus untuk mendongkrak nilai IKM keseluruhan.

5. Kelompok Netral yang Perlu Didorong (Switchers)

   Data Pendukung : Hampir setengah responden memilih kategori netral/cukup puas pada pertanyaan kepuasan umum

   Implikasi : Kelompok ini adalah target paling strategis untuk didorong ke kategori "puas" atau "sangat puas" melalui perbaikan kecil namun berdampak tinggi (*quick wins*).

Evaluasi Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama.

dapat kita simpulkan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, serta mengevaluasi pelayanan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju **73,10** dengan mutu pelayanan **B** atau mutu kinerja **Baik.**
- Unsur-unsur pelayanan yang bemutu **Baik** adalah semua dari ketujuh unsur pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, yaitu Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Informasi Media Sosial, Layanan Informasi Keliling, Melakukan Kerja Sama Media, Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Layanan SP4N-LAPOR dan Layanan Pembuatan Sub Domain.

dilihat dari trend yang ada terkait Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat ditiap tahun yang cukup signifikan, dengan hasil capaian pada tahun 2022 sebesar 78,75 % sampai dengan tahun 2025 sebesar 73,10 % Dari hasil data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurunnya angka indeks Kepuasan

masyarakat menandakan bahwa lemahnya pelayanan Pemerintah di daerah kabupaten mamuju.

Berdasarkan hasil analisis kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Persandian Kabupaten Mamuju, beberapa Rekomendasi yang didapatkan:

1. Diversifikasi Data untuk IKM Publik Sejati

   Tujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat non ASN secara hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tindakan, yaitu

   a. Melakukan desain ulang Survei, secara eksplisit targetkan dan responden dari unsur Non ASN (misalnya, Swasta, Pelajar/Mahasiswa, Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga) dalam jumlah yang signifikan minimal 50% dari total responden.
   b. Saluran Distribusi, gunakan saluran media sosial dan kerja media yang terbukti efektif untuk menyebar survei ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

2. Prioritaskan Perbaikan pada Layanan Terendah

   Tujuan untuk mengangkat IKM layanan Pembuatan Sub Domain Resmi dan menghilangkan bottleneck kinerja. Adapun tindakan yang dapat dilakukan :

   a. Audit Proses : Lakukan kajian mendalam (kualitatif) terhadap alur layanan Sub Domain Resmi, Identifikasi apakah skor rendah disebebabkan oleh kompleksitas prosedur, durasi layanan, atau kurangnya panduan/dukungan teknis.
   b. Digitalisasi Panduan : Buat panduan teknis yang sangat jelas (video tutorial/FAQ) dan mudah diakses untuk layanan Sub Domain.
   c. Target IKM : Tetapkan target untuk menaikkan IKM, layanan ini minimal 3 poin.

3. Memanfaatkan Media Sosial dan TTE

   Tujuan menerapkan prinsip-prinsip layanan terbaik ke layanan lain. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan tindakan sebagain berikut :

   a. Reaplikasi Akses : analisis mengapa layanan Media Sosial dan TTE dinilai tinggi. Apakah kemudahan akses dan kejelasan informasi ? Terapkan prinsip kemudahan akses (misalnya ketersediaan informasi layanan) pada layana lain terutama PPID dan SP4N LAPOR.
   b. Kanal Komunikasi : Jadikan Media Sosial (yang terbukti efektif) sebagai kanal utama untuk mempromosikan, menjelaskan, dan menyediakan tautan langsung ke layanan yang kurang diketahui, seperti Pembuatan Sub Domain Resmi dan Informasi Keliling.

4. Strategi “Quick Wins” untuk Mencapai Kategori Sangat Baik

   Tujuan mendorong kelompok responden Netral menjadi Puas/Sangat Puas dan Menembus IKM >= 81.26. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

   a. Fokus pada Kecepatan : Perbaiki Indikator yang paling sensitif terhadap kepuasan, seperti

Kecepatan Tanggapan dan akurasi/kejelasan informasi yang diberikan. Peningkatan 10% pada kecepatan tanggapan biasanya berdampak signifikan pada skor IKM.

Standarisasi Layanan : Tetapkan dan komunikasikan Service Level Agreement (SLA) untuk semua layanan (misalnya, “Tanggapan dalam 1x24 jam”) dan pastikan staf memenuhinya secara konsisten. Konsistensi akan meningkatkan kepercayaan dan mengubah persepsi “Netral” menjadi “Puas”.

Tabel III - 6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	**78**	80	79	**98,75**
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	**82**	80	76	**95**
Rata-rata capaian						**96,87**

Infrastruktur atau dikenal dengan istilah prasaran dapat diartikan sebagai sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. secara garis besar, infrastruktur di kelompokkandalam beberapa bagian yaitu :

1. kelompok jalan, yang meliputi jalan, jalan raya dan jembatan
2. kelompok pelayanan transportasi yang meliputi transit, jalan rel, pelabuhan dan bandar udara
3. kelompok air yang meliputi air bersih, air kotor dan semua sistem air termasuk jalan air
4. kelompok manajemen limbah seperti sistem manajemen limbah padat
5. kelompok bangunan dan fasilitas olah raga
6. kelompok produksi dan distribusi energi meliputi listrik dan gas.

selain itu juga indeks infrastruktur dapat pula diartikan sebagai indikator atau alat ukur yang mempersentasekan tingkat kemajuan dan persebaran pemerataan pembangunan infrastruktur antar pemerintah daerah di seluruh wilayah indonesia

Pada 2025 untuk Sasaran Strategis 5 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah, pada indikator pertama yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur. Kabupaten Mamuju lebih fokus pada Infrastruktur Jalan, Jembatan, Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan, juga Fasilitas Infrastruktur. dimana tujuan tersebut untuk memprioritaskan peningkatan konektivitas antar

wilayah, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dengan realisasi Indikator sebesar 79 persen dari target 80 persen atau disimpulkan capaian kinerja sebesar 98,75 persen.

Bila Dibandingkan pada Tahun sebelumnya Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mamuju mengalami penurunan yang dimana hal tersebut dapat terlihat pada capaian realisasi pada tahun 2024 sebesar 78 persen dari target 70 persen, menurun pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 79 persen dari target sebesar 80 persen. hal ini disebabkan Perencanaan program infrastruktur di kawasan terpencil sering kali tidak berbasis data yang akurat dan tidak melibatkan masyarakat setempat. Akibatnya, proyek yang dijalankan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam perspektif pembangunan administrasi, hal ini menunjukkan lemahnya fungsi policy formulation dan development planning system. Birokrasi daerah di kawasan terpencil sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi. Aparat lokal kurang memahami mekanisme penganggaran, pengadaan, dan pelaporan proyek infrastruktur. Dalam konteks pembangunan administrasi, hal ini menggambarkan lemahnya administrative professionalism dan capacity development.serta Masalah anggaran juga menjadi kendala signifikan. Dana pembangunan sering tidak mencukupi atau pencairannya terlambat, terutama di daerah dengan akses transportasi terbatas. Proses pengadaan (procurement) yang berbelit-belit dan kurang transparan turut memperburuk kondisi.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Melalui Laporan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyajikan hasil pengukuran tingkat kepuasan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur berdasarkan survei persepsi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan yang objektif dan berbasis data. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai layanan infrastruktur Kabupaten Mamuju berada pada kategori baik dan mampu mendukung aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.

Tabel III - 6
Panjang Jalan1 Menurut Kabupaten dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Barat (km), 2024

Kabupaten *Regency*	Kondisi Jalan *Road Conditions*				
	Baik *Good*	**Sedang** *Average*	Rusak *Damaged*	Rusak Berat *Severely Damaged*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	142,62	121,19	72,25	289,15	625,21
Polewali Mandar	359,86	123,64	195,75	243,01	922,26
Mamasa	105,10	34,38	10,45	275,97	425,90
Mamuju	167,87	42,58	10,13	305,59	526,17
Pasangkayu	231,38	31,49	7,07	1.140,17	1.410,11
Mamuju Tengah	84,56	23,99	4,32	329,31	442,18
Sulawesi Barat	1.091,39	377,27	299,97	2.583,20	4.351,83

Sumber Data: Sulawesi Barat Dalam Angka , 2026

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan publik di Sulawesi Barat adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, seperti keterbatasan anggaran, kesulitan geografis, dan koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan daerah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Barat dan pihak terkait lainnya menunjukkan komitmen kuat untuk membangun provinsi ini menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan yang baik, kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif, dan keterlibatan aktif masyarakat, Sulawesi Barat dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan sangat penting dalam mempercepat kemajuan provinsi ini.

Meski demikian, ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain pemerataan kualitas infrastruktur antarwilayah, peningkatan akses air bersih, kondisi jalan lingkungan, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan, khususnya di wilayah perdesaan, pesisir, dan kepulauan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi Bapperida Kabupaten

Mamuju dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih terarah, kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pembangunan

1. Pemberdayaan Daerah Tertinggal

   Kebijakan pemberdayaan daerah tertinggal di Kabupaten Mamuju bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah pusat dan daerah terpencil. Dengan mendukung pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Program ini mencakup pemberian insentif bagi investor untuk berinvestasi di daerah-daerah tersebut, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

2. Pembangunan Berkelanjutan

   Kebijakan pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu fokus utama dalam merencanakan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Pemerintah provinsi dan pusat harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan perlindungan terhadap ekosistem alam.

3. Inovasi dalam Infrastruktur

   Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas pemerintah. Infrastruktur berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Inovasi seperti smart city, e-governance, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam sektor energi dapat mempercepat transformasi

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur mampu memberikan layanan yang memadai, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indeks ini mencerminkan kondisi fisik, ketersediaan, aksesibilitas, keandalan, dan tingkat pemanfaatan berbagai jenis infrastruktur seperti jalan, transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna, kesesuaian dengan standar teknis, serta kemampuan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas layanan infrastruktur di suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Indeks Layanan Infrastruktur ini bertujuan untuk Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat

terhadap kinerja pembangunan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pembangunan infrastrukturselain itu juga untuk Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan dan menyusun program/kegiatan tahun selanjutnya.

disebutkan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 80, dari target daerah sebesar 82 atau dengan kata lain Capaian Kinerja pada Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mamuju sebesar 95 %.

Data mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Mamuju dari tahun 2022, IKLI tercatat dengan capaian Kinerja sebesar 100. Pada tahun berikutnya, 2023 (133%), pada tahun 2024 (117,14), terjadi penurunan pada tahun 2024 meskipun tidak secara signifikan. Angka Persentase capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tersebut diatas merupakan hitungan dari perbandingan antara realisasi dan Target daerah yang termuat dalam IKU Daerah Kabupaten Mamuju.

meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hal menunjukkan kemungkinan adanya menandakan adanya tantangan atau gangguan terhadap aspek ketahanan lingkungan yang mungkin berkaitan dengan faktor-faktor seperti bencana alam, degradasi ekosistem, atau keterbatasan tata kelola lingkungan saat itu di Kabupaten Mamuju. Walau demikian, fluktuasi yang terjadi menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjaga dan lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup di masa depan.

Tabel III - 7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	74,66	78,22	84,77	108,37
2	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	100.00
Rata-rata capaian						**104,18**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Soot ini IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (1KA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (/KL) dan Indeks Kualitas Air Lout (1KAL). Nilai IKLH mencakup nilai untuk Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Nasional. IKLH nasional merupakan agregasi nilai IKLH dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Penyelenggaraan perhitungan IKLH merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program pertindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk indikator sasaran satu Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup. Mendasari Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

disebutkan bahwa Pada kabupaten Mamuju ditahun 2025 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 108,37 persen berdasarkan Realisasi Indikator Sasaran sebesar 84,77 persen diperbandingkan dengan Target sebesar 78,22 persen. Berdasarkan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Pembandingan antara target dan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2025, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. III.8
Target dan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2025.

No	Indeks	Tahun 2025		(+/-)
		Target	Capaian	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	77	80,79	3
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	86,92	(3,08)
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	87,61	87	0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**80,50**	**84,77**	**4,27**

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat

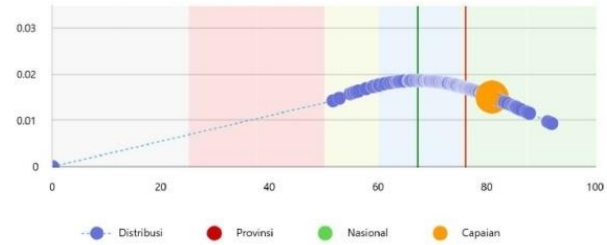
2025

IKA
80.79
SEDANG

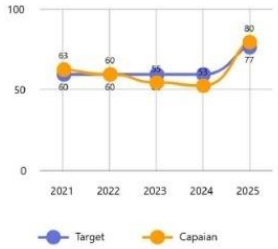
Indeks Respon IKA
3.60

Peringkat
Nasional : 50 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 6 Kabupaten/Kota

Posisi IKA



Tren IKA



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	3	6	6
KAB/KOTA	20	24	24
TOTAL	23	30	30

Indeks Respon Air



Sebaran Titik Pemantauan

Rekomendasi

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat

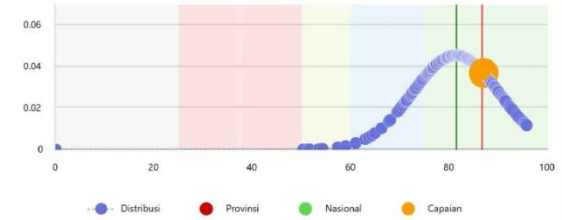
2025

IKU
86.92
BAIK

Indeks Respon IKU
31.80

Peringkat
Nasional : 95 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 2 dari 6 Kabupaten/Kota

Posisi IKU



Tren IKU



Data Pemantauan

	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	6	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	6	8	8

Indeks Respon Udara



Sebaran Titik Pemantauan



Rekomendasi

PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat

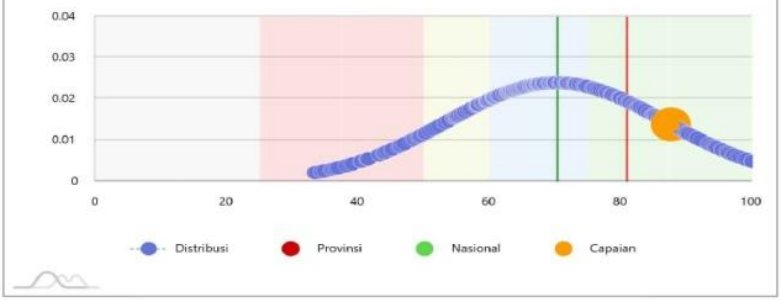
2025

IKL
87.61
BAIK

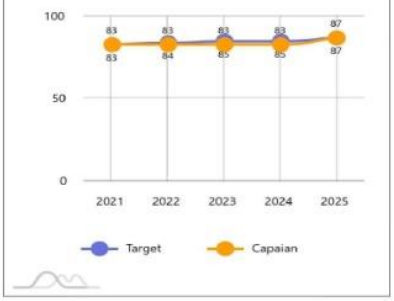
Indeks Respon IKL
58.35

Peringkat
Nasional : 58 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 6 Kabupaten/Kota

Posisi IKL



Tren IKL

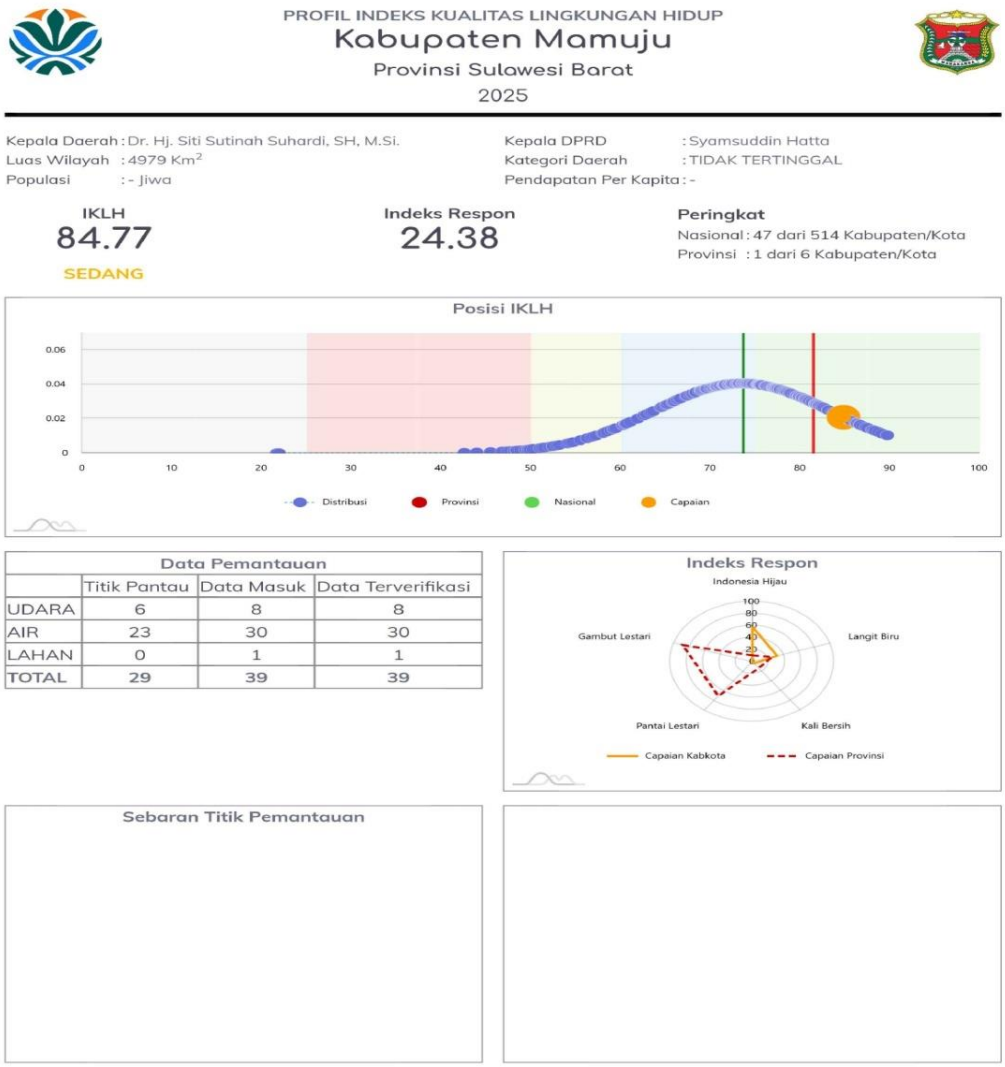


Indeks Respon Tutupan Lahan



Kualitas Tutupan Lahan

Rekomendasi



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian nilai IKLH kabupaten Mamuju tahun 2025 sebesar 84,77 dari target sebesar 78,22 atau dengan capaian kinerja sebesar 108,37 %. Jika dibandingkan dengan target pencapaian IKLH pada tahun 2025 kabupaten Mamuju, maka capaian Inilai IKLH tahun 2025 melampaui target dalam RPJMD. Capaian nilai IKLH kabupaten Mamuju pada tingkat nasional masuk dalam peringkat ke 47 dari 514 kabupaten/kota, dan pada level Provinsi Sulawesi Barat masuk peringkat 1 dari 6 kabupaten/kota.

Dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan capaian tercatat bahwa pada tahun 2022 sebesar 78,94 sampai dengan tahun 2025 sebesar 84,77 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang cukup signifikan.

Ada beberapa tantangan kedepan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai IKLH sebagai parameter pengelolaan lingkungan hidup diantaranya :

a. **Kebijakan anggaran** : Pada tahun 2025, besaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan di kabupaten Mamuju masih rendah atau kurang dari 1% dari APBD kabupaten Mamuju pada tahun yang sama. Alokasi anggaran yang rendah berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas seperti pada tahun 2025, hanya dilakukan pemantauan kualitas air sungai sebanyak 5 (lima) sungai, dan tidak melakukan pemantauan udara ambien di daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan hanya berfokus pada pengumpulan data semata, dan belum menyentuh pada kegiatan untuk penelitian lebih lanjut penyebab kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan aksi perbaikan lingkungan atau pencegahan kerusakan lingkungan. Untuk itu, diharapkan alokasi anggaran yang memadai sekurang-kurangnya 1,5% dari total APBD akan membantu dalam peningkatan usaha/ kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya kegiatan pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang ada.
b. **Keberadaan kebijakan produk hukum daerah** : Pada tahun 2025, DLHK masih menghadapi kendala terbatasnya proiduk hukum daerah khususnya terkait pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa peraturan daerah yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Peraturan Derah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Air adalah beberapa peraturan daerah yang bersifat mandatory/ wajib dimiliki oleh pemerintah daerah. Bahkan untuk Perda tentang RPPLH wajib dimiliki oleh pemerintah daerah mnaksimal pada tahun 2028. Kedua perda ini sangat penting dan urgent dimiliki daerah sebagai panduan teknis pengelolaan lingkungan hidup termasuk diantaranya kelayakan perizinan usaha/kegiatan dari segi lingkungan, penentuan jumlah limbah yang dapat dibuang ke media lingkungan oleh satu usaha/ kegiatan dsb, serta mengukur ketaatan usaha/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan juga bergantung pada keberadaan perda RPPLH.
c. **Kurangnya inovasi dalam pengelolaan lingkungan** : pada tahun 2025, tidak terdapat inovasi daerah yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian IKLH. Ada beberapa inovasi yang bisa didorong tetapi belum dapat didorong secara maksimal seperti pengomposan sampah rumah tangga berbasis kelurahan/ desa, aktivitas bank sampah pada level kelurahan/desa, peniadaan penggunaan tas plastik kresek pada tingkat retailer atau toko2 kelontong dan pasar, pengadaan hutan desa dan hutan kota, perluasan jaringan sabuk hijau (*green belt)* perkotaan, uji emisi kendaraan berkala, dsb.. adalah beberapa inovasi yang dapat didorong sebagai pengelolaan lingkungan untuk mencapai target IKLH,
d. **Kurangnya peran para pihak berkepentingan** : Peran para pihak berkepentingan khususnya dari masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan pemerintah lokal (kelurahan, desa dan

kecamatan) dalam pengelolaan lingkungan masih minim. Inovasi pada tingkat pemangku kepentingan masih terbatas pada aksi reaktif (seperti melakukan kegiatan kerja bakti, jumat bersih, dsb) tanpa mendorong aksi proaktif dalam rangka pengelolaan lingkungan seperti tidak adanya influencer muda yang fokus pada membangun budaya pengurangan sampah rumah tangga pada generasi z, gen alpha, dsb. Masyarakat yang aktif melakukan edukasi dan kampanye tidak menggunakan produk plastik sekali pakai dsb. Belum adanya bank sampah berbasis komunitas,

e. **Dukungan pemimpin daerah** : Kebijakan pembangunan daerah masih berfokus pada penguatan infrastruktur fisik daerah, dan penyediaan fasilitas pelayanan dasar masyarakat. Keberadaan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum mendapatkan prioritas yang penting, padahal keberadaan lingkungan yang baik dan sehat sangat penting sebagai input utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh : penyebab kasus stunting yang paling besar disebabkan oleh keberadaan lingkungan yang tidak sehat dan baik- turunnya kualitas air sungai dan pencemaran tanah akan mendorong terbatasnya akses air bersih masyarakat dan turunnya kemampuan tanah untuk menghasilkan sumber makanan yang baik. Turunnya kualitas udara pada suatu wilayah, juga mendorong pada rturunnya tingkat kesehatan masyarakat sekitar, sehingga produktifitas masyakarat juga kana menurun.

- Hal yang dapat dilakukan kedepan untuk perbaikan nilai IKLH:
  a. Penyediaan produk hukum pengelolaan lingkungan diantaranya Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Mamuju (RPPLH), Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Air (RPPSDA). Kedua perda ini bersifat mandatory dan urgent serta wajib dimiliki oleh setiap pemerintah daerah maksimal pada tahun 2028.
  b. Peningkatan dukungan pimpinan daerah : peningkatan dukungan pimpinan daerah dapat melalui kebijakan anggaran, kebijakan produk hukum, pengawasan (sanksi dan reward), serta mendorong pembangunan infrastuktur hijau atau pembangunan ramah lingkungan, pegnadaan fasilitas pendukung dalam pengelolaan LH seperti TPS3R, Bank Samph TPA *Sanitarty landfill*, IPAL Komunal dsb.
  c. Meningkatkan peran aktif para pihak : peran aktif para pihak didorong untuk mengembangkan program/ kegiatan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,

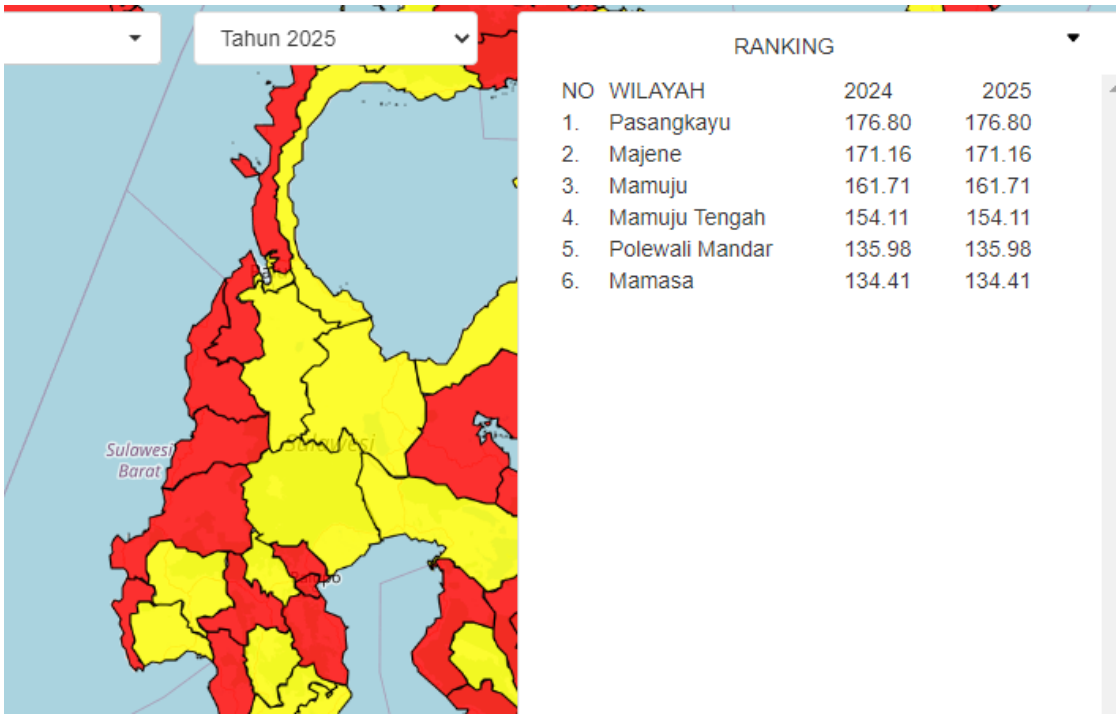
Data IKLH yang tercantum adalah data resmi yang dipublikasikan oleh KLH RI.

Bencana ialah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu, baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) menyatakan bahwa secara umum, *risk* ialah nilai kehilangan (korban jiwa, korban luka, kerusakan bangunan, dan lainnya) yang diakibatkan oleh suatu *hazard*. *Disaster risk* merupakan irisan dari *hazard, exposure* dan *vulnerability*.

Nilai indeks risiko bencana atau disaster risk index merupakan hasil perkalian antara aspek exposure dengan vulnerability. Sebagaimana dijelaskan di dalam UU No 24 tahun 2007, BNPB dan BPBD bertanggung jawab mengkompilasi, mengidentifikasi dan menginformasikan peta kerentanan. Terkait hal ini, identifikasi wilayah mana yang memiliki tingkat risiko dan kerentanan bencana tinggi adalah penting untuk itu dilakukan kategorisasi nilai indeks komposit risiko dan kerentanan yang dimana terdiri dari 3 kelompok yaitu kerentanan dengan tingkat rendah, sedang dan tinggi. Proses kategorisasi terhadap indeks risiko bencana tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik equal interval.

Pada indikator kedua dijelaskan bahwa Pada Tahun 2025 indikator Indeks Resiko Bencana di kabupaten mamuju mendapatkan predikat Sedang, hal ini berbanding lurus dengan Target Daerah dengan Status Predikat Sedang dengan realisasi Status Predikat Sedang atau dengan hasil capaian Kinerja 100 persen.

Gambar 3.1
Peta Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2025



Prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menurunkan tingkat risiko bencana dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai Tujuan tersebut diperlukan kebijakan dan tindakan-tindakan untuk penanggulangan bencana.

Pada dasarnya, penerapan kebijakan dan tindakan tersebut membutuhkan kerjasama multi pihak dari pemerintah daerah, instansi dan elemen yang terkait. Optimalitas upaya penanggulangan bencana tersebut perlu disinkronisasi dengan kebijakan tingkat nasional.

sebagian besar bencana di kabupaten mamuju memiliki tingkat resiko tinggi yang meliputi bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa Bumi, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. sedangkan untuk tingkat resiko bencana sedang yaitu bencana epidemi dan wabah penyakit.

menyikapi resiko yang beragam maka pemerintah kabupaten mamuju perlu mengambil kebijakan strategis yang mendorong percepatan pengurangan resiko bencana di kabupaten mamuju agar lebih efektif.

Indeks Resiko Bencana yang tercatat di kabupaten Mamuju pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercatat kategori Tinggi dan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 tercatat dengan kategori Sedang. dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan beberapa kebijakan dalam mengantisipasi datangnya Bencana. adapun kebijakan yang dimaksud berupa :

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana
    a. Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama. Fungsi dari kebijakan ini adalah adanya pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di daerah. Dengan adanya pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah.
    b. Memperkuat dokumen kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat kajian risiko daerah dengan mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas. Kebijakan ini diperkuat dengan penyusunan bersama kajian risiko bencana antar daerah administrasi yang telah mempertimbangkan risiko lintas batas wilayah. Membangun Perencanaan daerah berdasarkan kajian risiko bencana yang didukung oleh sistem pendataan yang tervalidasi hingga tingkat pemerintahan paling bawah, medasari pengaplikasian kebijakan ini.

c. Menyusun rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Fungsi kebijakan ini adalah adanya mekanisme perencanaan kontinjensi dalam menjaga efektifitas operasi tanggap darurat bencana. Dengan adanya rencana kontijensi bencana pemerintah di Kabupaten Mamuju

2. Perlindungan Masyarakat dari Bencana

a. Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Sasaran dari strategi ini adalah diterapkannya upaya-upaya khusus untuk bencana yang telah dipetakan demi pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Mamuju. Selain itu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah bencana yang tergolongkan kedalam kelompok rentan. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan kepada upaya pencegahan dan mitigasi. Dengan adanya strategi ini diharapkan risiko bencana dapat dikurangi atau di tiadakan.

b. Kesiapsiagaan bencana

Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan sistem kesiapsiagaan yang efektif. Dengan adanya hal ini maka dampak ancaman bencana yang tidak dapat diantisipasi melalui pencegahan dan mitigasi bencana dapat diminimalisir.

pada tahun 2025 dari Enam (6) Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Data BPS Sulawesi Barat tahun 2026, disebutkan Kabupaten Majene tidak mengalami Bencana alam, berbeda dengan lima (5) Kabupaten lainnya yang tercatat bahwa pada Kabupaten Polewali Mandar tercatat 10 kejadian Bencana, Kabupaten Mamasa 3 Kejadian Bencana, Kabupaten Mamuju 6 Kejadian Bencana, Kabupaten Pasangkayu 2 Kejadian Bencana dan Kabupaten Mamuju Tengah 6 Kejadian Bencana. sehingga total kejadian bencana yang terjadi pada Propinsi Sulawesi Barat sebanyak 27 Kejadian Bencana. data tersebut dapat kita lihat berdasarkan daftar tabel berikut :

Tabel III - 9
Jumlah Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam (kejadian) di Provinsi Sulawesi Barat, 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi	Jumlah Bencana Alam - Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi dan Tsunami	Jumlah Bencana Alam - Letusan Gunung Api	Jumlah Bencana Alam - Tanah Longsor	Jumlah Bencana Alam - Banjir	Jumlah Bencana Alam - Kekeringan	Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Bencana Alam - Cuaca Ekstrem	Jumlah Bencana Alam - Gelombang Pasang/Abrasi
Majene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polewali Mandar	-	-	-	-	1	7	-	-	2	-
Mamasa	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Mamuju	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-
Pasangkayu	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Mamuju Tengah	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	7	15	-	-	5	-

Sumber Data : BPS Sulawesi Barat, 2026

kebijakan yang mengatur pembagian peran dan tugas serta penegasan-penegasan hal-hal tertentu dalam sinergisitas upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Mamuju. Untuk itu berikut adalah Rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis :

1. Perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan.
   a. Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal.

      Fungsi dart kebijakan ini adalah untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dan insttusi terkait penanggulangan bencana untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana. balk bentpa sumber daya maupun sarana prasarana. Hal tersebut dapat dilihat dart adanya pembagian kewenangan dan sumberdaya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan institusi/komunitas lokal terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Mamuju.
   b. Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasta bencana terhadap pertukaran infcrmasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

      Fungsi dari kebijakan ini adalah menjamin terlaksananya mekanisme evaluasi terhadap prosedur yang digunakan dalam operasi darurat bencana untuk efektfitas pelaksanaan operasi. Dampak yang akan terjadi pascabencana di suatu daerah sangat penting dikaji untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan. Selain itu pengkajian ini juga berguna untuk meninjau kondisi yang akan terjadi pascabencana tersebut. Untuk itu penjaminan perlaksanaan mekanisme evaluasi terhadap prosedur yang digunakan dalam operasi darurat bencana sangat penting untuk efektifitas pelaksanaan operasi.

c. Mengintegrasikan Kebijakan pengurangan risiko bencana kepada rencana dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Fungsi dari kebijakan ini adalah Pengintegrasian kebijakan pengelolaan lingkungan, yang memanfaatkan sumber daya Lahan dan tataguna lahan dengan mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan mengurangi risiko bencana yang dapat meneimbulkan kerugian jiwa dan aset-aset lain yang munglun hilang disebabkan oleh bencana yang akan terjadi di Kabupaten Mamuju. Hal int didukung dengan mekanisme partisipanf dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang diterapkan dalampengelolaan lingkungan ludup. pengelolaan sumber daya alam, tata gima lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

2. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu.

a. Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama.

Fungsi dari kebijakan ini adalah adanya pusat data dan informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di daerah. Dengan adanya pusat data dan dominasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah.

b. Memperkuat dokumen kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperkuat kajian risiko daerah dengan mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas. Kebijakan mi diperkuat dengan penyusunan bersama kajian risiko bencana antar daerah adnunistrasi yang telak mempertimbangkan risiko hntas batas wilayalt Membangun Perencanaan daerah berdasarkan kajian risiko bencana yang didukung oleh sistem pendataan yang tenralidasi hingga t:ngkat pemerintahan paling bawah, medasari pengaplikasian kebijakan ini.

c. Menyusun rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.

Fungsi kebijakan ini adalah adanya mekanisme perencanaan kontinjensi dalam menjaga efektifitas operasi tanggap darurat bencana. Dengan adanya rencana kontijensi bencana pemerintah di Kabupaten Mamuju dapat membangun mekanisme dan menjaga efektifitas operas' tanggap darurat

3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan

   menerapkan metode reset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysist) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas basil riset. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur hingga mampu menurunkan tingkat kerugian bila terjadi bencana. Hal ini diperkuat dengan adanya pendayagunaan basil reset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur hingga mampu menurunkan tingkat kerugian bila terjadi bencana.

4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

   Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana. Yang diiringi dengan memberdayakan forum/jaringan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkuatan forum PRB di Kabupaten Mamuju yang terdiri dari aktor lintas sektoral sehingga mampu mempercepat kemajuan penyelenggaran Penanggulangan Bencana di daerah.

selain itu juga Pemerintah Kabupaten Mamuju melaksanakan program kegiatan penanganan Bencana yaitu :

1. Tanggap Bencana Darurat

   Kebijakan Tanggap darurat difokuskan kepada penyelamatan korban bencana sekaligus melakukannormalisasi secepatnya kehidupan pada masa krisis dan masa darurat. hal ini bertujuan untuk menekan jumlah korban dan antisipasi dampak bencana turunan

2. Pemulihan Bencana

   Kebijakan ini difokuskan kepada penyelamatan penghidupan masyarakat saat masa krisis, masa darurat dan masa pemulihan. dengan adanya hal ini diharapkan pengembalian kehidupan masyarakat ke kondisi normal atau pada kondisi sebelum bencana terjadi dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Tabel III - 10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan,
Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	**71,86**	68,85	72,77	**105,69**
2	Indeks Pendidikan	Skala	**0,64**	0,50	0,65	**130,00**
3	Indeks Kesehatan	Skala	**0,802**	0,612	0,809	**132,19**
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	**10,440**	44.000	10.682	**24,27**
5	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	**60,96**	60,12	60,61	**100,81**
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	**77**	70	55,41	**79,15**
Rata-rata capaian						**95,35**

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi ini memiliki arti yang luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup saat lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar, yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan capaian pembangunan dalam hidup yang layak.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan positif dan sejalan dengan IPM. Artinya, semakin tinggi tingkat IPM, maka pembangunan menuju kesejahteraan akan semakin dekat, dan jika kesejahteraan sosial tercapai, IPM suatu daerah akan tinggi.

disebutkan bahwa Pada Indikator pertama pada sasaran Strategis ini Indeks Pembangunan Manusia disebutkan pula bahwa Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2025, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 72,77. Capaian Kinerja indikator ini sebesar **105,69** persen yang

dimana realisasi Indikator sebesar 72,77 melebihi dari target sebesar 68,85.

IPM Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir disebutkan bahwa pada tahun 2022 realisasi IPM sebesar 68,88 %, Tahun 2023 realisasi IPM sebesar 71,07 %, ditahun 2024 realisasi IPM sebesar 71,86 %, hingga tahun 2025 sebesar 72,77 % . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk Kabupaten Mamuju dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak semakin baik dari tahun ke tahun. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Mamuju berhasil naik lebih jauh ke kategori "tinggi" dalam klasifikasi IPM, yang mencerminkan membaiknya kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut Gambaran Kondisi IPM Di Sulawesi Barat pada tahun 2025 :

Tabel III. 11
Indeks pembangunan manusia menurut kabupaten
Di propinsi sulawesi barat , 2021-2025

Kabupaten *Regency*	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	71,10	71,64	72,44	73,25	74,15
Polewali Mandar	67,85	68,42	69,24	69,88	70,71
Mamasa	66,97	67,53	68,14	68,68	69,56
Mamuju	69,80	70,35	71,07	71,86	72,77
Pasangkayu	69,37	69,94	70,42	71,04	71,62
Mamuju Tengah	66,38	67,07	67,63	68,53	69,17
Sulawesi Barat	**68,64**	**69,19**	**69,80**	**70,46**	**71,16**

Sumber data : Mamuju dalam Angka Tahun 2026

pada tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) propinsi Sulawesi Barat mendapatkan capaian sebesar 71,16, bila dibandingkan dengan capaian Kabupaten Mamuju sebesar 72,77, mak dapat kita simpulkan bahwa kabupaten Mamuju lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan Propinsi Sulwesi Barat itu Sendiri.

Kabupaten Mamuju menunjukkan kemajuan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2022-2024 dengan peningkatan dari 68,88 menjadi 72,77, menempatkannya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan IPM tertinggi kedua setelah Majene (74,15). Polewali Mandar mencatat pertumbuhan stabil di kisaran 70,71, sementara kabupaten lainnya seperti Mamasa,

Pasangkayu, dan Mamuju Tengah juga menunjukkanpeningkatan bertahap meskipun dengan angka lebih rendah. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia di Sulawesi Barat.
dengan melihat Capaian tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan beberapa Kebijakan yaitu dengan Adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi akses maupun kualitas layanan kesehatan, pola hidup masyarakat yang semakin baik, serta dukungan lingkungan yang lebih sehat. Secara demografis UHH sebesar 72,61 tahun menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa seorang bayi yang lahir pada tahun 2025 di Kabupaten Mamuju diproyeksikan dapat hidup rata-rata hingga usia 72,61 tahun, dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku pada tahun 2025 tidak berubah sepanjang hidupnya.
Komponen kedua adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 13,29 tahun pada tahun 2024 menjadi 13,30 tahun pada tahun 2025. Angka ini menggambarkan harapan lama sekolah penduduk yang semakin baik, mencerminkan semakin terbukanya akses dan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi. Selain HLS, ada juga indikator pendidikan selanjutnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kabupaten Mamuju juga meningkat dari 8,35 tahun pada tahun 2024 menjadi 8,71 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan capaian pendidikan masyarakat, yang mencerminkan semakin banyak penduduk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
Dari dimensi standar hidup yang layak, pengeluaran perkapita disesuaikan penduduk Kabupaten Mamuju sebagai komponen ketiga juga meningkat dari 10.440 ribu rupiah per kapita pada tahun 2024 menjadi 10.682 ribu rupiah per kapita pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kabupaten Mamuju semakin membaik.
Pemerintah Kabupaten Mamuju mengambil langkah tindak lanjut dalam penguatan IPM di daerah Kabupaten Mamuju dengan cara melaksanakan kajian Peningkatan IPM Kabupaten Mamuju. Dokumen perencanaan ini menguraikan tentang analisis situasi dan kondisi tentang capaian IPM berdasarkan indikator pembentuk dan indikator utama, isu strategis pengembangan sumber daya manusia, peluang dan tantangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IPM dan merumuskan tentang arah kebijakan, strategi, program, kegiatan disertai dengan sasaran dan indikator kinerja pembangunan manusia.
Bapperida menjadi koordinator pemantauan dan evaluasi bersama Organisasi perangkat daerah urusan kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sebagai pendukung Peningkatan IPM. serta tak lupa juga Pelaksanaan peningkatan IPM telah melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan perangkat daerah dan Lembaga non-pemerintah.
selain itu juga Sebagian besar stabilitas makro ekonomi berfokus pada pengendalian dan

pemotongan anggaran belanja pemerintah Daerah dalam rangka mencapai keseimbangan necara anggaran. Mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang terpenting tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak.

Indeks Pendidikan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan yang mencerminkan kualitas somber daya manusia melalui capaian pendidikan masyarakat. Indikator ini mmunnya dipengaruhi oleh komponen seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang menunjukkan tingkat akses dan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Dalam konteks pembangunan pendidikan daerah, program wajib belajar yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah sate upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (7-12 talon), sekolah menengah pertama (13-15 talnui), sekolah menengah atas (16-18 talmn), serta perguruan tinggi (19-23 talon). Untuk mengetahui keberhasilan program tersebut dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam pendidikan formal. Semakin tinggi nilai APS maka semakin besar proporsi penduduk usia sekolah yang masili bersekolah, sehingga mencerminkan akses dan keberlanjutan pendidikan yang lebih baik.

Pada Talnui 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target Indeks Pendidikan sebesar (0,50). Berdasarkan hasil pengukuran kineija, realisasi indikator tersebut mencapai (0,65) sehingga tingkat capaian kineija sebesar (130,00) persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian indikator ini menunjulckan kinerja sangat baik.

Capaian tersebut juga didukung oleh perkembangan indikator pendidikan lainnya, khususnya Harapan Lama Sekolah sebagai salah sate komponen pembentuk Indeks Pendidikan dimana faktor penunjang dalam pencapaian tersebut tidak terlepas dari capaian Harapan Lama Sekolah yang mencapai 13,3 tahun pada talnui 2025.

Apabila dibandingkan dengan capaian talon sebelunmya, Indeks Pendidikan menunjukkan peningkatan. Sebagai gambaran pada Talnui (2023) nilai indikator tercatat sebesar (0,64), sedangkan pada Tahun (2024) tetap sama yaitu sebesar (0,64), dan pada Talnui 2025 meningkat menjadi (0,65). Hal iui menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir teijadi tree relative stabil pada pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Mamuju.

Selain dibandingkan dengan capaian talon sebehunnya, kineija Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju juga dapat dilihat melalui perbandingan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data tahun 2025, nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju sebesar (0,65) berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Majene (0,71), serta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Polewali Mandar (0,64), Kabupaten Mamasa (0,63), Kabupaten Mamuju Tengah (0,63), dan Kabupaten Pasangkayu (0,61). Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Mamuju tergolong cukup kompetitif dan berada pada kelompok daerah dengan kineija tinggi di tingkat provinsi.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sebesar (0,64), nilai Kabupaten Mamuju yang mencapai (0,65) berada di atas rata- rata provinsi. Kondisi ini ineinuijukkan bahwa Kabupaten Mamuju memberikan kontribusi yang positif terhadap capaian pembangunan pendidikan di tingkat provinsi. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.

Perkembangan tersebut juga terlihat dari perubahan beberapa komponen pembentuk indikator pendidikan. Salah satunya adalah komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,29 tahun pada tahun 2024 menjadi 13,30 talnui pada talnui 2025. Angka ini menggambarkan harapan lama sekolah penduduk yang semakin baik, mencerminkan semakin terbukanya akses dan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain HLS, indikator pendidikan lainnya yaitu Rata- rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat dari 8,35 tahun pada talnui 2024 menjadi 8,71 talnui pada talnui 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan capaian pendidikan masyarakat.

Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain program pembangunan pendidikan daerah seperti Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengembangan Kurikuhun yang berperan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, berbagai program pendukung lainnya seperti Program Peinuijang Unisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta program pada bidang kepemudaan dan olahraga seperti Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepennidaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraga an, dan Prop-am Pengembangan Kapasitas Kepranmkaan tuna memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju. Selain itu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, penguatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai program peningkatan kualitas tenaga pendidik tumt berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju.

Selain dukungan program pembangunan daerah, kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas siunber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pada tahun 2025 tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Mamuju masih tertinggi pada jenjang pendidikan dasar dengan Angka Partisipasi Ka sar (APK) sebesar 108,67 persen, diikuti jenjang menengah pertama sebesar 73,17 persen dan menengah atas sebesar 90,80 persen. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) tercatat sebesar 97,78 persen pada jenjang dasar, 67,98 persen pada jenjang menengah pertama, dan 68,43 persen pada jenjang menengah atas. Kondisi tersebut juga didukung oleh partisipasi sekolah penduduk usia sekolah. Pada talnui 2025 sebagian besar penduduk berumur 7-24 tahun di Kabupaten Mamuju masih bersekolah dengan persentase mencapai 72,91 persen, sementara 26,65 persen tidak bersekolah lagi dan 0,44 persen tidak atau belum pernah sekolah. Berdasarkan jenis kelamin, partisipasi sekolah perempuan tercatat lebill tinggi dibandingkan laki-laki.

Selain itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yaitu tingkat melek bumf juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka melek bumf latin di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 mencapai 96,35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 95,32 persen, meskipun jika ditinjau inenunit jenis kelamin angka melek lnu-uf laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan.

meskipun capaian indikator telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Manniju, antara lain rendalmya partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, serta masih adanya lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kompetensi guru yang belum optimal dalam pencapaian nilai uji kompetensi, serta pada sektor kepennidaan dan olahraga masih terdapat rendalmya prestasi pemuda dan olahraga akibat pembinaan yang belum optimal serta keterbatasan pengetahuan kewirausahaan pennida. Kondisi tersebut menja di perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga terlihat dart stniktur pendidikan penduduk. Penduduk yang tidak memiliki ijazah masih mencapai 13,41 persen yang memmjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Selain itu, penduduk yang telah menamatkan pendidikan pergunian tinggi tercatat sebesar 13,08 persen sehingga memmjukkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi masih relatif terbatas dibandingkan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Secara keselunihan, struktur pendidikan penduduk Kabupaten Mainuju pada talnm 2025 masih

didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi serta penguatan pendidikan nonformal dan kese tara an.

Sebagai tindak lanjut atas capaian indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju akan tents melakukan penguatan kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun berikutnya melalui program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan aksesibilitas pendidikan pada seinua jenjang dan jenis pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempermudah pengurusan izin operasional satuan atau program pendidikan gum memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di Kabupaten Mamuju.

Indeks Kesehatan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan di daerah. Indikator ini menunjukkan kondisi kesehatan penduduk yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta efektivitas program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sektor kesehatan di daerah, pada indikator ketiga pada sasaran strategis yakni Indeks Kesehatan, dijelaskan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan selunth masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan teijangkau biayanya.

pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata, diharapkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mainuju dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan tents ditingkatkan, tenttaina bagi kelompok yang inembutuhkan perhatian khusus seperti ibu hamil dan balita. Berbagai upaya dilakukan ntelalui penyediaan dan p einanfaa tan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos obat desa, serta peningkatan akses terhadap air b ersih, disertai peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.

Pada Talnui 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target Indeks Kesehatan sebesar (0,612). Berdasarkan basil pengukuran kineija, realisasi indikator tersebut mencapai (0,809) sehingga tingkat capaian kineija sebesar (132.19) persen dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian indikator ini meinuijukkan kineija sangat baik. Disebutkan juga bahwa faktor peinuijang dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah Usia Harapan Hidup, dimana berdasarkan

data BPS Talnui 2026 bahwa UHH Kabupaten Mamuju pada talnui 2025 sebesar 72,61 tahun.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebehunnya, Indeks Kesehatan menunjukkan peningka tan. Dimana Pada Tahun 2023 nilai indikator tercatat sebesar (0,748), sedangkan pada Tabun 2024 meningkat menjadi (0,802) dan pada Tabun 2025 kembali meningkat menjadi (0,809). Hal ini inentuijukkan bahwa dalam kunm waktu 3 tahun terakhir teijadi teen peningkatan pada capaian pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Mainuju.

Selain dibandingkan dengan capaian tahun sebehunnya, kineija Indeks Kesehatan Kabupaten Manntju juga dapat dilihat melalui perbandingan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data tahun 2025, nilai Indeks Kesehatan Kabupaten Mamuju sebesar (0,809) merupakan yang tertinggi dibandingkan selurah kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Mamasa (0,806), Kabupaten Polewali Mandar (0,791), Kabupaten Majene (0,78), Kabupaten Pasangkayu (0,782), dan Kabupaten 1\4ainuju Tengah (0,776). Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Mamuju berada pada posisi unggul dan sangat kompetitif di tingkat provinsi.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebesar (0,791), nilai Kabupaten Manniju yang mencapai (0,809) berada di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Manniju memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat provinsi. Dengan capaian tersebut, diharapkan upaya pembangunan sektor kesehatan dapat tents dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan tersebut juga menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, baik dart sisi akses maupun kualitas layanan kesehatan, pola hidup masyarakat yang semakin baik, serta dukungan lingkungan yang lebih sehat. Secara demografis UHH sebesar 72,61 tahun menunjukkan bahwa seorang bayi yang lahir pada tahun 2025 di Kabupaten Manniju diproyeksikan dapat hidup rata-rata hingga usia 72,61 tahun, dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku pada talnui 2025 tidak benibah sepanjang hidupnya.

Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain program kesehatan daerah yang berkontribusi seperti Program Penunjang Unisan Pemerintahan Daerah (100%), Program Sediaan Fannasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (100%), dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (100%). Selain itu, Program Peningkatan Kapasitas Somber Daya Manusia Kesehatan juga menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 98,13%, yang mencerminkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana penunjang layanan kesehatan telah tem enuhi secara optimal. Selain itu peningkatan cakupan pelayanan kesehatan

dasar, optimalisasi pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta dukungan berbagai program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, kondisi tersebut juga didukung oleh peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat. Adapun persentase penduduk Kabupaten Mamuju yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan memmjukkan peningkatan dart tahun 2024 ke talnui 2025. Secara kesehu-uhan, persentase penduduk yang memanfaatkan jaminan kesehatan meningkat dart 75,96 persen pada talnui 2024 menjadi 82,94 persen pada tahun 2025.

Kondisi ini meinmjukkan adanya perkembangan yang positif dalam pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat. Peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan ini menunjukkan semakin luasnya cakupan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Manniju terhadap pentingnya perlindungan kesehatan. Kondisi tersebut juga mengindikasikan membaiknya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, kbususnya dalam pemanfaatan fasilitas jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

Meskipun capaian indikator telah menunjukkan kineija yang sangat baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Manniju, antara lain pennasalahan pada kualitas dan pemerataan layanan kesehatan seperti fluktuasi indeks layanan SPM kesehatan, angka kesakitan yang belum menunul secara signifikan, serta capaian keluarga sehat yang bane mencapai 39% dart target 45% yang dipengaruhi oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang belum mencapai target. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas capaian indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju akan terus melakukan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun berikutnya melalui program penguatan layanan kesehatan dasar seperti peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan SDM kesehatan di Puskesmas sesuai standar, dan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui edukasi masyarakat serta skrining dan deteksi dini penyakit. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Mamuju.

Pengeluaran per kapita menunjukkan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan (BPS, 2008). Maksud dari rumah tangga sendiri adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dimana pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dipengaruhi oleh pendapatan per kapitanya. Asumsi ini menjelaskan pada saat pendapatan seseorang semakin meningkat maka semakin tinggi pula pengeluarannya.

disebutkan bahwa Semakin tinggi kelompok pendapatan, semakin tinggi pula rata-rata pengeluaran per kapita, baik untuk kategori makanan maupun non-makanan. Ini menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi.

pada Indikator Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)Pada tahun 2024 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) sebesar 10,682 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun yang dimana hal tersebut masih dibawah dari target daerah sebesar 44.000 Ribu Rupiah/ Orang/Tahun. Dengan kata lain bahwa Capaian Kinerja pada indikator ini sebesar 24,27 %.

Pada tahun 2025, persentase pengeluaran penduduk Kabupaten Mamuju untuk makanan terhadap total pengeluaran sebesar 48,24%, atau senilai Rp 549.888 per kapita sebulan. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 44,89%, meskipun secara nominal pengeluaran makanan mengalami penurunan dari Rp 583.509. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non-makanan menurun dari 55,11% pada tahun 2024 menjadi 51,76% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi rumah tangga, di mana proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar meningkat seiring dengan menurunnya total rata-rata pengeluaran per kapita.Kategori pengeluaran makanan terbesar adalah makanan dan minuman jadi, sedangkan pada kelompok non-makanan, pengeluaran tertinggi terdapat pada perumahan dan fasilitas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan praktis serta konsumsi makanan siap saji dibandingkan bahan mentah. Selain itu, tingginya pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mencerminkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal yang layak tetap menjadi prioritas utama dalam struktur pengeluaran masyarakat Kabupaten Mamuju.

persentase pengeluaran penduduk Kabupaten Mamuju dari tahun 2022 sebesar 9,668 Rupiah sampai dengan tahun 2025 sebesar 10,682 Rupiah. dari data tersebut dapat kita lihat peningkatan yang tidak terlalu signifikan namun hal tersebut sangat membantu dalam peningkatan Ekonomi sebuah Daerah.

bila dibandingkan dengan propinsi Sulawesi Barat yang persentase pengeluaran penduduk sebesar 10,516 Rupiah maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kabupaten Mamuju masih dapat diatas Propinsi Sulawesi Barat itu sendiri.

pada tahun 2025 ini Kabupaten Mamuju berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Majene (11,299 Rupiah) dengan Kabupaten Pasangkayu berada pada posisi teratas dengan capaian sebesar (12,644 Rupiah). bukan hal yang mengherankan bagi kita semua bahwa Kabupaten Pasangkayu mendapatkan posisi teratas sebab didukung oleh Sumber daya alam yang melimpah dengan adanya Perusahaan-perusahaan Sawit yang mendukung perekonomian daerah tersebut.

Kabupaten Mamuju mencatat tren kenaikan pengeluaran per kapita riil yang konsisten sepanjang tiga tahun terakhir, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara umum.

Berdasarkan data dari BPS yang tercantum dalam publikasi Mamuju Dalam Angka 2025, rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan meningkat dari Rp 9.668 rupiah pada tahun 2022 menjadi Rp10.682 Rupiah pada tahun 2025.

Data ini memperlihatkan bahwa penduduk Kabupaten Mamuju secara perlahan namun pasti mengalami pertumbuhan kesejahteraan

Namun, terdapat perbedaan mencolok antar kecamatan, di mana wilayah perkotaan masih mendominasi dalam hal ini Kecamatan Mamuju peringkat tertinggi pengeluaran per kapita, sementara beberapa wilayah di kecamatan masih mencatat angka yang relatif rendah.

Meskipun data menunjukkan arah yang positif, masih ada tantangan serius untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan. dimana kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Mamuju membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan, serta program ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. a. Keterwakilan di Parlemen : Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan; b. Pengambilan keputusan : Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan; c. Distribusi Pendapatan : Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan

Komponen pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender adalah persentase perempuan sebagai tenaga manajer, professional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintah, serta kehidupan ekonomi dan sosial . Hal ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambi keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki- laki. Kesempatan perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dari laki- laki. Situasi ini dapat disebabkan

karena mayoritas perempuan usia kerja mengurus rumah tangga sehingga tidak berkategori sebagai penduduk yang potensial dalam pasar tenaga kerja.

pada Indikator kelima pada sasaran Strategis yakni Indeks Pemberdayaan Gender disebutkan bahwa Dalam Dua tahun terakhir, IDG Kabupaten Mamuju menunjukkan penurunan berdasarkan rilis data BPS pada bulan April ditahun 2025 untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan data pada tahun 2024 di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 60,61%. bila dibandingkan dengan target sebesar 60,12 persen maka didapatkan capaian kinerja sebesar 100,81 persen. Sedangkan capaian ini agak menurun dari realisasi kondisi tahun 2024 yaitu sebesar 60,96 persen.

kondisi partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, baik eksekutif dan yudikatif di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 diuraikan bahwa Dari sisi gender, komposisi ASN di Kabupaten Mamuju didominasi oleh perempuan, yakni sekitar 60 persen, sementara laki-laki sekitar 40 persen. Dominasi ini menunjukkan peran perempuan yang semakin kuat dalam birokrasi pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Mamuju tahun 2025 masih didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 28 orang dari total 30 anggota, sementara keterwakilan perempuan tercatat sebanyak 2 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen daerah masih relatif terbatas. Hal tersebut terjadi karena jumlah ASN pada lembaga pemerintah menurun dibanding tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah ASN Laki-laki dan perempuan tidak terjadi kesenjangan yang signifikan, Hal ini didukung karena Bupati Mamuju yang menjabat saat ini adalah seorang Perempuan sehingga sudah mulai memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender di kabupaten Mamuju dapat kita lihat peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yakni tercatat bahwa realisasi Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2022 sebesar 59,38 % dan pada tahun 2025 sebesar 60,61 %. dapat kita tarik kesimpulan bahwa kabupaten mamuju cukup memperhatikan kegiatan terkait Pemberdayaan Gender. disebutkan pula bahwa dalam rentang 3-4 tahun terakhir setiap Capaian atau realisasi daerah dalam pencapaian Pemberdayaan gender selalu melebihi dari Target daerah itu sendiri.

Kondisi terkini yang tercermin dari data-data tersebut menggaris bawahi bahwa isu kesetaraan gender di Kabupaten telah mendapat perhatian khusus. dalam menunjang tujuan Pemerintah Pusat dalam hal Peningkatan Pemberdayaan Gender maka Daerah Kabupaten Mamuju lebih giat lagi menggenjotnya di berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Langkah ini menjadi penting demi pemberdayaan masyarakat secara lebih luas sekaligus mencapai Sustainable Goals 2030 dalam hal kesetaraan gender.

jika dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Propinsi Sulawesi Barat, maka disebutkan pula

bahwa Kabupaten Mamuju masih Jauh tertinggal. yang dimana pada tahun 2025 ini Propinsi Sulawesi Barat memperoleh hasil sebesar 67,16 %. hal ini disebabkan wilayah Propinsi memiliki 6 kabupaten yang memberikan dampak cukup tinggi dalam capaiannya dimana hasil capaian Pemberdayaan Gender tersebut merupakan akumulasi dari nilai enam (6) kabupaten tersebut.

melihat kabupaten Lainnya yang ada di Propinsi Sulawesi Barat maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Mamuju memperoleh posisi ke empat dalam capaiannya pada pemberdayaan Gender. hal ini dapat kita lihat berdasarkan data dari BPS sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan data disebutkan bahwa kabupaten Majene menduduki rangking teratas dengan capaian sebesar 76,96 %, diikuti Kabupaten Polewali mandar (75,38), berikutnya Kabupaten Mamasa (61,09). selanjutnya untuk dua kabupaten yakni Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu capaian pemberdayaan Gendernya berada dibawah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsive gender melalui :

1. Harmonisasi kebijakan antar SKPD
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (Pokja, Focal Point, Tim Teknis, Tim ARG dan Forum Data)
3. Peningkatan kapasitas pelaku/actor yang terlibat dalam percepatan pengarusutamaan gender

selain itu juga Dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Mamuju maka dibutuhkan bukan hanya komitmen tetapi bagaimana melibatkan seluruh stakeholder. Secara teknis beberapa pendekatan yang harus dilakukan antara lain:

1. Sinergitas antara SKPD
2. Mengoptimalkan peran SKPD driver yaitu Bappeda, BPPKB, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat
3. Membangun jejaring dengan perguruan tinggi, media, NGO, organisasi social kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan.
4. Melibatkan pihak swasta (corporate) melalui program Corporate Social Responsibility.

Pembangunan pemberdayaan gender di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, namun tantangan struktural dan budaya masih perlu diatasi. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara menyeluruh, memberikan kontribusi positif bagi Daerah Kabupaten Mamuju dan pembangunan nasional.

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang dibangun atas tiga dimensi utama yaitu :

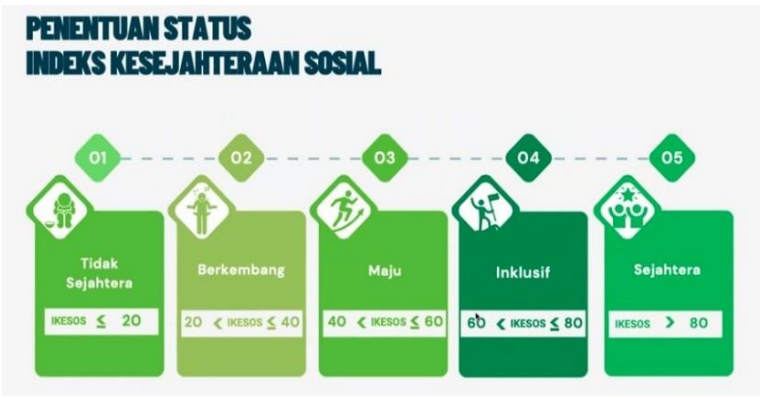
1. kebutuhan dasar
2. peranan sosial, dan
3. keberdayaan ekonomi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial ditujukan agar masyarakat miskindan rentan menjadi lebih berdaya, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi tanpa rasa takut kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Ikesos menjadi instrumen penting untuk mengukur kemajuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemandirian, dan keberdayaan ekonomi. Semakin tinggi capaian kebutuhan dasar dan partisipasi sosial-ekonomi, semakin besar kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengukuran Ikesos berbasis DTSEN dalam penentuan peringkat kesejahteraan penduduk, sehingga indikator tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dimensi keberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial-ekonomi dalam Ikesos memastikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan keluarga untuk berfungsi secara sosial, produktif, dan berkelanjutan.

Pada sasaran Strategis 5 Indeks Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa realisasi pada tahun 2025 adalah 55,41% dengan persentase capaian sebesar 79,15%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yaitu 57% atau dengan persentase capaian sebesar 97,21% sedangkan ditahun 2023 mencapai 53% hal ini terdapat penurunan capaian dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena penilaian Ikesos Tahun 2025 sudah berdasarkan pada Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang mencakup 3 Dimensi, 12 Variabel dan 99 indikator. Tapi dari hasil penilaian tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah berada pada status Ikesos Maju (40 s/d 60).

Sumber : Kemensos



Dimensi	Variabel	Indikator	Item	Satuan/ Rincian	Input Data
Kebutuhan Dasar	Pangan	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,47
		Ketercukupan Gizi	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita	gram (gr)	58
			Prevalence of Undernourishment (PoU)	%	7,37
	Papan	Air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	%	85,87
	Kesehatan	Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting	%	38,7
		Akses Layanan Kesehatan	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk	Jumlah Puskesmas	23
				Jumlah Penduduk	288400
	Jaminan Sosial	Kepemilikan Jaminan Sosial	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	
	Rasa Aman	Keamanan Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	161,71
	Physical Mobility	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas dan lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas Lansia dan Disabilitas	
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	93
			Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas Lansia	
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	93
			Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang memiliki prasarana umum yang mendukung aksesibilitas disabilitas	0,2
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	93
		Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas dan lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas Lansia dan Disabilitas	0,2
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	93
			Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas lansia	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas Lansia	
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	
			Persentase sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas	Jumlah Unit Layanan Pemerintah yang telah memiliki sarana umum yang mendukung alat bantu mobilitas disabilitas	0,2
				Jumlah Unit Layanan Pemerintah	93
Peranan Sosial			Terdapat keterwakilan pada kelompok rentan sosial (minimal 4 kelompok rentan) dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1

	Partisipasi	Keikutsertan	Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	**Jumlah masyarakat rentan sosial** yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	4
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun (Musrenbang RKPD)	1056
			Terdapat kelompok Lansia yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Keterwakilan Kelompok Lansia dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	**Jumlah Perwakilan kelompok Lansia** yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	4
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1056
			Terdapat kelompok Disabilitas yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Keterwakilan Kelompok disabilitas dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	**Jumlah Penyandang Disabilitas** yang ikut dalam forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1056
		Keputusan	Terdapat Keterwakilan Kelompok Rentan Sosial (minimal 4 kelompok rentan) yang **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Keterwakilan masyarakat rentan sosial yang **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya)	**Jumlah masyarakat rentan sosial yang memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD (kelompok rentan: forum anak, forum perempuan/gender, forum lansia, forum penyandang disabilitas.	4
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1056
			Terdapat Kelompok Lansia yang **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Keterwakilan Kelompok Lansia yang **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	**Jumlah perwakilan kelompok Lansia yang memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	3
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1056
			Terdapat kelompok Disabilitas yang **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Keterwakilan Kelompok Disabilitas **memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	**Jumlah Penyandang Disabilitas yang memberikan saran/ masukan** dalam forum Musrenbang RKPD	1
				Jumlah peserta forum perencanaan pembangunan dalam setahun Musrenbang RKPD	1056

		Kontrol	Terdapat kelompok/organisasi rentan sosial di Kab/Kota	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Rasio masyarakat rentan sosial (Lansia, Perempuan, penyandang disabilitas) yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Jumlah masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Perempuan, penyandang disabilitas) yang menjadi anggota DPRD	2
				Jumlah keseluruhan anggota DPRD	30
			Terdapat kelompok Lansia di Kab/Kota	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	0
			Rasio Lansia yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Jumlah Lansia yang masuk dalam parlemen (DPRD)	
				Jumlah keseluruhan anggota DPRD	30
			Terdapat kelompok disabilitas di Kab/Kota	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	1
			Rasio disabilitas yang masuk dalam parlemen (DPRD)	Jumlah Disabilitas yang masuk dalam parlemen (DPRD)	0
				Jumlah keseluruhan anggota DPRD	30

		Relasi Sosial	% masyarakat rentan sosial yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah kelompok rentan (lansia, disabilitas, perempuan, anak yang tergabung dalam organisasi masyarakat)	0
				Jumlah PPKS di Kab/Kota	291058
			% Lansia yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah Lansia yang tergabung dalam organisasi masyarakat/ komunitas Lansia	0
			% disabilitas yang tergabung dalam organisasi masyarakat	Jumlah disabilitas yang yang tergabung organisai masyarakat / Komunitas disabilitas	213
			% Kejadian kekerasan/ Bulliying terhadap masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Perempuan, Anak, penyandang disabilitas)	jumlah kejadian kekerasan/ bulliying terhadap masyarakat dengan status rentan sosial	57
				Jumlah kejadian kekerasan/ bullying keseluruhan	57
			% Kejadian kekerasan/ Bulliying terhadap Lansia	Jumlah kejadian kekerasan/ bullying terhadap Lansia	7
				Jumlah kejadian kekerasan/ bullying keseluruhan	10
		Keterhubungan	% Kejadian kekerasan/ Bulliying terhadap disabilitas	Jumlah kejadian kekerasan/ bullying terhadap Disabilitas	3
				Jumlah kejadian kekerasan/ bullying keseluruhan	10
			% Masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Anak, Gelandangan/Pengemis, penyandang disabilitas) terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah masyarakat dengan status rentan sosial (Lansia, Anak, Gelandangan, penyandang disabilitas) terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	41
				Jumlah PPKS di Kab/Kota	291058
	Kohesi Sosial		Persentase Masyarakat Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Jumlah Masyarakat Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	14
				Jumlah Lansia Terlantar	14
			Persentase Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	Jumlah Masyarakat Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial diluar Panti	12
				Jumlah Disabilitas Terlantar	12
		Kepatuhan Sosial	% Penurunan Angka kriminalitas dalam setahun	Jumlah kejadian kriminalitas Tahun 2023	365
				Jumlah kejadian kriminalitas Tahun 2024	365
			% Lansia yang yang melakukan pelanggaran hukum	Jumlah Lansia yang melakukan pelanggaran hukum	0
			% disabilitas yang yang melakukan pelanggaran hukum	Jumlah Disabilitas yang melakukan pelanggaran hukum	0
		Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni	Angka	84,15
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,501
			% sekolah non SLB yang yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	Jumlah sekolah non SLB yang menerapkan kebijakan pendidikan inklusi	
				Jumlah sekolah non SLB	138
			% siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah non- SLB	Jumlah siswa Disabilitas yang bersekolah di sekolah non-SLB	234
				Jumlah penduduk Disabilitas usia sekolah (7-15 tahun)	860
			% Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	0
				Total Jabatan Strategis di Lembaga Eksekutif	27
			% masyarakat rentan sosial yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	Jumlah masyarakat rentan sosial (perempuan & disabilitas) yang menempati jabatan strategis di lembaga eksekutif	4
				Total Jabatan Strategis di Lembaga Eksekutif	
		Kualitas Hidup	% masyarakat yang mengakses layanan	Jumlah pasien yang mengakses layanan	0

			polijiwa/pskiatater (depresi, stress, kecemasan)	polijiwa/ pskiatater (depresi, stress, kecemasan)	
				Jumlah Penduduk	288400
		Kepastian hukum	Nilai SPI KPK	Angka	65,45
	Kelembagaan Inklusif	Kebijakan inklusif	Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Lansia	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	0
			Terdapat Kebijakan (Perda) tentang Disabilitas	Ya/Tidak (Jika "Ya" maka diisi angka 1, jika "Tidak" maka diisi angka 0)	0
		Insentif ekonomi	Indeks Persaingan Usaha	Indeks	4,75
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	68,81
Keberdayaan Ekonomi	Partisipasi Ekonomi	Kemiskinan		%	22,64
		PDRB ADHB		dalam Milyar Rupiah	16024,07
		Gini Rasio		Indeks	0,316
		Jumlah Penduduk		Jiwa	288400
		Pengeluaran per Kapita		dalam Ribu Rupiah	10440

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat Miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Tabel III - 12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	**99,65**	100	99,51	**99,51**
2	Indeks Kriminilitas	Persen	**99,65**	100	0,49	**99,51**
Rata-rata capaian						**99,51**

Keamanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Suasana masyarakat yang aman dan tertib memungkinkan kegiatan ekonomi, sosial, dan pariwisata berkembang dengan baik. Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan sesorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan statistik kriminal yang andal juga menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. pentingnya statistik kriminal yang harmonis dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif. Statistik kriminal memungkinkan pemerintah memantau tren kriminalitas, mengevaluasi efektivitas program pencegahan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dalam penegakan hukum.

Dengan adanya informasi yang berkualitas dan komprehensif mengenai situasi kriminalitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Selain itu, ketersediaan statistik kriminal yang baik juga mendukung terciptanya suasana kondusif bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan tidak akan dapat dicapai secara optimal tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Perhitungan Indeks Ketentraman dan ketertiban merupakan satu kesatuan dengan Indeks Kriminalitas yang dimana dalam Formulasi perhitungan tiap-tiap indikatornya adalah jumlah kasus atau kejadian kriminalitas. disebutkan pula bahwa Pada tahun 2025 untuk Sasaran Strategis 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum mencakup 2 (dua)Indikator yang mendukung dalam Pencapaiannya yakni Indikator 1. Indeks ketentraman dan ketertiban dan Indikator 2 Indeks Kriminalitas.

disebutkan pula beberapa jenis kejahatan yang ada diantaranya :

1. Kejahatan terhadap keamanan publik dan negara;
2. Kejahatan terhadap fisik/badan: penganiayaan berat, penganiyaan ringan dan kekerasan dalam rumah tangga;
3. Kejahatan terhadap hak milik/barang;
4. Kejahatan terkait narkotika;
5. Kejahatan terkait penipuan,penggelapan, dan korupsi;
6. Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan dan pencabulan;
7. Kejahatan terhadap nyawa: pembunuhan;
8. Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan;

Dalam pencapaian Kinerja dua indikator sasaran Strategis ini masing-masing memperoleh hasil sebesar 99,51 %, yang dimana ditahun 2025 tingkat kejahatan di Mamuju relatif rendah. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan hanya sekitar 0,49 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 persentase korban kejahatan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Penduduk perempuan yang pernah menjadi korban kejahatan tercatat sebesar 0,51 persen, sedangkan pada laki-laki sebesar 0,20 persen.

dari dalapan (8) jenis kejahatan terdapat dua (2) jenis kejahatan yang mengalami penurunan jumlah kejadian. Sementara itu, jenis kejahatan terhadap fisik/badan, kejahatan terhadap hak milik/barang, keahatan terkait narkotika, kerjahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi, serta kejahata terhadap kesusilaan mengalami kenaikan. Adapun data terkait kejahatan terhadap keamanan publik dan negara tahun 2023 tidak tersedia karena tidak dicatat dalam kuesioner Statistik Keamanan 2024. ejahatan terhadap keamanan publik dan negara mencakup kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), dan bahan peledak (hadak), serta membahayakan keamanan umum.

Terdapat lima jenis kelompok kejahatan dengan jumlah kasus lebih dari 100 kejadian di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan tren meningkat dibandingkan tahun 2023. Hanya terdapat dua kelompok kejahatan yang mengalami penurunan, yaitu kejahatan terhadap nyawa (turun 8 kasus) dan kejahatan terhadap hak milik. barang dengan penggunaan kekerasan (turun 5 kasus). Upaya mencapai penurunan jumlah kejahatan memerlukan partisipasi dari seluruh pihak serta peran aktif Kepolisian Daerah dalam melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sercara berkala. Kepolisian daerah tentu selalu berkomitmen dalam menciptakan rasa aman serta memberantas kejahatan bagi masyarakat.

Pada tahun 2024 tercatat 1.357 kejadian kejahatan terhadap keamanan publik. Angka ini merupakan yang tertinggi dibanding tujuh jenis kejahatan lainnya. Jumlah kejahatan tehadap fisik/badan mengalami kenaikan 216 kasus dibanding tahun 2023. Kenaikan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah kejahatan terkait narkotika yang meningkat 182 kasus pada tahun 2024. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi tercatat naik 86 kasus. Sementara itu, kejahatan terhadap hak milik/barang naik 43 kasus, dan kejahatan terjadap kesusilaan naik 11 kasus.

Tabel.III. 13

Persentase Penduduk Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2024-2025

Jenis Kelamin	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	0,20	0,12
Perempuan	0,51	0,87
Mamuju	**0,35**	**0,49**

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024-2025

Pada tahun 2025, persentase korban kejahatan pada perempuan meningkat cukup signifikan menjadi 0,87 persen, sementara pada laki-laki justru menurun menjadi 0,12 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan korban kejahatan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 terutama didorong oleh meningkatnya persentase korban pada penduduk perempuan.

Secara umum, meskipun persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan masih relatif kecil, perbedaan antarjenis kelamin dan kecenderungan peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan perlunya perhatian terhadap aspek keamanan dan perlindungan masyarakat, khususnya bagi kelompok perempuan.

Pola perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan selama periode tahun 2023 dan 2024 menurut Kantor Kepolisian Resort dapat dilihat Jumlah kejahatan yang dilaporkan di seluruh kantor kepolisian resort se-Sulawesi Barat mengalami penurunan, kecuali Polres Polewali Mandar dan Polres Mamuju Tengah. Penurunan terbesar terjadi di Polres Mamuju yang mengalami penurunan sebanyak 67 kasus.

Dari total jumlah kejahatan, selama tahun 2024 Polres Polewali Mandar mencatatkan jumlah kejahatan terbanyak (339 kasus), disusul oleh Polres Mamuju (298 kasus), dan Polres Pasangkayu (175 kasus). Polres Majene mencatatkan 164 kasus kejahatan, sedangkan Polres Mamuju Tengah mencatatkan 131 kasus kejahatan. Sementara itu, Polres Mamasa dengan jumlah kejadian kejahatan sebanyak 65 kasus merupakan Polres dengan jumlah kejahatan terlapor paling sedikit.

Sekilas tampak bahwa Kabupaten Mamasa adalah wilayah yang paling aman di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah kejahatan terlapor kurang dari 100 kejahatan dalam dua tahun terakhir. Namun, jumlah kejahatan yang dilaporkan sedikit memiliki dua kemungkinan yaitu tingkat kejahatan yang rendah atau tingkat kejahatan yang dilaporkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya

(under reporting). Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah penduduk tertinggi secara konsisten mencatatkan jumlah kejahatan yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya jumlah penduduk yang meningkatkan peluang terjadinya konflik dan kejahatan dengan berbagai motif, terutama ekonomi.

Upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat Kabupaten Mamuju adalah pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam kepada aparat setempat, diikuti oleh pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga. Sementara itu, pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling) dan pembentukan regu keamanan lingkungan masing-masing. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen kuat dalam menjaga keamanan lingkungan, dengan partisipasi yang tetap tinggi dan cenderung meningkat pada berbagai bentuk kegiatan berbasis inisiatif dan kerja sama warga.

dalam Rencana tindak lanjut berikutnya Pemerintah Kabupaten Mamuju akan melakukan beberapa kebijakan yaitu Pertama, meningkatkan pelatihan sumber daya aparatur untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi. Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan kinerja. Ketiga, Meningkatkan motivasi kerja, spirit dan pemberian diri aparatur untuk berperan mewujudkan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Keempat, meningkatkan tenaga profesional untuk menangani daerah yang masih rawan konflik. Kelima, meningkatkan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi generasi muda. Keenam, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pegawai, antar instansi, dan tokoh masyarakat untuk bersinergi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel III - 14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Gini	Persen	**0,425**	0,20	0,401	**49,87**
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	**6,47**	5.7-5.8%	4,07	**71,40**
Rata-rata capaian						**60,63**

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai indeks ini berada pada rentang 0 sampai 1, dimana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi yang

semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks ini secara resmi dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai dasar evaluasi kondisi sosial ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target penurunan ketimpangan dengan indikator Indeks Gini dari **0,425 pada tahun 2024 menjadi 0,2** pada **tahun 2025**.

Namun berdasarkan capaian tahun 2025, Indeks Gini tercatat sebesar **0,401**, yang berarti Terjadi **penurunan sebesar 0,024 poin** dibanding tahun 2024 Akan tetapi **belum mencapai target yang ditetapkan (gap sebesar 0,201 poin)**

Hal ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.

Di Provinsi Sulawesi Barat, tren ketimpangan menunjukkan kecenderungan menurun :

- **2022** : 0,371
- **2024 (Maret) : 0,354**
- **2024 (September) : 0,330**
- **2025 (sekitar Maret) : ±0,316**

Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, ketimpangan di Sulawesi Barat berada pada **kategori rendah–sedang dan cenderung menurun**.

Berdasarkan data kabupaten di Sulawesi Barat (BPS Provinsi), secara umum:

- Ketimpangan antar kabupaten relatif bervariasi
- Wilayah perkotaan cenderung memiliki ketimpangan lebih tinggi dibanding perdesaan
- Kabupaten dengan aktivitas ekonomi lebih maju (termasuk Mamuju sebagai ibu kota provinsi) cenderung memiliki nilai Gini lebih tinggi dibanding kabupaten lain

Dengan capaian **0,401 (2025)**, Kabupaten Mamuju berada **di atas rata-rata provinsi (±0,316–0,330)**, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain.

Beberapa kebijakan yang berpotensi menurunkan ketimpangan antara lain:

- Program perlindungan sosial dan bantuan bagi masyarakat miskin
- Peningkatan akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan gizi)
- Pengembangan UMKM dan ekonomi lokal
- Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan

Kebijakan tersebut sejalan dengan tren penurunan Indeks Gini dari 0,425 menjadi 0,401.

Adapun beberapa faktor yang masih menjadi kendala:

- Belum optimalnya pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah (kota–desa)
- Ketergantungan pada sektor tertentu tanpa diversifikasi ekonomi
- Kesenjangan akses terhadap lapangan kerja produktif
- Program pengentasan kemiskinan yang belum sepenuhnya tepat sasaran

Kondisi ini menyebabkan penurunan ketimpangan belum signifikan dan target belum tercapai.
Untuk mencapai target penurunan Indeks Gini yang lebih realistis dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan ekonomi inklusif**
    a. Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
    b. Peningkatan akses permodalan dan pasar
2. **Pemerataan pembangunan wilayah**
    a. Fokus pada daerah perdesaan dan tertinggal
    b. Peningkatan konektivitas infrastruktur
3. **Peningkatan kualitas SDM**
    a. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja
    b. Penurunan angka pengangguran terbuka
4. **Perbaikan targeting program sosial**
    a. Integrasi data kemiskinan
    b. Penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran
5. **Monitoring dan evaluasi berbasis data**
    a. Pemanfaatan data Badan Pusat Statistik secara berkala
    b. Evaluasi capaian indikator secara tahunan

Secara umum, meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2025, tingkat ketimpangan di Kabupaten Mamuju masih relatif tinggi dibanding rata-rata provinsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis wilayah untuk menurunkan Indeks Gini secara signifikan di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini menunjukkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah. Data pertumbuhan ekonomi secara resmi dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada kisaran **5,7–5,8%**, dengan capaian tahun 2024 sebesar **6,47%**.

Namun berdasarkan realisasi tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar **4,07%**, yang berarti Terjadi **perlambatan signifikan sebesar 2,40 poin** dibanding tahun 2024 yang dimana Capaian berada **di bawah target yang ditetapkan (selisih ±1,63–1,73 poin)**

Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah yang menyebabkan pertumbuhan tidak sesuai harapan.

Di Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif namun relatif stabil:

- **2023** : **sekitar** 5,0%
- **2024** : sekitar 5,6%
- **2025** : sekitar 4,5–5,0% (indikasi melambat)

Secara umum, pertumbuhan ekonomi provinsi masih berada pada kategori moderat, meskipun mengalami tekanan pada tahun 2025.

Perbandingan antar kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan:

- **Kabupaten dengan basis pertanian kuat cenderung lebih stabil**
- **Wilayah perkotaan seperti Mamuju lebih sensitif terhadap fluktuasi sektor jasa dan perdagangan**
- **Beberapa** kabupaten lain relatif mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 4,5–5,5%

Dengan capaian **4,07%**, Kabupaten Mamuju berada pada **level yang relatif lebih rendah dibanding rata-rata provinsi**, yang menandakan adanya perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibanding wilayah lain.

Beberapa kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain:

- Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan konektivitas wilayah
- Penguatan sektor UMKM dan perdagangan lokal
- Program pemulihan ekonomi pasca gangguan ekonomi sebelumnya
- Peningkatan investasi daerah, khususnya di sektor jasa dan konstruksi

Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap capaian pertumbuhan yang masih positif di tahun 2025.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan belum optimal:

- Ketergantungan pada sektor tertentu (jasa dan konsumsi pemerintah)
- Belum optimalnya hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan
- Terbatasnya investasi skala besar yang masuk ke daerah
- Daya beli masyarakat yang cenderung melemah
- Efektivitas belanja pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendorong multiplier effect

Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

6. **Diversifikasi ekonomi daerah**
    a. Pengembangan sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata) berbasis hilirisasi
7. **Peningkatan investasi**
    a. Penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif investasi
    b. Promosi potensi daerah kepada investor
8. **Penguatan daya beli masyarakat**
    a. Program padat karya
    b. Stabilitas harga kebutuhan pokok
9. **Optimalisasi belanja pemerintah**
    a. Fokus pada belanja produktif yang memiliki dampak ekonomi langsung
    b. Percepatan realisasi anggaran
10. **Pengembangan UMKM dan ekonomi lokal**
    a. Akses pembiayaan
    b. Digitalisasi usaha kecil

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 masih menunjukkan kinerja positif, namun mengalami perlambatan signifikan dibanding tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel III - 15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi	Skor	45,04	15	-72,1	- 117,14
Rata-rata capaian						**-117,14**

Pertumbuhan investasi adalah peningkatan nilai penanaman modal (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun Penanaman Modal Asing/PMA) dalam suatu wilayah pada periode

tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah serta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi. Data investasi umumnya dihimpun dan dianalisis oleh pemerintah daerah serta lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan instansi perizinan/penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target pertumbuhan investasi tahun 2025 sebesar **15%**, dengan capaian tahun 2024 sebesar **45,04%**.

Namun, realisasi tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan investasi sebesar **-72,1%**, yang berarti telah Terjadi **kontraksi sangat tajam (penurunan 117,14 poin)** dibanding tahun 2024 dengan Capaian **jauh di bawah target (selisih -87,1 poin)**

Kondisi ini mengindikasikan penurunan drastis aktivitas investasi, baik dari sisi jumlah proyek maupun nilai realisasi penanaman modal.

Di Provinsi Sulawesi Barat, tren investasi dalam tiga tahun terakhir umumnya menunjukkan:

- **2023** : pertumbuhan positif seiring pemulihan ekonomi
- 2024 : peningkatan investasi di beberapa sektor unggulan (perkebunan, perdagangan, konstruksi)
- 2025 : cenderung melambat, namun masih **relatif stabil dan tidak mengalami kontraksi ekstrem**

Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, iklim investasi di tingkat provinsi masih cukup terjaga.

Perbandingan antar kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan:

- Kabupaten dengan basis sumber daya alam dan proyek berkelanjutan cenderung memiliki investasi lebih stabil
- Fluktuasi investasi sering terjadi pada daerah yang bergantung pada proyek besar (project-based investment)
- Sebagian besar kabupaten masih mencatat pertumbuhan positif atau perlambatan moderat

Dengan capaian -72,1%, Kabupaten Mamuju mengalami kontraksi terdalam dibanding kabupaten lain di provinsi, yang menunjukkan adanya gangguan signifikan dalam realisasi investasi tahun 2025.

Beberapa kebijakan yang sebelumnya mendorong peningkatan investasi antara lain:

- Penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission)
- Promosi potensi daerah kepada investor
- Pembangunan infrastruktur pendukung investasi

- Fasilitasi UMKM dan pelaku usaha lokal

Kebijakan tersebut berkontribusi pada capaian investasi tinggi di tahun 2024.

Namun demikian, penurunan tajam pada tahun 2025 menunjukkan adanya kelemahan, antara lain:

- Ketergantungan pada investasi skala besar yang bersifat tidak berkelanjutan (one-off projects)
- Kurangnya diversifikasi sektor investasi
- Belum optimalnya tindak lanjut realisasi investasi (investment aftercare)
- Hambatan perizinan teknis di tingkat implementasi
- Keterbatasan kepastian lahan dan infrastruktur pendukung
- Faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi dan kehati-hatian investor

Hal ini menyebabkan investasi tidak stabil dan sangat fluktuatif.

Untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan investasi secara berkelanjutan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan iklim investasi daerah**
    a. Penyederhanaan perizinan yang lebih efektif hingga level teknis
    b. Peningkatan kepastian hukum dan regulasi
2. **Diversifikasi sektor investasi**
    a. Pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata
    b. Mendorong hilirisasi produk lokal
3. **Peningkatan promosi dan kerja sama investasi**
    a. Penyelenggaraan forum investasi daerah
    b. Kerja sama dengan investor nasional dan internasional
4. **Penguatan layanan aftercare investasi**
    a. Pendampingan investor yang sudah masuk
    b. Penyelesaian hambatan operasional secara cepat
5. **Penyediaan infrastruktur dan kawasan siap investasi**
    a. Pengembangan kawasan industri/ekonomi
    b. Peningkatan konektivitas wilayah
6. **Penguatan data dan monitoring investasi**
    a. Integrasi data realisasi investasi secara berkala
    b. Evaluasi proyek investasi berbasis kinerja

Kontraksi pertumbuhan investasi Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 merupakan sinyal serius yang perlu segera ditangani melalui kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Stabilitas dan keberlanjutan investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Tabel III - 16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	**7,15**	4,5	6,99	**64,37**
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	**2,77**	2,05	3,38	**60, 65**
Rata-rata capaian						**75,94**

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, dengan beberapa pemahaman utama yang saling melengkapi. Pertama, kemiskinan sering dikaitkan dengan kekurangan materi, yang mencakup kebutuhan dasar seperti pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dalam pengertian ini, kemiskinan merupakan situasi di mana terjadi kelangkaan barang dan layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Selain itu, kemiskinan juga dipahami sebagai kondisi yang melibatkan kebutuhan sosial, termasuk keterasingan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Aspek ini mencakup akses terhadap pendidikan dan informasi. Keterasingan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan ekonomi karena juga berkaitan dengan masalah politik dan moral, serta tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Pemahaman kemiskinan dalam konteks sosial ini sering dianggap lebih mudah diatasi dibandingkan dengan dimensi materi dan ekonomi.

Pada Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja untuk Indikator Pertama Persentase Penduduk Miskin disebutkan bahwa berdasarkan Data Statistik Kabupaten Mamuju tahun 2025 Realisasi Penduduk Miskin sebesar 6,99 % dari target Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 4,5 % atau Capaian Kinerja sebesar 64,37 %.

Persentase penduduk miskin tahun 2025 di Kabupaten Mamuju adalah 6,99 persen, yang artinya

bahwa sekitar 7 dari setiap 100 penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga menjadi gambaran tingkat kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp378.196 per kapita per bulan. Dengan batas tersebut, jumlah penduduk miskin mencapai 22,48 ribu orang atau sekitar 6,99 persen dari total penduduk.Secara tren, garis kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring perubahan harga dan kebutuhan hidup.

persentase Penduduk miskin dari tahun ke tahun atau lebih tepatnya tiga (3) tahun sebelumnya ternyata Penduduk miskin di kabupaten mamuju mengalami penurunan angka kemiskinan disebutkan bahwa pada tahun 2022 persentase kemiskinan sebesar 7,63 %, untuk tahun 2023 sebesar 7,57 %, dan untuk tahun 2024 sebesar 7,15%. disini dapat kita lihat grafik penurunan angka kemiskinan bahwa di kabupaten mamuju mampu menekan angka kemiskinan penduduknya..

pada tahun 2025 ini persentase penduduk miskin di Kabupaten mamuju masih jauh bila dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Barat untuk persentase penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 10,41 %. hal ini menunjukkan bahwa kabupaten mamuju mampu untuk menekan tingkat kemiskinan pada penduduknya.

pada skala Propinsi Sulawesi Barat yang mencakup enam (6) kabupaten untuk Persentase Penduduk miskin didapatkan bahwa Kabupaten Mamuju berada pada Posisi kedua setelah Kabupaten Pasangkayu yang mampu menekan angka kemiskinannya sebesar 4, 96 %.

Masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata dalam penanggulangannya. Salah satu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Meskipun kenaikan garis kemiskinan tidak selalu menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin, tren ini tetap menjadi indikator penting yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, terutama dalam memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.

Salah satu kebijakan pada kurun waktu 2021sampai dengan tahun 2026 seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di antaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 7,4 % menjadi 4,5 persen selama

tahun 2021 sampai 2025. adapun Program yang dijalankan pemerintah antara lain bantuan/subsidi bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur perdesaan dan sokongan kepada pelaku usaha, termasuk di dalamnya Bantuan Pangan Non Tunai dan BLT UMKM. Selain itu, dilaksanakan juga Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan lainnya, di mana semua program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.

meskipun secara agregat kemiskinan umum menurun, jumlah penduduk yang berada dalam kategori termiskin justru mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Mamuju. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan distribusi bantuan sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan atau terpencil.

Secara garis besarnya Pemerintah kabupaten mamuju telah mengarahkan semua lini sektor dalam hal ini OPD untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan secara tepat sasaran melalui tiga strategi kebijakan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

selain itu pula pemerintah Kabupaten Mamuju juga untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi di tingkat kabupaten mamuju nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan yang berkaitan dengan tiga strategi kebijakan yang telah ditentukan.

pada tahun 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju telah menggelar koordinasi untuk memulai penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) lima tahun ke depan. ini merupakan tindak lanjut dari maksud pengajuan permintaan data kemiskinan dan ketenagakerjaan dari BPS yang akan menjadi dasar perencanaan RPKD.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan persentase dari total angkatan kerja yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Angkatan kerja meliputi individu yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang sudah bekerja, memiliki pekerjaan, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dibagi dalam beberapa kategori, seperti mereka yang aktif mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha, mereka yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi, dan individu yang tidak mencari pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan meskipun belum memulai aktivitas.

Mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka adalah langkah penting dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara. Hal ini membantu pemerintah, peneliti, dan organisasi lainnya untuk memahami sejauh mana lapangan kerja tersedia, ketimpangan dalam akses ke pekerjaan, dan dampak dari kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, data mengenai tingkat pengangguran terbuka juga dapat digunakan untuk merancang program pelatihan dan kebijakan yang bertujuan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di masyarakat.

untuk Indikator kedua pada sasaran strategis 9 yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebutkan ditahun 2025 Realisasi TPT sebesar 3,38 persen dari target Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 2,05 persen atau Capaian Kinerja sebesar 60,65 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja telah bekerja, sehingga kondisi pasar kerja secara umum dapat dikatakan relatif kondusif. disebutkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 sebagian besar telah termasuk dalam angkatan kerja. Secara keseluruhan, sebesar 77,19 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan 22,81 persen lainnya tergolong bukan angkatan kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas penduduk usia produktif di Kabupaten Mamuju telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebesar 86,52 persen penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas tercatat sebagai angkatan kerja, sementara hanya 13,48 persen yang berada di luar angkatan kerja. Tingginya partisipasi laki-laki mencerminkan peran yang dominan dalam aktivitas ekonomi dan pasar kerja. Di sisi lain, partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 67,45 persen, dengan 32,55 persen perempuan masih berada dalam kategori bukan angkatan kerja. Relatif lebih rendahnya partisipasi perempuan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peran domestik, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan kesempatan kerja.

Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 menunjukkan situasi yang cukup baik. Meskipun demikian, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja yang tersedia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju menunjukkan dinamika yang berfluktuasi selama periode 2022- 2024. Pada tahun 2022 jumlah pengangguran mencapai angka tertinggi, yaitu 3,06 %, sedangkan tahun 2024 mencatat angka terendah sebesar 2,77 %. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 2,77 %., jumlah pengangguran kembali meningkat di

tahun 2025 menjadi 3,38 %. Hal ini mengindikasikan diperlukan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Sementara itu, TPT Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan trend kenaikan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Barat. hal ini dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 2025 TPT di Propinsi Sulawesi Barat sebesar 2,86 % yang dimana melampaui capaian TPT Kabupaten Mamuju sebesar 3,38 %. hal ini menunjukkan trend penurunan bagi kabupaten Mamuju dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Barat.

pada tahun 2025 Kabupaten Mamuju menempati urutan atau level Terakhir dari 6 Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Barat ini. yang dimana kabupaten Mamuju Tengah menempati Posisi teratas dengan capaian TPT sebesar 1,58 %, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Pasangkayu sebesar 1,69 %. hal ini disebabkan oleh beberap faktor diantaranya :

1. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, sebagian besar pencari kerja masih didominasi lulusan pendidikan menengah yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai.
2. Keterbatasan akses informasi pasar kerja serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan oleh masyarakat. Meskipun layanan antar kerja telah dilaksanakan, masih terdapat kendala dalam pemutakhiran data pencari kerja dan lowongan kerja secara berkelanjutan.
3. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia aparatur, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pelatihan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pembinaan hubungan industrial. Rasio jumlah pegawai terhadap beban kerja belum sepenuhnya proporsional.
4. Pada bidang transmigrasi, minimnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi serta keterbatasan dukungan sarana dan prasarana di lokasi tujuan transmigrasi menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target penempatan transmigran.
5. Koordinasi lintas sektor dan kemitraan dengan dunia usaha masih perlu diperkuat guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Peran sektor swasta dalam penyediaan kesempatan kerja dan pelatihan berbasis kebutuhan industri masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah kabupaten Mamuju tengah membuat kebijakan yang diperlukan untuk langkah strategis berupa peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, optimalisasi pembinaan hubungan industrial, serta peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan guna mendorong peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Program Padat Karya adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek infrastruktur. Program ini berfokus pada penyerapan tenaga kerja lokal serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

dalam kebijakannya ini, Daerah kabupaten mamuju menyebutkan beberapa analisa Isu strategis yang terjadi di lapangan diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

   Masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini menuntut peningkatan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi.
2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

   Pertumbuhan angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, sehingga diperlukan strategi peningkatan penempatan tenaga kerja.
3. Penguatan Sistem Informasi dan Pelayanan Pasar Kerja

   Optimalisasi layanan antar kerja berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja.
4. Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis

   Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat guna mencegah perselisihan hubungan industrial dan menjamin perlindungan tenaga kerja.
5. Optimalisasi Program Transmigrasi Berbasis Pemberdayaan

   Program transmigrasi perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan melalui dukungan sarana prasarana, pembinaan usaha, dan keberlanjutan ekonomi di lokasi transmigrasi.
6. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan

   Keterbatasan sumber daya manusia aparatur dan dukungan anggaran menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap belum Optimal maka dengan ini daerah Kabupatenb Mamuju akan menindaklanjuti berupa :

1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja daerah.
2. Meningkatkan penempatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Tabel III - 17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Kemandirian Desa

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Desa Membangun	Skala	0,667 **(Berkembang)**	0,700 (Berkembang)	0,636 (Berkembang)	**90,85**
Rata-rata capaian						**90,85**

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM digunakan untuk mengklasifikasikan status desa menjadi sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Indeks ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi, dan disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan target Indeks Desa Membangun tahun 2025 sebesar 0,700, meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar 0,667.

Namun berdasarkan realisasi tahun 2025, IDM tercatat sebesar 0,636, yang berarti Terjadi **penurunan sebesar 0,031 poin** dibanding tahun 2024 dengan Capaian berada **di bawah target (selisih 0,064 poin)**

Penurunan ini menunjukkan adanya pelemahan pada salah satu atau beberapa dimensi ketahanan desa, sehingga mempengaruhi status perkembangan desa secara keseluruhan. namun berdasarkan Penetapkan status setiap desa Kabupaten Mamuju masuk dalam status Berkembang alasannya telah dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa.

Di Provinsi Sulawesi Barat, perkembangan IDM dalam tiga tahun terakhir umumnya menunjukkan tren meningkat:

- **2023** : sekitar 0,65
- **2024** : **sekitar 0,67**
- **2025 : sekitar** 0,68–0,69

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum desa-desa di tingkat provinsi mengalami peningkatan status menuju kategori berkembang dan maju.

Perbandingan antar kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan:

- Beberapa kabupaten mengalami peningkatan IDM secara konsisten karena fokus pada pembangunan desa berbasis potensi lokal
- Kabupaten dengan akses infrastruktur dan layanan dasar yang lebih baik cenderung memiliki IDM lebih tinggi
- Sebagian kabupaten telah mencapai kategori desa maju

Dengan capaian 0,636 pada tahun 2025, Kabupaten Mamuju berada di bawah rata-rata provinsi, yang menunjukkan perlunya penguatan intervensi pembangunan desa dibanding kabupaten lain di wilayah yang sama.

Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan IDM antara lain:

- Penyaluran dana desa dan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan kelembagaan desa
- Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih
- Pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes dan UMKM

Kebijakan ini telah mendorong peningkatan IDM pada periode sebelumnya.

Namun demikian, penurunan IDM pada tahun 2025 mengindikasikan beberapa kendala, antara lain:

- Pemanfaatan dana desa yang belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis prioritas IDM
- Kesenjangan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- Belum meratanya pembangunan antar desa (desa maju vs desa tertinggal)
- Keterbatasan akses ekonomi produktif di desa
- Lemahnya integrasi program lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa

Hal ini menyebabkan capaian IDM belum sesuai target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan IDM secara berkelanjutan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan perencanaan berbasis IDM**
    a. Menjadikan IDM sebagai acuan utama dalam penyusunan program desa
    b. Fokus pada indikator yang mengalami penurunan
2. **Optimalisasi pemanfaatan dana desa**
    a. Prioritas pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi dan sosial
    b. Pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran

3. **Peningkatan kapasitas aparatur desa**
    a. Pelatihan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
    b. Pendampingan desa secara intensif
4. **Pengembangan ekonomi desa**
    a. Penguatan BUMDes dan produk unggulan desa
    b. Akses pasar dan pembiayaan
5. **Pemerataan pembangunan desa**
    a. Intervensi khusus pada desa tertinggal
    b. Peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik
6. **Integrasi program lintas sektor**
    a. Sinergi OPD dalam mendukung pembangunan desa
    b. Kolaborasi dengan stakeholder terkait

Penurunan Indeks Desa Membangun Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 menjadi perhatian penting dalam evaluasi pembangunan daerah. Diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan status desa sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terealisasi sebesar Rp 1.183.765.920.425,29 atau 99,23 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar RP1.192.913.886.727,00. Hal ini bisa dikatakan sebuah pencapaian yang sangat baik, waluapun hanya mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen, setidaknya tren realisasi pendapatan ini masih dapat dipertahankan yaitu sebesar 98,49 persen pada tahun 2024. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.18
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	140.374.957.869,00	140.369.381.549,29	99,99
2	Pendapatan Transfer	1.050.583.075.859,00	1.041.421.148.897,00	99,12
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.955.852.999,00	1.975.389.979,00	100,99
Jumlah		1.192.913.886.727,00	1.183.765.920.425,29	99,23

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

   Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 terdiri dari Pajak Daerah dengan sebesar Rp60.144.135.755,00 atau 113,28 persen, Retribusi Daerah sebesar Rp66.525.294.171,86 atau 90,42 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp4.536.483.987,00 atau 100,06 persen dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp9.163.467.635,43 atau 99,90 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Pajak Daerah	53.091.875.707,00	60.144.135.755,00	113,28
Pendapatan Retribusi Daerah	73.577.023.656,00	66.525.294.171,86	90,41
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.533.776.476,00	4.536.483.987,00	100,05
Lain-lain PAD Yang Sah	9.172.282.030,00	9.163.467.635,43	99,90
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140.374.957.869,00	140.369.381.549,29	99,99

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,2025

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp60.144.135.755,00 atau 113,28 persen. Pencapaian pajak daerah pada tahun 2025 tersebut menunjukkan kinerja yang **sangat baik dengan capaian yang tinggi,** dimana sebagian besar objek pajak menunjukkan peningkatan signifikan walaupun masih terdapat potensi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut.

Objek pajak yang mengalami pelampauan target seperti pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame yang disebabkan meningkatnya aktivitas usaha, bertambahnya wajib pajak baru, serta optimalisasi pemungutan dan pengawasan pajak sehingga realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan. Pajak Parkir melebihi target dikarenakan meningkatnya aktivitas kendaraan pada lokasi usaha yang menyediakan fasilitas parkir serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak parkir. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meningkat akibat tingginya permintaan material untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Pajak Penerangan Jalan

meningkat karena perkembangan sarana prasarana penerangan jalan umum semakin bertambah setiap tahunnya. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melebihi target disebabkan adanya optimalisasi penagihan serta terdapat pembayaran tunggakan pajak. tahun sebelumnya. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang melampaui target disebabkan oleh meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan proses balik nama kendaraan.

Sementara untuk pajak sarang burung walet yang realisasinya sangat kecil dikarenakan populasi walet di Mamuju mengalami penurunan. Selain itu, Objek Pajak yang memiliki realisasi sangat rendah adalah Pajak Air Tanah. Kendala dalam pemungutan pajak ini diantaranya masih banyak badan usaha/industri tidak menggunakan air bawah tanah tetapi menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kemudian Nomor Pajak Air Tanah (NPAT) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat rendah sehingga akumulasi perolehan setoran pajak air tanah juga sangat rendah. Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pajak Hotel	1.702.200.000,00	991.655.575,00	58,25
Pajak Restoran	3.600.000.000,00	4.331.633.934,00	120,32
Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.633.197.320,00	108,87
Pajak Reklame	800.000.000,00	813.060.000,00	101,63
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	216.256.500,00	260.513.077,00	120,46
Pajak Air Tanah	50.000.000,00	4.349.912,00	8,69
Pajak Sarang Burung Walet	62.570.828,00	1.245.000,00	1,98
Pajak Mineral Bukan	2.836.971.457,00	2.891.970.593,00	101,93

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Logam dan Batuan			
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.339.431.404,00	4.309.040.214,00	129,03
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.571.491.600,00	5.546.771.338,00	99,55
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17.200.000.000,00	16.018.682.818,00	93,13
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.241.528.037,00	12.068.121.303,00	130,58
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.971.425.881,00	11.273.894.671,00	161,71
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	**53.091.875.707,00**	**60.144.135.755,00**	**113,28**

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp66.525.294.171,86 atau 90,41 persen dari target Rp73.577.023.656,00. Secara umum, retribusi mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya tetapi kinerja terbilang sangat rendah karena hampir seluruh objek retribusi tidak mencapai target. Hanya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dapat dikategorikan tinggi, yang merupakan pendapatan yang dihasilkan dari klaim pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah dan seluruh puskesmas dari BPJS Kesehatan hasil dari penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

Objek retribusi yang tidak dapat dipungut yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak terdapat realisasi karena Dinas Perdagangan telah merealisasikannya pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Selanjutnya untuk Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) juga tergolong rendah, karena jumlah pemotongan hewan per hari di RPH sangat sedikit, bahkan aktivitas pemotongan

hewan tidak dilakukan setiap hari. Selain itu, kendala di lapangan yang ditemukan oleh Bidang Peternakan sebagai leading sector retribusi ini yaitu adanya pemotongan diluar RPH oleh pedagang walaupun telah dilakukan pembinaan agar pemotongan tersebut bisa dilakukan di RPH. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan pemotongan hewan di RPH mengakibatkan rendahnya realisasi retribusi RPH ini. Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2025

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi jasa umum				
	a	Retribusi pelayanan kesehatan	63.922.478.800,00	63.631.732.621,86	99,54
	b	Retribusi pelayanan persampahan / Kebersihan	3.000.000.000,00	1.349.500.000,00	44,98
	c.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	177.200.000,00	17,72
	d.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	109.650.000,00	34.975.000,00	31,89
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	650.000.000,00	0,00	0,00
	c.	Retribusi Rumah Potong Hewan	51.600.000,00	24.780.000,00	48,02
	d.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	153.200.000,00	61,28
	e	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	750.000.000,00	564.215.000,00	75,22
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.843.294.856,00	589.691.550,00	15,34
Jumlah Retribusi Daerah			**73.577.023.656,00**	**66.525.294.171,86**	**90,41**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp4.536.483.987,00 atau 100,05 persen. Pendapatan ini merupakan deviden atau bagian laba yang diterima dari penyertaan modal kepada Bank Sulselbar.

Perolehan Laba pada Bank Sulselbar cukup baik sehingga mempengaruhi pembagian deviden kepada pemilik modal termasuk Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sementara itu, PDAM Tirta Manakarra Mamuju sebagai BUMD yang modalnya bersumber dari Pemerintah Daerah pada tahun 2025 tidak menyetorkan bagian laba ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju karena cakupan layanan belum mencapai ketentuan sebagai kategori PDAM yang wajib menyetor deviden ke Pemerintah Daerah yaitu sebesar 80% walaupun memperoleh laba di tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp 9.163.467.635,43atau 99,90 persen dari target. Lain- lain PAD Yang Sah merupakan komponen Sumber PAD yang tidak termasuk dalam kategori Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Jenis Lain-lain PAD Sah yang melebihi target antara lain Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dan Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Selain itu, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembalian dari temuan pemeriksaan yang sebagian besar berasal dari temuan pemeriksa BPK atas LKPD tahun 2024. Rincian pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel III.22
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	10.207.500,00	1,02
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	280.000.000,00	81.900.000,00	29,25
3	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.009.454.208,00	150,47
4	Pendapatan Bunga	0,00	3.800.066,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	0,00	13.050.000,00	0,00

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Daerah			
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	100.000.000,00	419.028.181,00	419,02
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	2.120.492.053,45	706,83
8	Pendapatan Dari Pengembalian	5.492.282.030,00	3.505.535.626,98	63,82
9	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**9.172.282.030,00**	**9.163.467.635,43**	**99,90**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2025

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp 1.041.421.148.897,00 atau 99,12 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.23
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025

No	Uraian			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak					
	a.	Bagi Hasil Pajak				
		1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.435.533.000,00	2.618.751.700,00	107,52
		2	DBH PPh Pasal 21	9.201.992.000,00	8.657.272.300,00	94,08
		3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPDN	0,00	133.314.500,00	0.00
Jumlah Bagi Hasil Pajak				**11.637.525.000,00**	**11.409.338.500,00**	**98,03**
	b.	Bagi Hasil Bukan Pajak				
		1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	968.684.000,00	13.781.000,00	1,42
		2	Dana Bagi Hasil	0,00	1.968.082.000,00	0,00

No	Uraian			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			(DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty			
		3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	24.686.000,00	1.000,00	0,00
		4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.670.407.000,00	2.670.407.000,00	100,00
		5	DBH Sawit	2.599.116.000,00	2.599.116.000,00	0,00
Jumlah Bagi HasilBukan Pajak				**6.262.893.000,00**	**7.251.387.000,00**	**115,78**
2	Dana Alokasi Umum			658.030.176.000,00	666.137.365.526,00	101,23
3	Dana Alokasi Khusus			241.757.933.407,00	231.333.104.153,00	95,69
4	Dana Desa			83.531.164.000,00	79.493.477.356,00	95,16
5	Insentif Fiskal			6.922.089.000,00	6.922.089.000,00	0,00
6	Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi			37.141.295.452,00	34.824.387.362,00	93,76
7	Bantuan Keuangan			5.300.000.000,00	4.050.000.000,00	76,42
Jumlah Pendapatan Transfer				**1.050.583.075.859,00**	**1.041.421.148.897,00**	**99,13**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2025 sebesar Rp1.975.389.979,00 atau 101,00 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Lainnya bersumber dari pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah yaitu pengembalian sisa belanja hibah yang disalurkan pada tahun sebelumnya.

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp1.158.709.499.573,85 atau tercapai 94,06 persen. Secara ringkas, Belanja dan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.24
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	545.725.075.754,44	512.964.182.297,75	93,99
2	Belanja Barang Jasa	308.192.496.920,00	292.045.032.593,10	94,76
3	Belanja Hibah	15.897.288.163,00	15.011.943.186,00	94,43
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		**869.814.860.837,44**	**820.021.158.076,85**	**94,27**
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Tanah	270.285.000,00	270.258.280,00	99,99
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	46.929.723.344,00	41.153.521.950,00	87,69
3	Belanja Modal Gedung Bangunan	100.586.100.988,00	97.280.857.168,00	96,71
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan	52.467.458.576,00	43.232.420.546,00	82,39
5	Belanja Modal	3.838.818.500,00	3.576.453.308,00	93,16
	Aset Tetap Lainnya	228.277.200,00	221.829.000,00	97,17
6	Belanja Modal Aset Lainnya	270.285.000,00	270.258.280,00	99,99
Jumlah BelanjaModal		**204.320.663.608,00**	**185.735.340.252,00**	**90,90**
Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	680.000.000,00	109.293.041,00	16,07
Jumlah Belanja Tak Terduga		**680.000.000,00**	**109.293.041,00**	**16,07**
Transfer Bantuan Keuangan				
1	Bagi Hasil	5.994.642.057,00	5.451.939.679,00	90,94
2	Bantuan Keuangan	151.064.311.800,00	147.391.768.525,00	97,56

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**157.058.953.857,00**	**152.843.708.204,00**	**97,31**
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah		**1.231.874.478.302,44**	**1.158.709.499.573,85**	**94,06**

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Anggaran Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1.231.874.478.302,44 kenaikan belanja tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi, Belanja Dana Kapitasi FKTP, Belanja BLUD, dan belanja atas penggunaan SiLPA tahun 2025. Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada Belanja Operasi mengalami perubahan pada: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada Belanja Modal mengalami perubahan pada: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan; Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset tetap lainnya

b. b.Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp38.960.591.575,44 dan terealisasi sebesar Rp38.930.409.326,29 atau 99,92 persen. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan daerah, dimana tidak dilakukan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, sehingga realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Dengan demikian, pembiayaan netto daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebesar Rp38.930.409.326,29 atau 99,92 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari realisasi pembiayaan tersebut, serta setelah memperhitungkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp63.986.830.177,73 yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.25
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	**Penerimaan Pembiayaan**				
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	38.960.591.575,44	38.930.409.326,29	99,92
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			38.960.591.575,44	38.930.409.326,29	99,92
2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
	a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto			38.960.591.575,44	38.930.409.326,29	99,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			0,00	63.986.830.177,73	0,00

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2024

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju selama tahun 2025, media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan Keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran kinerja daerah tahun 2025, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun berjalan. Di samping dikemukakan Gambaran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahn yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 18,18 persen bermakna Baik Sekali, 12 indikator sasaran atau 54,55 persen bermakna Baik, 1 indikator sasaran atau 4,55 persen bermakna Cukup, 4 indikator sasaran atau 22,72 persen bermakna Kurang. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 79,53 persen.

Adapun indikator sasaran yang telah mencapai kinerja dengan kategori Sangat Baik, Baik dan Cukup akan tetap dipertahankan serta ditingkatkan pada periode berikutnya. Sementara itu, terhadap indikator sasaran dengan capaian kinerja kategori Kurang akan dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Berikut indikator sasaran yang termasuk dalam kategori Kurang, antara lain:

1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)

   Pada indikator Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil (Daya Beli) realisasi kinerja tahun 2025 masih jauh dari target meskipun menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 10,440 Ribu Rupiah/Orang/Tahun pada tahun 2024 menjadi 10.682 Ribu Rupiah/Orang/Tahun pada tahun 2025, dengan target sebesar 44.000 Ribu Rupiah/Orang/Tahun, sehingga capaian kinerja sebesar 24,27 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran yang belum signifikan, perubahan pola konsumsi ke kebutuhan dasar, serta

ketimpangan antar wilayah. Upaya perbaikan diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kualitas SDM, pengembangan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan wilayah.

2. Indeks Gini

Hasil pengukuran Indeks Gini menunjukkan terdapat perbaikan dari 0,425 pada tahun 2024 menjadi 0,401 pada tahun 2025, capaian tersebut masih belum memenuhi target 0,20, dengan capaian kinerja sebesar 49,87 persen. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah, ketergantungan sektor tertentu, kesenjangan akses kerja produktif, serta program sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Strategi yang dilakukan meliputi penguatan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, perbaikan targeting program sosial, serta penguatan monitoring berbasis data.

3. Pertumbuhan Investasi

Pada indikator Pertumbuhan Investasi capaian tahun 2025 menunjukkan kontraksi signifikan dari tahun 2024 capaian sebesar 45,04, pada tahun 2025 menjadi -7,21, jauh dari target 15, sehingga capaian kinerja sebesar -117,14 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketergantungan pada investasi skala besar yang tidak berkelanjutan, kurangnya diversifikasi sektor, belum optimalnya tindak lanjut realisasi investasi (*investment aftercare*), serta hambatan perizinan dan faktor eksternal. Upaya perbaikan diarahkan pada penguatan iklim investasi, diversifikasi sektor unggulan, peningkatan promosi dan kerja sama investasi, penguatan layanan aftercare investasi, serta penyediaan infrastruktur dan sistem monitoring investasi.

B. **Strategi peningkatan kinerja**

Adapun rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kinerja pemerintah kabupaten mamuju kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan dan penajaman dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, khususnya dalam perumusan indikator kinerja sehingga lebih konsisten dan dapat diturunkan dalam manajeman kinerja ke tingkat perangkat daerhah.
2. Melaksanakan optimalisasi secara terstruktur dan berkelanjutan, melalui:
   - Perbaikan kualitas pelaporan kinerja, melalui penyajian data yang sesuai ketentuan serta dilengkapi dengan analisis penyebab capaian dan langkah korektif;
   - Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penajaman program prioritas;
   - Penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan memastikan rekomendasi yang diberikan bersifat solutif dan mendorong peningkatan kinerja;

- Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala, guna memastikan perbaikan kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju. Diharapkan laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan.

Melalui komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

L A M P I R A N

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Ahmad Kirang No. 39 Mamuju Kode Pos 91511Sulawesi Barat
Website: inspektorat.mamujukab.go.id,
e-mail : inspektoratmamujumedia@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kabupaten Mamuju.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak ditemukan kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja.

Mamuju, 26 Maret 2026
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Dr. MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE., CGRE., QGIA.
NIP. 197409151999031007

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	100
2	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat (PERINGKAT)	Baik (B/PERLU PERBAIKAN	Baik	B	100
3	Nilai LPPD	Skor	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	75,29
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	76,74	90	73,10	81.22
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	78	80	79	98,75
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	82	80	76	95
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	74,66	78,22	84,77	108,37
8	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	100
9	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	71,86	68,85	72,77	105,69
10	Indeks Pendidikan	Skala	0,64	0,50	0,65	130,00
11	Indeks Kesehatan	Skala	0,802	0,612	0,809	132,19
12	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	10,440	44,000	10.682	24,27
13	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,96	60,12	60,61	100,81
14	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	77	70	55,41	79,15
15	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	99,65	100	99,51	99,51
16	Indeks Kriminilitas	Persen	99,65	100	0.49	99,51
17	Indeks Gini	Persen	0,425	0,20	0,401	49,87
18	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,47	5.7- 5.8%	4,07	71,40
19	Pertumbuhan Investasi	Persen	45,04	15	-72,1	-117,14
20	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,15	4,5	6,99	64,37
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.77	2,05	3,38	60,65
22	Indeks Desa Membangun	Skala	0,667 (berkembang)	0,700 (berkembang)	0,636 (berkembang)	90,85

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, Maret 2026

BUPATI MAMUJU

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KABUPATEN MAMUJU

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Peringkat	Baik
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	90
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	90
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	78,49
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	69,05
	Indeks Pendidikan	Skala	0,55
	Indeks Kesehatan	Skala	0,632
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	52.000
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,55
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	75
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
	Indeks Kriminilitas	Persen	100
Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Persen	0,19
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.8 - 6.0%
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,707 (Berkembang)

BUPATI MAMUJU

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	(%)	REALISASI TA 2024	
1	**PENDAPATAN**	**5.1.1**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.a.**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	53,091,875,707.00	60,144,135,755.00	113.28	35,895,343,293.59	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	73,577,023,656.00	57,890,960,673.96	78.68	9,538,274,070.00	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	4,533,776,476.00	4,536,483,987.00	100.06	4,270,328,840.00	
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.a.4)	9,172,282,030.00	9,163,467,635.43	99.90	41,822,611,982.84	
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3 s/d 6)**		**140,374,957,869.00**	**131,735,048,051.39**	**93.85**	**91,526,558,186.43**	11.21%
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.b**					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)					
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)a)	11,637,525,000.00	11,409,338,500.00	98.04	9,405,871,000.00	
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)b)	6,262,893,000.00	7,251,387,000.00	115.78	8,567,069,000.00	
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1)c)	658,030,176,000.00	666,137,365,526.00	101.23	657,413,682,000.00	
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1)d)	241,757,933,407.00	231,333,104,153.00	95.69	279,544,758,680.00	
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13)**		**917,688,527,407.00**	**916,131,195,179.00**	**99.83**	**954,931,380,680.00**	
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2)					
16	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	#DIV/0!	-	
17	Dana Desa		83,531,164,000.00	79,493,477,356.00	95.17	86,323,445,000.00	
18	Insentif Fiskal		6,922,089,000.00	6,922,089,000.00	100.00	6,951,678,000.00	
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)**		**90,453,253,000.00**	**86,415,566,356.00**	**95.54**	**93,275,123,000.00**	
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)					
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)a)	37,141,295,452.00	34,824,387,362.00	93.76	48,895,606,847.00	
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (21)**		**37,141,295,452.00**	**34,824,387,362.00**	93.76	**48,895,606,847.00**	
23	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.4)					
24	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4)a)	5,300,000,000.00	4,050,000,000.00	76.42	-	
25	**Jumlah Bantuan Keuangan (23)**		**5,300,000,000.00**	**4,050,000,000.00**	**76.42**	**-**	
26	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 19 +22 + 25)**		**1,050,583,075,859.00**	**1,041,421,148,897.00**	**99.13**	**1,097,102,110,527.00**	88.62%
27	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	5.1.1.c					
28	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	-	-	#DIV/0!	-	
29	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2)	1,955,852,999.00	1,975,389,979.00	101.00	16,704,519,461.00	
30	**Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s/d 28)**		**1,955,852,999.00**	**1,975,389,979.00**	**101.00**	**16,704,519,461.00**	0.17%
31	**TOTAL PENDAPATAN (7 + 26 + 30)**		**1,192,913,886,727.00**	**1,175,131,586,927.39**	**98.51**	**1,205,333,188,174.43**	
32	**BELANJA**	**5.1.2**					
33	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.a					
34	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	545,725,075,754.44	512,976,732,156.75	94.00	499,773,175,745.00	
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	308,192,496,920.00	289,637,261,769.00	93.98	334,933,489,676.18	
36	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	15,897,288,163.00	12,013,690,186.00	75.57	55,545,798,724.00	
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	-	-	#DIV/0!	570,000,000.00	
38	**JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s/d 37)**		**869,814,860,837.44**	**814,627,684,111.75**	**93.66**	**890,822,464,145.18**	
39	**BELANJA MODAL**	5.1.2.b					
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	270,285,000.00	270,258,280.00	99.99	22,065,760.00	
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	46,929,723,344.00	41,033,018,885.00	87.44	39,344,374,182.00	
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	100,586,100,988.00	97,280,857,168.00	96.71	88,727,406,636.00	
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	52,467,458,576.00	43,232,420,546.00	82.40	74,435,307,687.00	
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	3,838,818,500.00	3,307,349,708.00	86.16	1,429,190,000.00	
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	228,277,200.00	221,829,000.00	97.18	10,000,000.00	
46	**JUMLAH BELANJA MODAL (40 s/d 45)**		**204,320,663,608.00**	**185,345,733,587.00**	**90.71**	**203,968,344,265.00**	
47	**BELANJA TAK TERDUGA**						
48	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	680,000,000.00	109,293,041.00	16.07	175,006,800.00	
49	**JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48)**		**680,000,000.00**	**109,293,041.00**	**16.07**	**175,006,800.00**	
50	**TOTAL BELANJA (38 + 46 +49)**		**1,074,815,524,445.44**	**1,000,082,710,739.75**	**93.05**	**1,094,965,815,210.18**	
51	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	5.1.2.d					
52	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	5,994,642,057.00	5,451,939,679.00	90.95	4,294,845,635.00	
53	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	151,064,311,800.00	147,391,768,525.00	97.57	152,200,050,200.00	
54	**JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (52 s/d 53)**		**157,058,953,857.00**	**152,843,708,204.00**	**97.32**	**156,494,895,835.00**	
55	**TOTAL TRANSFER (54)**		**157,058,953,857.00**	**152,843,708,204.00**	**97.32**	**156,494,895,835.00**	
56	**TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)**		**1,231,874,478,302.44**	**1,152,926,418,943.75**	**93.59**	**1,251,460,711,045.18**	
57	**SURPLUS / (DEFISIT) (31 - 56)**	5.1.3	**(38,960,591,575.44)**	**22,205,167,983.64**	**(56.99)**	**- 46,127,522,870.75**	
58	**PEMBIAYAAN**						
59	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4**					
60	Penggunaan SiLPA	5.1.4.a	38,960,591,575.44	38,930,409,326.29	99.92	85,088,114,446.04	
61	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60)**		**38,960,591,575.44**	**38,930,409,326.29**	**99.92**	**85,088,114,446.04**	
62	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.5**					
63	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.a	-	-	0.00	-	
64	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (63)**		**-**	**-**	**0.00**	**-**	
65	**PEMBIAYAAN NETTO (61 - 64)**	**5.1.6**	**38,960,591,575.44**	**38,930,409,326.29**	**99.92**	**85,088,114,446.04**	
66	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57 + 65)**	**5.1.7**	**0.00**	**61,135,577,309.93**		**38,960,591,575.29**	

Mamuju, Mei 2025

Bupati Mamuju,

Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si.

" Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini "

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																
Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Predikat**	C	CC	**210.093.524.365**	B	**215.347.003.322**	B	**220.712.506.253**	BB	**226.207.992.375**	A	**234.126.503.778**	A	**1.106.487.530.093**	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	**Indeks Pengelolaan keuangan Daerah**	**Predikat**	**Baik**	**Baik**	**161.213.730.314**	**Baik**	**165.244.073.574**	**Baik**	**169.375.175.410**	**Baik**	**173.609.554.795**	**Baik**	**177.949.793.669**	**Baik**	**847.392.327.762**	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100	100	31.761.440.701	100	32.555.476.719	100	33.369.363.636	100	34.203.597.727	100	35.058.687.671	100	166.948.566.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	31.761.440.701	100	32.555.476.719	100	33.369.363.636	100	34.203.597.727	100	35.058.687.671	100	166.948.566.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100	100	31.761.440.701	100	32.555.476.719	100	33.369.363.636	100	34.203.597.727	100	35.058.687.671	100	166.948.566.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100	100	31.761.440.701	100	32.555.476.719	100	33.369.363.636	100	34.203.597.727	100	35.058.687.671	100	166.948.566.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	31.761.440.701	100	32.555.476.719	100	33.369.363.636	100	34.203.597.727	100	35.058.687.671	100	166.948.566.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		

	Outome)		RPJMD	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Admnistrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85	85	1.189.496.389	85	1.219.233.799	85	1.249.714.644	85	1.280.957.510	85	1.312.981.448	85	6.252.383.790	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7.04	7.04	608.515.210	7.04	623.728.090	7.04	639.321.293	7.04	655.304.325	7.04	671.686.933	7.04	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen	(0.87)	(0.87)	608.515.210	(0.87)	623.728.090	(0.87)	639.321.293	(0.87)	655.304.325	(0.87)	671.686.933	(0.87)	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Nilai LPPD	**Skor**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**34.666.090.159**	**Sangat Tinggi**	**35.533.883.257**	**Sangat Tinggi**	**36.403.380.067**	**Sangat Tinggi**	**37.291.833.112**	**Sangat Tinggi**	**38.275.794.622**	**Sangat Tinggi**	**182.170.981.217**	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	633.162.495	100	661.353.263	100	670.367.647	100	676.937.250	100	757.080.363	100	3.398.901.018	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Persen	100	100	259.777.250	100	262.323.067	100	264.893.833	100	267.489.793	100	270.111.193	100	1.324.595.136	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	100	233.364.200	100	235.651.169	100	237.960.551	100	240.292.564	100	242.647.431	100	1.189.915.915	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Persen	100	100	245.073.104	100	247.474.820	100	249.900.074	100	252.349.094	100	254.822.115	100	1.249.619.207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Rasio	8.15	9	32.000.000	9.95	32.800.000	10	33.620.000	10	34.460.500	10	35.322.013	10	168.202.513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk kepentingan Negara	Rasio	N/A	50	50.000.000	70	51.250.000	80	52.531.250	90	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 26/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	70	37.327.000	80	38.260.175	90	39.216.679	90	40.197.096	100	41.202.024	100	196.202.974	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	**Predikat**	Memuaskan	Memuaskan	27.472.866.110	Memuaskan	28.159.708.263	Memuaskan	28.863.700.969	Memuaskan	29.585.293.494	Memuaskan	30.324.925.831	Memuaskan	144.406.514.667	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	80	83	402.500.000	85	412.562.500	90	422.876.563	95	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100	402.500.000	100	412.562.500	100	422.876.563	100	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	**Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)**	**Satuan**	**Kondisi Kinerja Awal RPJMD**	**Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**										**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD**		**Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
				Tahun 2022		**Tahun 2023**		**Tahun 2024**		**Tahun 2025**		**Tahun 2026**				
				Target	**Rp.**	**Target**	**Rp.**	**Target**	**Rp.**	**Target**	**Rp.**	**Target**	**Rp.**	**Target**	**Rp.**	
1	**2**	**3**	**4**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	Persen	100	100	345.000.000	100	353.625.000	100	362.465.625	100	371.527.266	100	380.815.447	100	1.813.433.338	INSPEKTORAT DAERAH

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Prosentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.250.000	100	430.756.250	100	441.525.156	100	2.102.531.406	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	35.6	2.0	1.622.500.000	2.1	1.663.062.500	1.9	1.704.639.063	2.3	1.747.255.039	2.0	1.790.936.415	2.0	8.528.393.017	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkat Kompetensinya	Persen	6.2	11.0	2.530.000.000	11.0	2.593.250.000	11.0	2.658.081.250	11.0	2.724.533.281	11.0	2.792.646.613	11.0	13.298.511.144	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Skor**	**80**	**90**	**14.213.703.892**	**90**	**14.569.046.491**	**90**	**14.933.950.776**	**90**	**15.306.604.468**	**90**	**17.900.915.487**	**90**	**76.924.221.114**	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	200.000.000	100	822.877.344	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	5.025.113.000	100	5.150.740.825	100	5.279.509.346	100	5.411.497.079	100	7.357.267.943	100	28.224.128.193	SEKRETARIAT DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100	522.894.882	100	535.967.254	100	549.366.435	100	563.100.596	100	765.570.397	100	2.936.899.564	SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100	100	495.000.000	100	507.375.000	100	520.059.375	100	533.060.659	100	724.729.500	100	2.780.224.734	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100	100	314.543.998	100	322.407.598	100	330.467.788	100	338.729.483	100	347.197.720	100	1.653.346.587	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100	158.272.950	100	162.229.774	100	166.285.518	100	170.442.656	100	174.703.722	100	831.934.620	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100	100	814.225.998	100	834.581.648	100	855.446.189	100	876.832.344	100	898.753.152	100	4.279.839.331	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100	193.686.900	100	198.529.073	100	203.492.299	100	208.579.607	100	213.794.097	100	1.018.081.976	SEKRETARIAT DAERAH

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	91	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang teleh menerapakan layanan SPBE	Persen	31	67	2.983.797.600	78	3.058.392.540	89	3.134.852.354	100	3.213.223.662	100	3.293.554.254	100	15.683.820.410	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	N/A	50	500.000.000	75	512.500.000	100	525.312.500	100	538.445.313	100	551.906.445	100	2.628.164.258	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	31	184.501.115	44	189.113.643	56	193.841.484	67	198.687.521	89	203.654.709	89	969.798.472	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	715.000.000	100	732.875.000	100	751.875.000	100	769.976.797	100	789.226.217	100	3.758.953.014	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang ditorbitkan	Persen	100	100	443.000.000	100	454.075.000	100	465.426.875	100	477.062.547	100	488.989.111	100	2.328.553.533	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	313.056.522	100	320.882.935	100	328.905.008	100	337.127.634	100	345.555.824	100	1.645.527.923	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	34.533.927	100	35.397.275	100	36.282.207	100	37.189.262	100	38.118.994	100	181.521.665	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan																
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**Persen**	**N/A**	**50**	**167.359.411.907**	**60**	**171.573.397.206**	**70**	**176.237.732.134**	**80**	**180.643.675.442**	**90**	**185.159.767.328**	**90**	**880.973.984.017**	
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	**Persen**	**N/A**	**50**	**149.552.017.546**	**60**	**153.320.817.986**	**70**	**157.528.838.434**	**80**	**161.467.059.397**	**90**	**165.503.735.883**	**90**	**787.372.469.246**	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	persen	73.1	82.1	7.786.707.311	86.6	7.981.374.994	91.1	8.180.909.369	95.6	8.385.432.103	100	8.595.067.906	100	40.929.491.683	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	persen	N/A	N/A	0	30	1.000.000.000	35	1.090.000.000	40	1.180.000.000	45	1.280.000.000	45	4.550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yangmemperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	60	70	2.629.974.900	75	2.695.724.273	80	2.763.117.379	85	2.832.195.314	90	2.903.000.197	90	13.824.012.063	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	21.49	27.49	1.328.925.100	30.49	1.362.148.228	33.49	1.396.201.933	36.49	1.431.106.982	39.49	1.466.884.656	39.49	6.985.266.899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrasturktur jalan permukiman kondisi baik	persen	30	44	6.643.155.225	50	6.809.234.106	56	6.979.464.958	62	7.153.951.582	68	7.332.800.372	68	34.918.606.243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	24.30	26.10	18.789.537.550	27.10	19.259.275.989	28.10	19.740.757.889	19.10	20.234.276.836	30.10	20.740.133.757	30.10	98.763.982.021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	persen	10.30	39.90	240.300.000	53.90	246.307.500	68.80	252.465.188	83.70	258.776.817	98.60	265.246.238	98.60	1.263.095.743	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	48.72	54.72	80.000.000.000	57.72	81.000.000.000	60.72	82.960.000.000	63.72	84.971.250.000	66.72	87.025.031.250	66.72	415.956.281.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	10	20	191.604.150	25	196.394.254	30	201.304.110	35	206.336.713	40	211.495.131	40	1.007.134.358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	persen	9	9	900.000.000	18	922.500.000	27	1.320.562.500	36	1.353.576.563	45	1.387.415.977	45	5.884.055.040	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100	100	11.400.000.000	100	11.685.000.000	100	11.977.125.000	100	12.276.553.125	100	12.583.466.953	100	59.922.145.078	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.64	49.64	930.000.000	49.49	953.250.000	49.35	977.081.250	49.22	1.001.508.281	49.10	1.026.545.988	246.8	4.888.385.519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman yang tertata	persen	10.13	14.89	1.550.000.000	14.85	1.588.750.000	15.79	1.628.468.750	16.24	1.669.180.469	16.69	1.710.909.980	78.46	8.147.309.199	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	78	80	3.500.000.000	80	3.587.500.000	80	3.677.187.500	80	3.769.117.188	80	3.863.345.117	80	18.397.149.805	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	persen	N/A	30	10.000.000	40	10.250.000	45	10.506.250	50	10.768.906	55	11.038.129	55	52.563.285	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	hektar	N/A	45	22.000.000	50	22.550.000	55	23.113.750	60	23.691.594	65	24.283.884	65	115.639.228	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	persen	N/A	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	hektar	85	86	3.250.000.000	87	3.331.250.000	88	3.414.531.250	89	3.499.894.531	90	3.587.391.895	90	17.083.067.676	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	N/A	87	75.000.000	88	76.875.000	89	78.796.875	90	80.766.797	91	82.785.967	91	394.224.639	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	N/A	N/A	0	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	124.575.469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	250.000.000	100	256.250.000	100	262.656.250	100	269.222.656	100	275.953.223	100	1.314.082.129	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**Persen**	**N/A**	**80**	**13.897.394.361**	**80**	**14.244.829.220**	**80**	**14.600.949.950**	**80,5**	**14.965.973.701**	**80,6**	**15.340.123.043**	**80,6**	**73.049.270.275**	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	100	257.567.000	100	264.006.175	100	270.606.329	100	277.371.488	100	284.305.775	100	1.353.856.767	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	persen	N/A	50	205.000.000	55	210.125.000	60	215.378.125	65	220.762.578	70	226.281.643	70	1.077.547.346	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	persen	0.01	0.01	4.860.000.000	0.01	4.981.500.000	0.01	5.106.037.500	0.01	5.233.688.438	0.01	5.364.530.648	0.01	25.545.756.586	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	persen	N/A	100	125.000.000	100	128.125.000	100	131.328.125	100	134.611.328	100	137.976.611	100	657.041.064	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	82	150.000.000	84	153.750.000	86	157.593.750	88	161.533.594	90	165.571.934	90	788.449.278	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persen	N/A	100	50.000.000	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	74	73	8.169.827.361	72	8.374.073.045	71	8.583.424.871	70	8.798.010.493	72	9.017.960.755	72	42.943.296.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Indeks Resiko Bencana	**Predikat**	**Tinggi**	**Tinggi**	**3.910.000.000**	**Tinggi**	**4.007.750.000**	**Sedang**	**4.107.943.750**	**Sedang**	**4.210.642.344**	**Sedang**	**4.315.908.402**	**Sedang**	**20.552.244.496**	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	50	55	3.910.000.000	60	4.007.750.000	65	4.107.943.750	70	4.210.642.344	80	4.315.908.402	80	20.552.244.496	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.																
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Persen**	**68,15**	**68,35**	**320.217.652.766**	**68,5**	**328.299.499.083**	**68,7**	**336.380.891.557**	**68,85**	**344.766.812.850**	**69,05**	**353.362.394.324**	**69,05**	**1.683.027.250.580**	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				

	Outome)		RPJMD	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	**Indeks Pendidikan**	**Skala**	**0,26**	**0,3**	**129.081.460.311**	**0,36**	**132.384.901.817**	**0,42**	**135.568.429.361**	**0,5**	**138.934.045.099**	**0,55**	**142.383.801.223**	**0,55**	**678.352.637.811**	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	48.30	50.72	105.038.435.535	53.25	107.664.396.423	55.91	110.356.006.334	58.71	113.114.906.492	61.64	115.942.779.155	61.64	552.116.523.939	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	2500 Paket	3000 Paket	82.500.000	3500 Paket	84.562.500	4000 Paket	86.676.563	4500 Paket	88.843.477	5000 Paket	91.064.563	20.000 Paket	433.647.103	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20 Rasio	1:20 Rasio	16.819.264.088	1:20 Rasio	17.339.745.690	1:20 Rasio	17.670.739.332	1:20 Rasio	18.112.507.816	1:20 Rasio	18.565.320.511	1:20 Rasio	88.507.577.437	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	63.39	63.89	150.000.000	64.39	153.750.000	64.89	157.593.750	65.39	161.533.594	65.89	165.571.934	65.89	788.449.278	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	12.32	12.82 Persen	857.999.998	13.32 Persen	879.449.998	13.82 Persen	901.436.248	14.32 Persen	923.972.154	14.82 Persen	947.071.458	14.82 Persen	4.509.929.856	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4 Prestasi	5 Prestasi	447.700.000	6 Prestasi	458.892.500	7 Prestasi	470.364.812	8 Prestasi	482.123.933	8 Prestasi	494.177.031	34 Prestasi	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	6 Orang	7 Orang	447.700.000	8 Orang	458.892.500	9 Orang	470.364.812	10 Orang	482.123.933	10 Orang	494.177.031	44 Orang	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50.75	51.25 Persen	447.700.000	51.75 Persen	458.892.500	52.25 Persen	470.364.812	52.75 Persen	482.123.933	53.25 Persen	494.177.031	53.25 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	38.87	39.37 Persen	447.700.000	39.87 Persen	458.892.500	40.37 Persen	470.364.812	40.87 Persen	482.123.933	41.37 Persen	494.177.031	41.37 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase serpras olahraga yang layak	Persen	0.05	0.06 Persen	447.700.000	0.07 Persen	458.892.500	0.07 Persen	470.364.812	0.08 Persen	482.123.933	0.08 Persen	494.177.031	0.08 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi keperamukaan	Orang	0 Orang	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	4.718.999.990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:18 Rasio	1:18 Rasio	712.740.173	1:17 Rasio	730.558.677	1:16 Rasio	748.822.644	1:15 Rasio	767.543.210	1:14 Rasio	786.731.790	1:14 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:20.000 Rasio	1:20.000 Rasio	712.740.173	1:19.000 Rasio	730.558.677	1:18.000 Rasio	748.822.644	1:17.000 Rasio	767.543.210	1:16.000 Rasio	786.731.790	1:16.000 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	orang	0.21	0.21	712.740.173	0.21	730.558.677	0.21	748.822.644	0.21	767.543.210	0.21	786.731.790	0.21	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	prestasi	10	10	712.740.173	11	730.558.677	12	748.822.644	13	767.543.210	14	786.731.790	14	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	orang	100	100	100.000.000	100	102.500.000	100	105.062.500	100	107.689.063	100	110.381.289	100 Persen	525.632.852	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Indeks Kesehatan	**Skala**	**0,508**	**0,522**	**181.292.086.187**	**0,556**	**185.824.388.341**	**0,578**	**190.469.998.049**	**0,612**	**195.231.747.998**	**0,632**	**200.112.541.702**	**0,632**	**952.930.762.277**	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	8.3	100	133.618.065.166	100	136.958.641.796	100	140.382.732.840	100	143.892.426.161	100	147.489.861.815	100	702.341.727.778	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100	100	36.932.424.796	100	37.855.735.416	100	38.802.128.801	100	39.772.182.021	100	40.766.486.572	100	194.128.957.606	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Jumlah	25	30	1.942.974.000	40	1.991.548.350	60	2.041.337.059	80	2.092.370.485	100	2.144.679.747	100	10.212.909.641	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	80	85	230.565.500	100	236.329.638	100	242.237.878	100	248.293.825	100	254.501.171	100	1.211.928.012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	persen	70	75	1.024.930.210	80	1.050.553.465	85	1.076.817.302	90	1.103.737.734	95	1.131.331.178	95	5.387.369.889	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	41.27	50	599.126.514	55	614.104.677	60	629.457.293	65	645.193.726	70	661.323.569	70	3.149.205.779	DINAS KESEHATAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	n/a	53.00	245.000.000	55.00	251.125.000	57.00	257.403.125	59.00	263.838.203	61.00	270.434.158	61.00	1.287.800.486	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need KB	Persen	9.16	8.25	2.039.666.667	8.00	2.090.658.333	7.70	2.142.924.792	7.40	2.196.497.911	7.00	2.251.410.359	7.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	63.39	65.00	2.039.666.667	67.00	2.090.658.333	68.00	2.142.924.792	69.00	2.196.497.911	70.00	2.251.410.359	70.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	Persen	73.70	74.00	2.039.666.667	74.30	2.090.658.333	74.50	2.142.924.792	74.80	2.196.497.911	75.00	2.251.410.359	75.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	Persen	82.74	82.90	115.000.000	83.00	117.875.000	83.10	120.821.875	83.20	123.842.422	83.30	126.938.483	83.30	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja Pada	Perangkat

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	80.92	81.30	115.000.000	81.50	117.875.000	81.60	120.821.875	81.80	123.842.422	82.00	126.938.483	82.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	71.94	72.30	115.000.000	72.50	117.875.000	72.60	120.821.875	72.80	123.842.422	73.00	126.938.483	73.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	77.23	78.00	115.000.000	78.30	117.875.000	78.50	120.821.875	78.80	123.842.422	79.00	126.938.483	79.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	90.0	90.9	115.000.000	90.9	117.875.000	90.9	120.821.875	90.9	123.842.422	100	126.938.483	100	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	**Ribu Rupiah/Orang/Tahun**	**9.500**	**12.000**	**6.746.152.726**	**24.000**	**6.914.806.544**	**32.500**	**7.087.676.707**	**44.000**	**7.264.868.625**	**52.000**	**7.446.490.344**	**52.000**	**35.459.994.946**	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	persen	14.37	15.19	45.000.000	15.55	46.125.000	15.90	47.278.125	16.25	48.460.078	16.61	49.671.580	16.61	236.534.783	DINAS PERDAGANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Toko (IKK Outcome)															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	71.43	73.32	6.000.000.000	75.09	6.150.000.000	76.68	6.303.750.000	78.63	6.461.343.750	80.41	6.622.877.344	80.41	31.537.971.094	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek saseran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	2	3	50.000.000	5	51.250.000	6	52.531.250	7	53.844.531	8	55.190.645	8	262.816.426	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Volume Eksport	Persen	2	3	75.000.000	5	76.875.000	7	78.796.875	8	80.766.797	9	82.785.967	9	394.224.639	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	76.78	79.08	59.976.000	83.69	61.475.400	85.99	63.012.285	88.29	64.587.592	88.29	66.202.282	88.29	315.253.559	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	N/A	1.50	150.000.000	2	153.750.000	2.5	157.593.750	3.00	161.533.594	3.50	165.571.934	3.50	788.449.278	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	persen	135	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	persen	3.4	3.6	75.180.842	3.8	77.060.363	4	78.986.872	4.2	80.961.544	4.4	82.985.583	4.4	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	persen	100	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	persen	85	85	50.634.200	85	51.900.055	85	53.197.556	85	54.527.495	85	55.890.683	85	266.149.989	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Indeks Pemberdayaan Gender	**Persen**	**58,96**	**59,12**	**1.715.000.000**	**59,58**	**1.757.875.000**	**59,87**	**1.801.821.875**	**60,12**	**1.846.861.423**	**60,55**	**1.893.039.108**	**60,55**	**9.014.597.406**	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	20	23	280.000.000	25	287.000.000	27	294.175.000	30	301.523.375	35	309.067.609	35	1.471.765.984	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	275.000.000	100	281.875.000	100	288.921.875	100	296.144.922	100	303.548.545	100	1.445.490.342	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	n/a	29.03	250.000.000	35.16	256.250.000	41.29	262.656.250	50.65	269.222.656	60.00	275.953.223	60.00	1.314.082.129	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	n/a	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	165.571.934	100	788.449.278	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekola (desa/kelurahan,Kecamatan layak anak)	Persen	22.22	29.63	500.000.000	33.33	512.500.000	40.74	525.312.500	48.15	538.445.313	55.56	551.906.445	55.56	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	260.000.000	100	266.500.000	100	273.162.500	100	279.991.563	100	286.991.352	100	1.366.645.415	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Kesejahteraan Sosial	**Persen**	**50**	**55**	**1.382.953.542**	**60**	**1.417.527.381**	**65**	**1.452.965.565**	**70**	**1.489.289.705**	**75**	**1.526.521.947**	**75**	**7.269.258.140**	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	529.394.800	58	542.629.670	67	556.195.411	75	570.100.297	75	584.352.804	75	2.782.672.982	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	12.425.160	100	12.735.789	100	13.054.184	100	13.380.538	100	13.715.052	100	65.310.723	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100	100	300.000.000	100	307.500.000	100	315.187.500	100	323.067.188	100	331.143.867	100	1.576.898.555	DINAS SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	400.268.902	56,69	410.275.625	55,12	420.532.515	53,73	431.045.828	52,49	441.821.974	52,49	2.103.944.844	DINAS SOSIAL
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	N/A	100	132.946.880	100	136.270.552	100	139.677.316	100	143.169.249	100	146.748.480	100	698.812.477	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	100	100	7.917.800	100	8.115.745	100	8.318.639	100	8.526.605	100	8.739.770	100	41.618.559	DINAS SOSIAL
Mewujudkan daerah yang beradab dengan																
mengedepankan pendekatan Agama, Budaya dan kearifan lokal																
Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	**Indeks ketentraman dan ketertiban**	**Persen**	**N/A**	**100**	**7.144.258.876**	**100**	**7.322.865.349**	**100**	**7.505.936.982**	**100**	**7.693.585.406**	**100**	**7.885.925.041**	**100**	**37.552.571.654**	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	**Indeks kriminilitas**	**Persen**	**N/A**	**100**	**7.144.258.876**	**100**	**7.322.865.349**	**100**	**7.505.936.982**	**100**	**7.693.585.406**	**100**	**7.885.925.041**	**100**	**37.552.571.654**	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	29.967.300	100	30.716.483	100	31.484.395	100	32.271.504	100	33.078.292	100	157.517.974	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	100	100	720.545.921	100	738.559.569	100	757.023.558	100	775.949.147	100	795.347.876	100	3.787.426.071	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100	100	431.090.000	100	441.867.250	100	452.913.931	100	464.236.780	100	475.842.699	100	2.265.950.660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100	100	29.487.700	100	30.224.893	100	30.980.515	100	31.755.028	100	32.548.903	100	154.997.039	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100	100	55.000.000	100	56.375.000	100	57.784.375	100	59.228.984	100	60.709.709	100	289.098.068	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	5.171.967.955	100	5.301.267.154	100	5.433.798.833	100	5.569.643.804	100	5.708.884.899	100	27.185.562.645	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100	100	706.200.000	100	723.855.000	100	741.951.375	100	760.500.159	100	779.512.663	100	3.712.019.197	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah																
berbasis inovasi dan potensi Lokal																
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	**Indeks Gini**	**Persen**	**0,36**	**0,32**	**39.661.866.962**	**0,28**	**40.727.008.624**	**0,25**	**41.870.600.726**	**0,2**	**42.941.661.826**	**0,19**	**44.038.792.212**	**0,19**	**209.239.930.350**	
Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah	**Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	**-2,08**	**5.0-5.5%**	**38.854.293.962**	**5.5-5.6%**	**39.899.246.299**	**5.6-5.7%**	**41.022.144.343**	**5.7-5.8%**	**42.071.994.032**	**5.8-6.0%**	**43.147.382.725**	**5.8-6.0%**	**204.995.061.361**	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	persen	100	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.759.375	100	16.153.359	100	16.557.193	100	78.844.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	persen	17	19	30.000.000	21	30.750.000	23	31.518.750	25	32.306.719	30	33.114.387	30	157.689.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	9.5	10	25.000.000	11	25.625.000	12	26.265.625	15	26.922.266	20	27.595.322	20	131.408.213	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	7	9	50.000.000	10	51.250.000	12	52.531.250	14	53.844.531	15	55.190.645	15	262.816.426	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen	5	5	30.000.000	7	30.750.000	8	31.518.750	10	32.306.719	15	33.114.387	15	157.689.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5	5	85.000.000	5	87.125.000	5	89.303.125	5	91.535.703	5	93.824.096	5	446.787.924	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	1.401.516.944	25.5 Persen	1.436.554.868	26.2 Persen	1.472.468.739	26.8 Persen	1.509.280.458	27.5 Persen	1.547.012.469	27.5 Persen	7.366.833.478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	5	10	593.936.000	10	608.784.400	15	624.004.010	20	639.604.110	25	655.594.213	25	3.121.922.733	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menegah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100	100	66.434.000	100	68.094.850	100	69.797.221	100	71.542.152	100	73.330.706	100	349.198.929	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	4.42	5.88	4.985.671.701	11.76	5.110.313.493	17.65	5.238.071.331	23.53	5.369.023.114	29.41	5.503.248.692	29.41	26.206.328.331	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	3.33	6.45	99.880.000	12.9	102.377.000	19.35	104.936.425	25.81	107.559.836	32.26	110.248.832	32.26	525.002.093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	1.87	1.96	3.148.841.741	3.92	3.227.562.785	5.88	3.308.251.854	7.84	3.390.958.151	9.8	3.475.732.104	9.8	16.551.346.635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	1.22	1.22	773.946.580	2.24	793.295.245	3.36	813.127.626	4.48	833.455.816	5.56	854.292.212	5.56	4.068.117.479	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	2.50	2.44	50.000.000	4.88	51.250.000	7.32	52.531.250	9.76	53.844.531	12.20	55.190.645	12.20	262.816.426	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90	90	242.444.809	95	223.037.592	95	270.419.161	95	285.278.333	95	300.273.237	95	1.321.453.132	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	3.715.415.180	100	3.808.300.560	100	3.903.508.073	100	4.001.095.775	100	4.101.123.170	100	19.529.442.758	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	N/A	90	2.802.742.791	90	2.872.811.361	90	2.944.631.645	95	3.018.247.436	100	3.093.703.622	100	14.732.136.855	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	6.539.733.179	100	6.703.226.508	100	6.870.807.171	100	7.042.577.350	100	7.218.641.784	100	34.374.985.992	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	100	124.883.855	100	128.005.951	100	131.206.100	100	134.486.253	100	137.848.409	100	656.430.568	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	70	75	16.795.608	75	17.215.498	80	17.645.886	80	18.087.033	85	18.539.209	85	88.283.234	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	39.189.752	100	40.169.496	100	41.173.733	100	42.203.077	100	43.258.153	100	205.994.211	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	75	75	242.444.809	75	223.037.592	80	270.419.161	80	285.278.333	85	300.273.237	85	1.321.453.132	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	101.636.800	100	104.177.720	100	106.782.163	100	109.451.717	100	112.188.010	100	534.236.410	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	85	85	242.444.809	90	223.037.591	90	270.419.160	90	285.278.332	95	300.273.238	95	1.321.453.130	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	796.458.404	100	816.369.864	100	836.779.111	100	857.698.588	100	879.141.053	100	4.186.447.020	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2.2	2.3	9.500.000.000	2.4	9.737.500.000	2.5	9.980.937.500	2.5	10.230.460.938	2.6	10.486.222.461	2.6	49.935.120.899	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	20	690.000.000	25	707.250.000	40	724.931.250	45	743.054.531	50	761.630.895	50	3.626.866.676	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	1	5	150.000.000	8	153.750.000	11	157.593.750	14	161.533.594	16	165.571.934	16	788.449.278	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	N/A	N/A	0	15	150.000.000	20	153.750.000	25	157.593.750	30	161.533.594	30	622.877.344	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.025.000.000	100	1.050.625.000	100	1.076.890.625	100	1.103.812.891	100	5.256.328.516	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	8	8	250.000.000	6	256.250.000	6	262.656.250	7	269.222.656	7	275.953.223	7	1.314.082.129	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	10	20	912.877.000	20	935.698.925	25	959.091.398	30	983.068.683	35	1.007.645.400	35	4.798.381.406	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	Persen	2.3	3.3	112.000.000	4.3	114.800.000	5.3	117.670.000	6.3	120.611.750	7.3	123.627.044	7.3	588.708.794	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Investasi Daerah	**Pertumbuhan Investasi**	**Persen**	**15**	**15**	**807.573.000**	**15**	**827.762.325**	**15**	**848.456.383**	**15**	**869.667.794**	**15**	**891.409.487**	**15**	**4.244.868.989**	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	Miliar Rupiah	310 iah	325 Miliar /Rupiah	300.000.000	340 Miliar /Rupiah	307.500.000	355 Miliar /Rupiah	315.187.500	360 Miliar /Rupiah	323.067.188	375 Miliar /Rupiah	331.143.867	375 Miliar /Rupiah	1.576.898.555	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35 Investor	39 Investor	70.000.000	44 Investor	71.750.000	51 Investor	73.543.750	59 Investor	75.382.344	65 Investor	77.266.902	65 Investor	367.942.996	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	322.573.000	50	330.637.325	50	338.903.258	50	347.375.840	50	356.060.236	50	1.695.549.659	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengentaskan Kemiskinan	**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**7,4**	**6**	**2.790.240.000**	**5,5**	**2.859.996.000**	**5**	**2.931.495.901**	**4,5**	**3.004.783.299**	**4**	**3.079.902.880**	**4**	**14.666.418.080**	
Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	**Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persen**	**2,89**	**2,75**	**368.240.000**	**2,49**	**377.446.000**	**2,27**	**386.882.151**	**2,05**	**396.554.204**	**2**	**406.468.059**	**2**	**1.935.590.414**	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persen	N/A	20	25.000.000	20	25.000.000	20	27.000.000	22	27.000.000	25	27.000.000	25	131.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	persen	62	68	106.600.000	70	109.265.000	75	111.996.625	80	114.796.541	85	117.666.454	85	560.324.620	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	0.93	21	190.140.000	23	194.893.500	25	199.765.838	27	204.759.983	29	209.878.983	29	999.438.304	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	44	46	46.500.000	46	48.287.500	47	48.119.688	48	49.997.680	49	51.922.622	49	244.827.490	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya Kemandirian Desa	**Indeks Desa Membangun**	**Skala**	**0,611 (Berkembang)**	**0,624 (Berkembang)**	**2.422.000.000**	**0,645 (Berkembang)**	**2.482.550.000**	**0,687 (Berkembang)**	**2.544.613.750**	**0,7 (Berkembang)**	**2.608.229.095**	**0,707 (Maju)**	**2.673.434.821**	**0,707 (Maju)**	**12.730.827.666**	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	persen	N/A	50	500.000.000	60	512.500.000	70	525.312.500	80	538.445.313	90	551.906.445	90	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MAMUJU

Nomor SOP	800/ 02 / I /2026
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU **DR. H. SUAIB,S.Sos.,MM** Pembina Utama Madya NIP. 19661007 198703 1 011
Nama SOP	**Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana** :
- Peraturan - Peraturan	1 S-1 Sederajat 2 Mampu mengoperasikan program komputer (MS Word, Excel dan Internet) 3 Memiliki tingkat ketelitian yang baik 4 Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim

Keterkaitan :	**Peralatan / Perlengkapan** :
- SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju	1 Jaringan Internet 2 Komputer 3 Printer 4 ATK 5 Flask Disc
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan** :
- Penyusuna - Dibuat time schedule terkait proses penyusunan LKjIP	Data - data dari SKPD diolah dan hasilnya dicetak untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja.

REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN MAMUJU

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	BB	100
2	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat (PERINGKAT)	Baik (B/PERLU PERBAIKAN	Baik	B	100
3	Nilai LPPD	Skor	Sedang	Sangat Tinggi	Sedang	75,29
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	76,74	90	73,10	81.22
5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	78	80	79	98,75
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	82	80	76	95
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	74,66	78,22	84,77	108,37
8	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	100
9	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	71,86	68,85	72,77	105,69
10	Indeks Pendidikan	Skala	0,64	0,50	0,65	130,00
11	Indeks Kesehatan	Skala	0,802	0,612	0,809	132,19
12	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	10,440	44,000	10.682	24,27
13	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	60,96	60,12	60,61	100,81
14	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	77	70	55,41	79,15
15	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	99,65	100	99,51	99,51
16	Indeks Kriminilitas	Persen	99,65	100	0.49	99,51
17	Indeks Gini	Persen	0,425	0,20	0,401	49,87
18	Pertumbuhan ekonomi	Persen	6,47	5.7- 5.8%	4,07	71,40
19	Pertumbuhan Investasi	Persen	45,04	15	-72,1	-117,14
20	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,15	4,5	6,99	64,37
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.77	2,05	3,38	60,65
22	Indeks Desa Membangun	Skala	0,667 (berkembang)	0,700 (berkembang)	0,636 (berkembang)	90,85

PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju
Keren

